

**KAJIAN TENTANG WANITA DAN PEMBANGUNAN PESIR
(STUDI KASUS : PEMBANGUNAN PELABUHAN
PERIKANAN PANTAI (PPP) MAYANGAN, PROBOLINGGO)**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh:

RISTA FITRIAWATI

NIM. 0610840033



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2010

**KAJIAN TENTANG WANITA DAN PEMBANGUNAN PESISIR
(STUDI KASUS : PEMBANGUNAN PELABUHAN
PERIKANAN PANTAI (PPP) MAYANGAN, PROBOLINGGO)**

Oleh :
RISTA FITRIAWATI
06108400033

DOSEN PENGUJI I

Dr. Ir. PUDJI PURWANTI, MP
NIP: 19640222 1989032003
Tanggal :

DOSEN PENGUJI II

Ir. ISMADI, MS
NIP : 19490515 1978021001
Tanggal :

**MENYETUJUI,
DOSEN PEMBIMBING I**

Dr. Ir. HARSUKO RINIWATI, MP
NIP: 19660604 1990022002
Tanggal :

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Ir. EDI SUSILO, MS
NIP : 19591205 1985031003
Tanggal :

**MENGETAHUI,
KETUA JURUSAN SEPK**

Dr. Ir. NUDDIN HARAHAP, MP
NIP. 19630604 1990022002
Tanggal :

RINGKASAN

RISTA FITRIAWATI. Kajian Tentang Wanita Dan Pembangunan Pesisir (Studi Kasus : Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo). Dibawah bimbingan **Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP** dan **Dr. Ir. Edi Susilo, MS.**

Proses pembangunan sangat berkaitan erat dengan pemberdayaan manusia. Pemberdayaan manusia dapat dilihat sebagai proses dan hasil akhir kemajuan yang bersifat mandiri. Hasil pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan perolehan manfaat yang diterima laki-laki dan perempuan. Kesenjangan tersebut dapat diperkecil dengan kebijakan pembangunan yang memasukkan dimensi gender kedalamnya.

Pemberdayaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak terlepas dari pendekatan pembangunan yang digunakan. Beberapa pendekatan pembangunan yang dipakai untuk menjawab ketimpangan gender antara lain pendekatan WID (*Women in Development*), WAD (*Women and Development*), dan GAD (*Gender and Development*).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mempelajari : (1) profil gender masyarakat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo, (2) konsep pembangunan PPP Mayangan yang dilakukan selama ini (WID,WAD, atau GAD), (3) merumuskan model pembangunan PPP Mayangan yang berparadigma GAD.

Metode yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Sumber data meliputi data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis gender yaitu teknik analisis Harvard dan teknik analisis Moser. Teknik pengambilan sampel melalui *purposive sampling*. Dan respondennya adalah *stakeholder-stakeholder* yang terkait dengan pembangunan PPP Mayangan dan masyarakat yang berkegiatan di PPP Mayangan.

Profil gender dari masyarakat sekitar PPP Mayangan meliputi profil kegiatan (reproduktif dan produktif), profil akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Sedangkan dalam pembangunan PPP Mayangan, profil gender meliputi profil aktivitas dan profil akses dan kontrol terhadap sumberdaya (hasil pembangunan) dari pembangunan PPP Mayangan.

Perempuan lebih mendominasi kegiatan reproduktif. Sedangkan laki-laki lebih banyak di ranah produktif. Tetapi tidak sedikit juga perempuan yang berperan di ranah produktif juga. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam hal ini perempuan memiliki beban ganda yaitu harus berperan di ranah reproduktif dan produktif. Laki-laki memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang dimiliki seperti tanah, kapal, kendaraan pribadi dan uang, sedangkan perempuan hanya memiliki akses terhadap sumberdaya tersebut. Meskipun ada perempuan yang memiliki kontrol terhadap sumberdaya itu disebabkan karena sesuatu hal, seperti perempuan janda dan perempuan yang memiliki pekerjaan sendiri.

Di dalam proses pembangunan PPP Mayangan laki-laki juga lebih banyak berperan daripada perempuan. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pengelolaan pelabuhan peran laki-laki lebih banyak. Meskipun ada peran dari perempuan itupun hanya sedikit. Untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya (hasil pembangunan) dari PPP Mayangan, laki – laki dan perempuan memiliki proporsi yang sama, karena fasilitas tersebut adalah fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun.

Konsep pembangunan PPP Mayangan yang selama ini dilakukan masih berparadigma WID (*Woman In Development*). Hal ini dikarenakan perempuan masih

menjadi obyek dalam pembangunan tersebut. mereka hanya sedikit terlibat dalam proses pembangunan. Biasanya mereka berperan dalam pembukuan dan masalah administrasi. Selain itu, bahwa pembangunan PPP Mayangan tersebut masih berparadigma WID bisa dilihat dari kebutuhan gender yang terpenuhi. Dari tujuan-tujuan dibangunnya PPP Mayangan tersebut bisa diketahui bahwa tujuan tersebut masih memenuhi KGP (Kebutuhan Gender Praktis) saja, sedangkan untuk KGS (Kebutuhan Gender Strategis) masih belum terpenuhi.

Agar pembangunan PPP Mayangan sesuai dengan keadaan sekarang yang berparadigma kesetaraan gender, maka model pembangunan yang seharusnya diterapkan adalah konsep pembangunan berparadigma GAD (*Gender And Development*). Dimana dalam konsep ini laki – laki dan perempuan bekerjasama dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai pada pengawasan atau monitoring. Dengan diikutsertakannya perempuan dalam perencanaan maka akan dapat menyusun anggaran yang responsif gender. Selain itu pada akhirnya kebutuhan gender praktis dan kebutuhan gender strategis bisa terpenuhi. Semua lapisan masyarakat baik laki – laki maupun perempuan bisa menikmati hasil dari pembangunan tersebut dan tujuan dari pembangunan nasional bisa tercapai.

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain : kegiatan reproduktif lebih didominasi oleh perempuan. Laki-laki hanya berperan di ranah produktif. Tetapi tidak sedikit juga perempuan yang berada di ranah produktif juga. Laki-laki memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang ada seperti tanah, kapal, uang, dan kendaraan pribadi. Sedangkan perempuan hanya memiliki akses terhadap sumberdaya tersebut. dalam proses pembangunan PPP Mayangan, laki-laki juga lebih mendominasi kegiatan pembangunan. Peran perempuan sangat sedikit. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pembangunan PPP Mayangan masih berparadigma WID. Dan konsep pembangunan PPP Mayangan yang sesuai dengan keadaan sekarang adalah pembangunan yang berparadigma GAD.

Saran yang dapat diberikan diantaranya : untuk menghindari pembangunan yang bias gender, seharusnya dalam proses perencanaan pembangunan melibatkan perempuan, sehingga hasil dari pembangunan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, baik laki – laki maupun perempuan, masih perlunya pengetahuan tentang gender dan pembangunan kepada masyarakat dan pemerintah, sehingga kesetaraan gender bisa terwujud dalam pembangunan, konsep pembangunan yang seharusnya digunakan oleh pemerintah saat ini adalah dengan pendekatan GAD, sehingga tujuan dari pembangunan nasional bisa tercapai dan sesuai dengan target dari *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015 yang mana salah satu targetnya adalah mewujudkan kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan, untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan pesisir, maka perlu adanya peningkatan kualitas dari Sumberdaya Manusia (SDM) terutama dari perempuan pesisir tersebut.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat yang memiliki kuasa atas segala hal. Atas kehendak-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Skripsi berjudul **“Kajian Tentang Wanita Dan Pembangunan Pesisir (Studi Kasus : Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo)”**. Penulisan laporan Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang.

Penelitian ini berisikan tentang bagaimana kontribusi wanita dalam pembangunan, khususnya pembangunan PPP Mayangan, Probolinggo.

Dengan terselesaikannya laporan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga besar, terutama Ayah, Ibu dan kakak tercinta yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk serta kesabaran atas keterlambatan studiku.
2. Dr.Ir.Harsuko Riniwati, MP dan Dr. Ir. Edi Susilo, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dari tahap awal sampai akhir pembuatan laporan Skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.
3. Bapak Nonot, Bapak Sudiman, dan Bapak Husni, Bapak Hariyanto, Ibu Sudarmi, serta semua masyarakat yang ada di sekitar PPP Mayangan atas keterbukaannya memberikan data yang kami butuhkan.
4. Teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan dan hiburan selama proses.
5. Semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Penulis juga berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan atau memerlukannya.

Malang, Agustus 2010

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Peneitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pembangunan Nasional	10
2.2 Pembangunan Pesisir Dan Kelautan.....	12
2.3 Pelabuhan Perikanan.....	15
2.4 Partisipasi Masyarakat.....	17
2.5 Definisi Gender	21
2.6 Kesetaraan Gender.....	26
2.7 Perempuan Dalam Pandangan Islam.....	31



2.8 Kedudukan Laki-laki Dan Perempuan Dalam Pembangunan 33

2.9 Konsep *Woman In Development* (WID),
Woman And Development (WAD),
Gender And Developmnet (GAD)..... 36

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 46

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 48

3.3 Populasi..... 49

3.4 Teknik Pengambilan Sampel..... 51

3.5 Teknik Pengambilan Data..... 52

3.6 Jenis dan Sumber Data 54

3.7 Analisis Data 57

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 73

 4.1.1 Letak Lokasi Penelitian 73

 4.1.2 Latar Belakang Pembangunan
 Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan 73

 4.1.3 Fasilitas-fasilitas di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan..... 75

 4.1.3.1 Sarana Laut..... 75

 4.1.3.2 Sarana Darat..... 77

4.2 Profil Gender dari Masyarakat di Pelabuhan Perikanan Pantai
 (PPP) Mayangan..... 82

 4.2.1 Profil Kegiatan..... 82

 4.2.2 Profil Akses Dan Kontrol..... 99

4.3 Profil gender aktivitas dalam pembangunan PPP Mayangan..... 103



4.4 Akses dan Kontrol pada Sumberdaya hasil dari
Kegiatan Pembangunan PPP Mayangan..... 108

4.5 Konsep Pembangunan PPP Mayangan yang dilakukan selama ini 112

4.6 Model Pembangunan PPP Mayangan, Probolinggo
yang Berparadigma GAD..... 119

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 128

5.2 Saran..... 131

DAFTAR PUSTAKA..... 133



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nelayan (laki-laki) memperbaiki alat tangkap yang rusak	87
Gambar 2. Pendaratan Kapal dan ikan oleh nelayan (laki-laki).....	88
Gambar 3. Pendinginan Ikan Di Pelabuhan	89
Gambar 4. Kegiatan Pemasaran ikan di TPI yang ada di PPP Mayangan	91
Gambar 5. Acara Koordinasi Pengelolaan PPP Mayangan.....	104
Gambar 6. Proses Pembangunan PPP Mayangan.....	105
Gambar 7. Proses Pembangunan PPP Mayangan.....	106
Gambar 8. Acara Koordinasi Pengelolaan PPP Mayangan.....	113
Gambar 9. Proses Pembangunan PPP Mayangan	114
Gambar 10. Keranjang ikan (fasilitas di pelabuhan)	115
Gambar 11. Alat bantu untuk mengangkut keranjang	117
Gambar 12. Model pembangunan WID,WAD,GAD	125
Gambar 13. Model pembangunan berparadigma GAD	126
Gambar 14. Model pembangunan pelabuhan berparadigma GAD	127



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Antara WID dan GAD	44
Tabel 2. Perbedaan Kebutuhan Praktis Gender dan Strategis Gender	45
Tabel 3. Jadwal penelitian	49
Tabel 4. Aplikasi teknik Analisis Harvard profil aktivitas	65
Tabel 5. Aplikasi Analisis Harvard profil akses dan kontrol/ manfaat	66
Tabel 6. Aplikasi Analisis Harvard faktor-faktor yang berpengaruh.....	66
Tabel 7. Aplikasi teknik analisis Moser.....	70
Tabel 8. Kegiatan Reproduksi masyarakat sekitar PPP Mayangan.....	84
Tabel 9. Kegiatan Produktif masyarakat sekitar PPP Mayangan	94
Tabel 10. Kegiatan Sosial masyarakat sekitar PPP Mayangan.....	96
Tabel 11. Akses dan Kontrol masyarakat sekitar PPP Mayangan terhadap sumberdaya.....	102
Tabel 12. Peran Laki-laki dan perempuan dalam pembangunan PPP Mayangan.....	112
Tabel 13. Kebutuhan gender praktis dan kebutuhan gender strategis yang terpenuhi dalam pembangunan PPP Mayangan	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Sesungguhnya Aku (Allah) tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik seorang lelaki maupun perempuan” (QS. Ali Imran [3]:195). Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa Allah tidak membeda-bedakan makhluknya berdasarkan jenis kelaminnya, tetapi yang membedakan adalah amalnya. Seharusnya yang terjadi di masyarakat juga demikian, tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender mempunyai makna bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama diberbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Selama ini kesetaraan gender dirasa masih kurang dan jauh dari harapan.

Sebelum membahas tentang kesetaraan gender, perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian gender dan perbedaannya dengan seks atau jenis kelamin. Menurut Handayani dan Sugiharti (2008), seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Konsep gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Setelah otonomi daerah diberlakukan sejak tahun 2001, terjadi perubahan paradigma pembangunan, yaitu dari yang berorientasi sentralistik ke arah

desentralisasi. Perubahan tersebut tentunya membawa konsekuensi yaitu: pemerintah harus memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk ikut menentukan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan berbagai permasalahan dan kebutuhan daerah setempat. Banyak kalangan yang menilai pembangunan yang berjalan hingga saat ini masih netral gender, artinya masih banyak ketimpangan atau kesenjangan hubungan relasi antara berbagai pihak gender terutama antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh haknya. Hak tersebut dapat ditinjau dari aspek perolehan akses (peluang), partisipasi aktif dalam pelaksanaan, keikutsertaan untuk menentukan berbagai kebijakan pembangunan maupun perolehan manfaat dari hasil kegiatan atau aktivitas pembangunan yang telah dilaksanakan. Oleh sebab itu muncul berbagai penilaian bahwa kedudukan dan peran perempuan masih berada pada posisi termarginalkan, ter subordinasi atau bahkan diperlakukan secara diskriminatif, selain berbagai tindak kekerasan lainnya (Suhaeti dan Basuno, 2003).

Menurut Suhaeti dan Basuno (2003), dalam rangka meningkatkan peran perempuan, diperlukan strategi dalam pemberdayaan peran perempuan sesuai kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat atau yang spesifik lokasi. Salah satu strategi akselerasi peran perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan adalah dengan memperhitungkan dan bekerjasama dengan kaum lelaki. Melalui pendekatan semacam ini, maka persoalan ketidakadilan gender dan marginalisasi perempuan diharapkan secara sistematis dapat diminimalkan.

Salah satu contoh masih rendahnya peran perempuan di dalam ranah publik yang bisa memicu ketidakadilan gender adalah masih minimnya perempuan dalam keikutsertaannya di dalam pembangunan nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, Badrunnisa, bahwa keterlibatan perempuan sangat minim. Sehingga berdampak pada

kurangnya kebijakan pembangunan yang sesuai aspirasi kalangan perempuan. Selama ini dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat gampong, kecamatan, dan kota, keikutsertaan perempuan rata-rata dibawah 10 % disetiap tingkatan. Karena itu, Pemkot Banda Aceh merasa perlu menggelar Musrenbang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Harapannya, pembangunan di Kota Banda Aceh bisa mengimplementasikan penyetaraan gender, dan mengkomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam merencanakan pembangunan. Musrenbang diharapkan menjadi sarana penampung aspirasi kaum perempuan, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dan berdasarkan aspirasi kaum perempuan. Dengan demikian, kaum perempuan secara tidak langsung terlibat dalam perencanaan pembangunan tersebut (Waspada On line, 2010).

Proses pembangunan sangat berkaitan erat dengan pemberdayaan manusia. Pemberdayaan manusia dapat dilihat sebagai proses dan hasil akhir kemajuan yang bersifat mandiri. Hasil pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan perolehan manfaat yang diterima laki-laki dan perempuan. Kesenjangan tersebut dapat diperkecil dengan kebijakan pembangunan yang memasukkan dimensi gender kedalamnya. Dimensi gender dalam pembangunan dapat mengukur keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, serta manfaat yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan.

Pemberdayaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak terlepas dari pendekatan pembangunan yang digunakan. Beberapa pendekatan pembangunan yang dipakai untuk menjawab ketimpangan gender antara lain pendekatan WID (*Women in Development*), WAD (*Women and Development*), dan GAD (*Gender and Development*).

WID merupakan pendekatan pembangunan yang fokus kepada perempuan dan bertujuan memastikan bahwa perempuan dilibatkan dalam pembangunan. Pendekatan ini mencoba untuk meningkatkan emansipasi perempuan dalam berbagai bidang untuk mengejar ketertinggalannya dari laki-laki (KNPPRI, 2008).

WID gagal membawa perubahan struktural jangka panjang. Keterbatasan WID memunculkan pendekatan WAD (*Women and Development*). Pendekatan WAD menawarkan pandangan lebih kritis mengenai posisi perempuan daripada WID. Kata penghubung 'dan' menunjukkan pada pengertian kesejajaran antara kata 'perempuan' dan 'pembangunan'. WAD lebih mengarah pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan.

Pada prakteknya WAD menghadapi persoalan serupa seperti yang dihadapi WID. Faktor umur, suku dan etnisitas semuanya mempengaruhi akses perempuan pada proses pembangunan dan hal ini berbeda dari satu perempuan dengan perempuan lainnya. WAD menawarkan perspektif global subordinasi perempuan yaitu posisi inferior perempuan yang universal di sistem internasional menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan gender. Keduanya gagal menyadari kompleksitas hubungan gender dan lebih jauh bagaimana gender melekat di dalam hubungan hegemoni kekuasaan (www.demas.web.id. 2010).

Pada tahun 1980-an muncul pendekatan GAD (*Gender and Development*) sebagai alternatif dari WID dan WAD. GAD mengakui pentingnya konstruksi sosial dari produksi dan reproduksi bagi peran dan tugas di masyarakat yang diserahkan pada perempuan. GAD bertujuan mencari mengapa perempuan mendapat peran kelas dua dibanyak masyarakat dan GAD mengadopsi pendekatan holistik untuk proyek kerjanya. GAD menolong perempuan mengorganisasi diri di dalam perilaku efektif secara politik agar mereka bisa mengatasi struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menghambat dan membatasi hidup mereka. Tujuan akhir GAD adalah mencapai pergeseran hubungan

kekuasaan yang akan memberikan perempuan otonomi lebih besar (www.demas.web.id. 2010).

Pendekatan GAD secara implementatif cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan struktural. Oleh sebab itu pelaksanaan GAD memerlukan dukungan sosio budaya masyarakat dalam politik nasional yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. GAD tidak mungkin terlaksana bila dalam politik suatu negara masih menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior dan subordinatif (Handayani dan Sugiarti, 2008).

Partisipasi aktif antara laki-laki dan perempuan secara seimbang dapat mempercepat tercapainya tujuan dari pembangunan suatu bangsa. Kondisi perempuan yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki menyebabkan perempuan kurang dapat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi-kondisi tersebut seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses sumber-sumber ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia, sistem upah yang diskriminatif serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah.

Demikian juga yang terjadi di masyarakat pesisir, masih terjadi kesenjangan gender diberbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam pembangunan pesisir dan kelautan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan pesisir dan kelautan, entah itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemanfaatan dari pembangunan tersebut. Sehingga dengan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan pesisir dan kelautan maka mereka kurang bisa merasakan manfaat dari hasil pembangunan tersebut.

Salah satu pembangunan wilayah pesisir adalah pembangunan pelabuhan perikanan. Keberadaan pelabuhan sangat dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan-kegiatan perikanan terutama perikanan tangkap. Kegiatan - kegiatan perikanan

tersebut meliputi pendaratan kapal, tempat pelelangan ikan, penanganan hasil tangkap dan lain sebagainya.

Tujuan dari pembangunan pelabuhan perikanan antara lain dapat meningkatkan taraf hidup nelayan, mendorong perluasan kesempatan kerja, mendorong pengembangan ekonomi daerah/wilayah sekitar, meningkatkan pendapatan daerah dan bisa mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan. Seharusnya dengan adanya pelabuhan perikanan masyarakat pesisir baik laki-laki maupun perempuan bisa merasakan manfaatnya. Manfaat pelabuhan tersebut masih kurang berpengaruh terhadap kesejahteraan dari perempuan. Selama ini yang bisa merasakan manfaat dari pembangunan pelabuhan masih laki-laki saja. Oleh karena itu perlu adanya perubahan paradigma dalam proses pembangunan pelabuhan tersebut. Selama ini perempuan tidak diikutsertakan dalam proses pembangunan, sekarang partisipasi dari perempuan harus diperhatikan dalam proses pembangunan pelabuhan tersebut. Baik mulai proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengelolaan pelabuhan tersebut. Konsep pembangunan pelabuhan seharusnya lebih berspektif gender, sehingga semua pihak baik laki-laki maupun perempuan bisa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.

Di Kota Probolinggo telah dibangun Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang terletak di Mayangan. Pembangunan PPP tersebut seharusnya bisa memberikan kontribusi yang lebih terhadap masyarakat nelayan baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut bisa terwujud jika *stakeholder* yang terkait dengan pembangunan PPP tersebut mengikut sertakan perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan dari PPP tersebut. Karena jika partisipasi perempuan sangat kurang bahkan tidak ada, maka pembangunan PPP Mayangan di Probolinggo tersebut tidak akan bermanfaat terutama bagi kaum perempuan. Pada akhirnya tujuan dari pembangunan nasional tidak akan tercapai seluruhnya. Salah satu tujuan

pembangunan nasional adalah penyetaraan gender antara laki-laki dan perempuan diberbagai aspek kehidupan termasuk salah satunya dalam memanfaatkan hasil pembangunan tersebut. Laki-laki dan perempuan harus bisa merasakan manfaat dari hasil pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu misi pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 adalah mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Meskipun demikian, untuk dapat menciptakan kondisi tersebut ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki serta masih rendahnya peran kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan (Arumwati,W.dkk, 2005).

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dan proyek di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi/aspek gender, yaitu melihat laki-laki dan perempuan sebagai pelaku yang setara dalam akses, partisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan (KNPPRI, 2008).

Tetapi pada kenyataannya saat ini tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, terutama masyarakat perempuan pesisir. Mereka jarang sekali terlibat dalam proses pembangunan pesisir sehingga kaum perempuan kurang bisa menikmati hasil dari pembangunan pesisir, salah satunya pembangunan pelabuhan perikanan.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana profil gender dalam hal ini meliputi profil kegiatan, akses, dan kontrol dari masyarakat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo?
2. Apa konsep pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo berparadigma *Women in Development* (WID), *Women and Development* (WAD), *Gender and Development* (GAD)?
3. Bagaimana model pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo yang mengikuti konsep GAD?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari:

1. Profil gender masyarakat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo.
2. Konsep pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo yang dilakukan selama ini (WID, WAD, atau GAD).
3. Rumusan model pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo yang berparadigma GAD.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain bagi:

1. Masyarakat pesisir (perempuan) terutama masyarakat pesisir Mayangan, Probolinggo, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitasnya (pendidikan, kesejahteraan, keterampilan, pengambilan keputusan, dan lain-lain) agar pembangunan membutuhkan perempuan bukan perempuan yang membutuhkan pembangunan.

2. Pemerintah, yaitu pembuat kebijakan dan pengelola pelabuhan sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang membutuhkan perempuan / masyarakat (WAD dan GAD).
3. Peneliti, sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya berkenaan dengan penelitian perempuan dan pembangunan atau gender dan pembangunan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Nasional

Menurut Siagian 1983:3, pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian ide pokok pembangunan menurut Siagian: pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat *multi dimensional*; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan (Suryono, 2004).

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut

untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selama ini pembangunan nasional yang telah dilakukan lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan kondisi yang lain seperti kondisi sosial dari masyarakat Indonesia. Kondisi sosial masyarakat menjadi terabaikan sehingga dampak dari pembangunan yang ada justru tidak meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut Moeljarto Tjokrowinoto dalam Samodra Wibawa (1991), kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama Pelita III dan IV telah menunjukkan bahwa pembangunan nasional yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang telah berhasil meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Namun, keberhasilan yang telah dicapai selama ini tetap belum mampu mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju. Lebih dari itu, tingkat pertumbuhan yang tinggi telah dicapai dengan pengorbanan yang cukup besar, berupa deteriorasi ekologis, pengurasan sumberdaya alam yang cepat, kesenjangan sosial yang semakin tajam, dan ketergantungan masyarakat yang semakin besar kepada pemerintah.

Oleh karena itu, para pemerhati lingkungan (*environmentalis*) mengusulkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut mereka pembangunan berkelanjutan mungkin diwujudkan melalui keterkaitan yang tepat antara

alam, kondisi ekonomi dan budaya. Sejak Pelita V Pemerintah Indonesia memilih pembangunan berkelanjutan sebagai orientasi dari pembangunan nasional.

Dalam perkembangannya pembangunan di negara-negara berkembang (negara dunia ketiga) mencoba melakukan terobosan baru (*break trough*) dengan mengakselerasi gerak dan perilaku pembangunannya yakni membuat rencana-rencana pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan masyarakatnya, misalnya: mengubah paradigma pembangunan dari *sentralisasi* menjadi *desentralisasi*. Berbagai tindakan yang semula bersifat *top down* digantikan dengan pola *bottom up* yang dipandang lebih demokratis. Pembangunan yang tadinya berorientasi sektoral berubah menjadi pembangunan yang berorientasi lintas sektoral (*regional holistic*). Pembangunan yang tadinya berdimensi wilayah negara (*public sphere*) berubah menjadi pembangunan yang berdimensi masyarakat warga (*civil society sphere*). Pola pembangunan yang tadinya berorientasi *economic minded* berubah ke pola pembangunan menyeluruh (*comprehensif*) yang lebih bernuansa pembangunan manusia seutuhnya (*people center development*). Perubahan-perubahan strategi pembangunan semacam ini lebih dikenal dengan sebutan gerakan reformasi pembangunan (Suryono, 2004).

2.2 Pembangunan Pesisir dan Kelautan

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya. Sementara itu kekayaan hidrokarbon dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. Selain menyediakan berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan

agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan permukiman dan tempat pembuangan limbah. Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi memadai untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Dalam kaitan dengan ketersediaannya, potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut ini secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu sumber daya dapat pulih (*renewable resources*), sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*). Ketiga potensi inilah walaupun telah dimanfaatkan, tetapi masih belum optimal dan terkesan tidak terencana dan terprogram dengan baik (Dahuri dkk, 1996 dalam Diananto, 2006).

Wilayah pesisir dan lautan beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan tumpuan harapan bagi bangsa Indonesia di masa depan. Di dalamnya terkandung kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya dan beragam, seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, minyak dan gas, bahan tambang dan mineral, dan kawasan pariwisata. Akan tetapi pembangunan wilayah pesisir dan lautan selama ini menunjukkan hasil yang kurang optimal. Di beberapa kawasan pesisir dan lautan yang padat penduduk dan tinggi intensitas pembangunannya terdapat berbagai gejala kerusakan lingkungan termasuk pencemaran, degradasi fisik habitat utama pesisir (mangrove, terumbu karang, estuaria, dll) dan abrasi pantai telah mencapai suatu tingkat yang mengancam kapasitas keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan pesisir dan laut untuk kegiatan perikanan, pertambangan, perhubungan, industri, konservasi habitat, pariwisata, dan permukiman, telah menimbulkan berbagai permasalahan yang berpotensi besar memicu konflik kepentingan antar pihak, sehingga berdampak pada kelestarian fungsi dan kerusakan sumberdaya alam (Diananto, 2006).

Dalam pembangunan wilayah pesisir dan Kelautan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Di Indonesia pengelolaan wilayah pesisir sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi dengan diundangkannya UU no 22 Tahun 1999, pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir dengan batas perairan laut sejauh 4 mil dari garis pantai (Dartoyo, 2004).

Konsep pengelolaan wilayah pesisir didalam filosofinya mengenal prinsip keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan juga memasukkan konsep keseimbangan ketergantungan waktu dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi paradigma utama dalam khasanah dunia pengelolaan wilayah pesisir (Dartoyo,2004).

Menurut Hartomo (2004), program pembangunan ekonomi Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II, menempatkan sumberdaya pesisir dan laut menjadi salah satu tumpuan bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi (*sustainable economic development*) Indonesia. Hal ini dapat dipahami dengan dua alasan utama, yaitu (1) pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat dan (2) kenyataan yang menunjukkan bahwa sumberdaya alam di lahan atas (*uptand resources*) semakin menipis atau sulit untuk dikembangkan.

Secara sosial-ekonomis, sebagian besar penduduk pesisir masih merupakan kelompok sosial termiskin di tanah air, dan kesenjangan pembangunan antar wilayah masih sangat besar. Salah satu penyebab berbagai permasalahan yang mengancam keseimbangan pembangunan wilayah pesisir adalah karena selama ini pola pemanfaatan sumberdaya dilakukan secara sektoral. Pengelolaan sektoral telah terbukti kurang efektif dalam menangani kompleksitas permasalahan pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan. Pendekatan pengelolaan wilayah pesisir

secara terpadu memperbaiki pendekatan pengelolaan sektoral dalam empat hal utama, yaitu: (1) memberikan perhatian yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai sistem sumberdaya pesisir yang unik, serta kapasitas keberlanjutannya bagi berbagai macam kegiatan manusia; (2) mengoptimalkan pemanfaatan serta neka (ganda) dari sistem ekosistem pesisir serta seluruh sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya dengan memperhatikan atau mengintegrasikan segenap informasi ekologis, ekonomis, sosial-budaya dan hukum kelembagaan; (3) meningkatkan pendekatan interdisipliner dan koordinasi serta kerjasama intersektoral dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang kompleks, kemudian memformulasikan strategi bagi perluasan dan diversifikasi berbagai kegiatan ekonomi; dan (4) membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas investasi kapital pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, di bidang ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup (Hartomo, 2004).

2.3 Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh (Wikipedia, 2010).

Keberhasilan pengembangan sektor perikanan tidak terlepas dari dukungan prasarana pendukungnya dimana dalam hal ini adalah pelabuhan perikanan, terutama perikanan tangkap karena pelabuhan perikanan merupakan bagian dari sistem perikanan tangkap secara keseluruhan dimana pelabuhan perikanan merupakan *interface* antara aktifitas perikanan di laut (penangkapan) dengan aktifitas perikanan di darat (pengolahan dan pemasaran). Kemajuan perikanan tangkap dapat dilihat dari sejauhmana pelabuhan-pelabuhan perikanan berkembang. Lebih dari itu, pelabuhan

perikanan merupakan pusat segala aktivitas yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dan usaha-usaha pendukung lainnya seperti usaha penyediaan bahan perbekalan, perkapalan, perbengkelan, pengolahan hasil tangkapan dan lain-lain.

Undang-undang No. 9 tahun 1985 menyebutkan bahwa pelabuhan perikanan sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan produksi dan sesuai dengan sifatnya sebagai suatu lingkungan kerja mempunyai fungsi sebagai (1) pusat pengembangan masyarakat nelayan, (2) tempat berlabuh kapal perikanan, (3) tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, (4) tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, (5) pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, (6) pusat pelaksana pembinaan mutu hasil perikanan serta (7) pusat pelaksana penyuluhan dan pengumpulan data perikanan.

Merujuk kepada fungsi-fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka pelabuhan perikanan menduduki posisi yang strategis dalam upaya peningkatan produksi perikanan laut yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan negara, pemerintah daerah maupun masyarakat nelayan maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan sehingga mereka mampu berusaha mandiri.

Pembangunan pelabuhan perikanan dimaksudkan untuk menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat nelayan sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Untuk maksud tersebut, maka pengembangan pelabuhan perikanan harus didasarkan pada (i) *Resources based* yaitu adanya ketersediaan sumberdaya ikan secara berkesinambungan (ii) *market oriented* yaitu bahwa hasil tangkapan yang didaratkan haruslah memiliki nilai ekonomi penting dan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah (*added value*) yang besar (iii) *community based development* yaitu pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemanfaatannya sehingga memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat khususnya *stakeholder* perikanan (iv) keterkaitan antar sektor dimana keberadaan pelabuhan perikanan harus memberikan *multiplier effect* secara lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pelaku bagi pengembangan industri yang terkait baik industri hulu maupun hilir sehingga keberadaannya akan mampu mendorong pertumbuhan industri perikanan yang bermanfaat bagi peningkatan devisa negara (lewat komoditas eksportnya), alternatif saluran baru bagi produksi perikanan yang selama ini masih didominasi oleh pemasaran ikan segar dan memberikan insentif bagi masuknya investasi modal swasta ke dalam sektor perikanan (Solihin, 2008).

2.4. Partisipasi Masyarakat

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* 1999: 29, partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi 2007: 27, adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Sacafirmansyah, 2009).

Dari definisi pakar-pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh

Conyers 1991: 154-155, sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri (Sacafirmansyah, 2009).

Bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia (Sacafirmansyah, 2009).

Dalam proses pembangunan nasional termasuk salah satunya pembangunan pesisir, seharusnya memperhatikan dan memasukkan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, sampai pada evaluasi dari hasil pembangunan tersebut. Sehingga dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka hasil dari pembangunan tersebut bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sama dengan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Menurut Ginandjar Kartasasmita (1997), keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat kita, kebinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional kita sebut ketahanan nasional. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Masyarakat yang sejahtera pada taraf awal pembangunan adalah suatu masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kebutuhan pokok itu mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Namun hal itu saja tidak cukup,

karena masyarakat yang sejahtera harus pula berkeadilan. Dengan makin majunya taraf kehidupan masyarakat, maka masyarakat yang sejahtera akan menikmati kemajuan hidup secara berkeadilan. Keseluruhan upaya itu harus membangun kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan.

Setelah berlakunya otonomi daerah (otoda), maka pembangunan dari masing-masing daerah menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemerintah daerah (pemda) yang bekerja bersama masyarakat setempat. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. Pengabaian terhadap faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemborosan keuangan negara merupakan implikasi lain deviasi tersebut. Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi proyek-proyek pembangunan di tingkat kabupaten/kota, terbukti telah berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga pedesaan (*John Clark:1995; John Friedmann:1992*). Lebih lanjut *Gunawan Sumodiningrat (1996)* mengemukakan bahwa pemihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam keseluruhan rangkaian penyusunan program-program pembangunan, perlu diyakini oleh aparat pemerintah (daerah) sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional, sehingga mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat . Dimasa depan, masyarakat sendirilah yang akan memainkan peran utama dalam pengimplementasian program-program pembangunan didaerahnya, sedangkan kelompok luar yaitu NGOs akan bertindak sebagai fasilitator, dinamisator, katalisator, mediator dan komunikator, serta peran pemerintah (daerah)

lebih merupakan pelengkap dan penunjang termasuk menentukan aturan dasar permainannya (Zuryawan Isvandiar Zoebir, 2008).

2.5 Definisi Gender

Gender berasal dari bahasa latin, '*genus*', berarti tipe atau jenis. Gender merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki, yang ditentukan secara sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan/kodrat, yang termasuk dalam gender adalah harapan komunitas tentang karakteristik, perilaku, serta sikap perempuan dan laki-laki (KNPPRI, 2008).

Gender telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam segala aspek. Adanya gender telah memunculkan peran gender yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Peran gender inilah yang membentuk pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pembagian kerja ini seharusnya berjalan secara seimbang namun dalam masyarakat seringkali memperlihatkan ketidakseimbangan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Pembagian kerja yang tidak seimbang ini memunculkan berbagai ketidakadilan gender dalam masyarakat (KNPPRI, 2008).

Untuk menganalisis persoalan ketidakadilan gender perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian gender dan perbedaannya dengan seks atau jenis kelamin. Menurut Handayani dan Sugiharti (2008), seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang yang berbeda. Laki-laki memiliki fisik yang kuat, otot yang kuat, memiliki jakun, bersuara berat, memiliki penis, testis, sperma, yang berfungsi untuk alat reproduksi dalam meneruskan keturunan. Perempuan memiliki hormon yang berbeda dengan laki-laki, sehingga terjadi menstruasi, perasaan yang sensitif, serta ciri-ciri fisik

dan postur tubuh yang berbeda dengan laki-laki, seperti bentuk pinggul yang lebih besar daripada laki-laki. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Sedangkan menurut Rahayu (2008), mengacu kepada peran-peran dan tanggung-jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Termasuk dalam konsep gender adalah harapan-harapan masyarakat mengenai ciri-ciri, sikap, dan perilaku perempuan dan laki-laki (feminitas dan maskulinitas). Peran-peran dan harapan-harapan tersebut dipelajari, dapat berubah dari waktu ke waktu, dan bervariasi menurut budaya masing-masing masyarakat. Analisis gender memperlihatkan bagaimana subordinasi perempuan dikonstruksikan oleh budaya, dan karenanya juga dapat dirubah. Hal tersebut berbeda dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang terberi (seks) dan karenanya seks tidak dapat dirubah.

Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis (Moore, 1988,1994;10). Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan berhubungan dengan gender feminine, kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah korelasi absolute (Moose, 1996). Hal ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam suatu kebudayaan dapat dianggap feminine dalam budaya lain.

Dengan kata lain, kategori maskulin atau feminin itu bergantung pada konteks sosial budaya setempat. Gender membagi atribut dan pekerjaan menjadi maskulin dan feminin. Realitas sosial menunjukkan bahwa pembagian peran berdasarkan gender melahirkan suatu keadaan yang tidak seimbang saat perempuan menjadi ter subordinasi oleh laki-laki. Hal ini yang disebut dengan ketimpangan gender (Abdullah, 2003).

Penjelasan mengenai gender dijelaskan oleh beberapa teori. Teori gender pada prinsipnya memberikan penjelasan mengenai keberadaan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Penjelasan teori gender dimulai dari dua aliran besar dalam memahami persoalan gender, yaitu:

1. *Teori Nurture*

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya yang mengakibatkan terjadinya perbedaan peran, tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial selalu memposisikan perempuan dan laki-laki pada status yang berbeda. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis (bangsawan dan penindas) dan perempuan sebagai proletar (budak dan tertindas). Paham ini memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat seperti pada eksekutif, legislatif, usahawan, politikus dan berbagai profesi.

2. *Teori Nature (Alamiah)*

Teori ini menerangkan perbedaan sosiopolitis antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pendekatan biologis dan teologis, yang diindikasikan dengan adanya peran dan tugas yang berbeda secara kodrati. Teori ini bersifat statis karena secara kategoris tidak memberikan perubahan pandangan mengenai struktur hubungan antar laki-laki dan perempuan,

yang tidak memberikan peluang bagi kesejajaran (*equality*) antara perempuan dan laki-laki dalam menjalankan fungsinya.

3. *Teori Equilibrium (Equilibrium Theory)*

Teori ini lebih mengedepankan konsep kemitraan dan keharmonisan hubungan antara laki-laki dan perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Menurut teori ini setiap peran dan kepentingan perempuan dan laki-laki harus mempertimbangkan tingkat keseimbangan. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki kelebihan dan kekurangannya, oleh karena itu perlu diciptakan kerjasama yang setara untuk melengkapi kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

4. *Teori Enlightenment*

Teori ini didasari pada argumentasi dari John Locke (1672-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang menyatakan bahwa “budaya patriarchal dan status yang bersifat askriptis harus dihilangkan dari dalam tampuk pemerintahan dan hubungan sosial. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan sifatnya sejajar, memiliki hak dan kewajiban yang sama”. Teori ini mengalami perkembangan cukup cepat, namun memiliki beberapa kelemahan, yakni:

- ❖ Tidak memberikan perubahan historis antara perkembangan laki-laki dan perempuan, seperti misalnya perubahan kondisi ekonomi dan politik yang mempengaruhi status laki-laki dan perempuan.
- ❖ Teori ini tidak memberikan gambaran faktor-faktor apa yang dapat mengubah peranan dan status perempuan.

- ❖ Tidak mempertimbangkan keragaman faktor budaya yang sering memposisikan perempuan pada status yang lebih rendah atau yang mendudukan perempuan pada “singgasana emas”.

5. Teori Struktural-Fungsional

Subordinasi perempuan bukan saja dikategorikan sebagai gejala kultural, namun juga merupakan faktor struktural. Pandangan ini didasarkan pada beberapa anggapan bahwa ruang gerak perempuan hanya sebatas urusan domestik dan mengurangi tingkat partisipasi dalam lingkup publik, maka status dan martabat perempuan juga ikut ditentukan oleh anggapan yang berkembang hingga saat ini.

6. Teori Konflik

Dasar teori ini adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan didasarkan pada aspek kekuasaan (*Power*) dan kepentingan (*interest*). Namun sebagian besar kalangan ‘modern feminist’ beranggapan bahwa kekuasaan tidak dapat dipertahankan tanpa disertai perjuangan. Oleh karena itu, usaha dari gerakan ini adalah untuk memperoleh hak dan perluasan kekuasaan untuk perempuan dalam kegiatan pemerintahan dan sektor lainnya yang selama ini didominasi oleh laki-laki (KNPPRI, 2008).

2.6 Kesetaraan Gender

Istilah kesetaraan gender dalam tataran praktis, hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut memang dapat membangkitkan emosi, kekesalan, dan memicu rasa simpati yang besar kepada kaum perempuan. Oleh karena, banyak bermunculan program atau

kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam segi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik (Sangian, 2008).

Kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan hankamnas dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian kesetaraan gender adalah penilaian atau penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki serta pelbagai peran mereka (Parawansa, 2006).

Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Sejak dulu banyak mitos-mitos yang menjadi penyebab ketidakadilan gender, misalnya laki-laki selalu dianggap bertindak berdasarkan rasional, sedangkan kaum perempuan selalu mendahulukan perasaan. Misalnya perempuan itu sebagai *swarga nunut neraka katut*, perempuan itu sebagai *kanca wingking* (teman di belakang) berfungsi 3 M (masak, macak, manak). Kebanyakan mitos-mitos yang muncul di masyarakat akan menguntungkan kaum lelaki dan mendiskreditkan kaum perempuan. Semua contoh-contoh tersebut sebenarnya disebabkan karena negara Indonesia menganut hukum hegemoni patriarki, yaitu yang berkuasa dalam keluarga adalah bapak. Selain hukum hegemoni patriarki, ketidakseimbangan gender juga disebabkan karena sistem kapitalis yang berlaku, yaitu siapa yang mempunyai modal besar itulah yang menang. Hal ini mengakibatkan laki-laki yang dilambangkan lebih kuat daripada perempuan akan mempunyai peran dan fungsi yang lebih besar.

Ketidakadilan gender tidaklah hanya dalam penguasaan sumberdaya alam dan pembagian kerja yang tidak seimbang. Lebih dari itu ketidakadilan gender muncul dalam bentuk lain. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender itu antara lain:

a. Marginalisasi (peminggiran)

Peminggiran disini lebih kepada persoalan peminggiran ekonomi. Banyak bentuk peminggiran ekonomi perempuan, salah satu yang paling nyata adalah lemahnya kesempatan perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi seperti tanah, kredit, dan pasar. Perempuan sering ditinggalkan dalam upaya-upaya pengembangan ekonomi karena anggapan bahwa tugasnya adalah di rumah.

Peminggiran perempuan, salah satunya berakar pada minimnya kontrol perempuan terhadap tanah, dan segala isinya, baik itu tanaman, maupun hewan. Selain itu posisi perempuan yang dianggap tidak menanggung beban ekonomi keluarga ditambah cap-cap tradisional yang belum tentu benar menyebabkan perempuan mendapatkan upah lebih rendah saat bekerja sebagai pekerja upahan.

b. Subordinasi (penomorduaan)

Subordinasi terhadap perempuan bermakna pada perempuan tidak memiliki peluang untuk mengambil keputusan bahkan yang menyangkut dirinya. Dibanyak masyarakat, perempuan dianggap terlalu lemah untuk memimpin satu kelompok masyarakat, atau memerintah suatu negara. Karena itu pula, perempuan dihambat bahkan dilarang masuk ke dalam sendi-sendi politik masyarakat.

Menurut Handayani dan Sugiharti (2008), perempuan diidentikkan dengan jenis-jenis pekerjaan tertentu. Diskriminasi yang diderita oleh kaum perempuan pada sektor pekerjaan, misalnya prosentase jumlah pekerja

perempuan, penggajian, pemberian fasilitas, serta beberapa hak-hak perempuan yang berkaitan dengan kodratnya yang belum terpenuhi. Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol adalah bahwa semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang dikuasai kaum lelaki.

c. Beban kerja berlebih

Dalam satu masyarakat pembagian peran dibagi menjadi produktif, reproduktif, memelihara masyarakat, dan politik masyarakat. Perempuan umumnya memiliki tiga peran (*triple role*), yaitu produktif, reproduktif, dan memelihara masyarakat yang lebih dominan. Dari sini terlihat bahwa perempuan menanggung dua jenis pekerjaan yang berat, reproduktif dan produktif, sementara laki-laki hanya produktif, dan sedikit reproduktif. Akibat beban kerja yang berlebihan ini, perempuan tidak memiliki waktu untuk membicarakan hal-hal di luar rutinitasnya seperti membaca koran, mendengarkan informasi, atau hadir dalam pertemuan-pertemuan masyarakat. Bahkan untuk merawat dirinya pun perempuan seringkali tidak sempat.

d. Cap-cap negatif (*stereotip*)

Perempuan sering digambarkan pada bentuk-bentuk yang belum tentu benar. Perempuan sering digambarkan emosional, lemah, tidak mampu memimpin, tidak rasional, sering dilontarkan dari kecil hingga dewasa. Padahal laki-laki pun bisa berperilaku emosional dan irasional. Tetapi pendapat ini sering dipertahankan dalam masyarakat, sehingga menutup kesempatan perempuan diberbagai bidang baik ekonomi, politik, maupun budaya. Cap-cap negatif berhubungan dengan keempat jenis ketidakadilan gender lainnya. Pada saat pertemuan, meski seorang perempuan memiliki pendidikan yang cukup tinggi

seringkali pendapatnya diabaikan oleh laki-laki. Pendapat laki-laki dianggap lebih penting dibandingkan perempuan.

e. Kekerasan

Di dalam masyarakat kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang kompleks, terjadi karena sebuah konstruksi sosial dan sering kali dibudayakan dalam masyarakat. Perempuan menjadi rentan terhadap tindak kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan (keluarga) baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun emosional (Simatauw dkk, 2001).

Jika diperhatikan bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan kekerasan yang disebabkan adanya keyakinan gender. Bentuk kekerasan ini tidak selalu terjadi antara laki-laki terhadap perempuan akan tetapi antara perempuan dengan perempuan atau bahkan antara perempuan dan laki-laki (Handayani dan Sugiharti, 2008).

Pada konflik sumberdaya alam kekerasan terhadap perempuan seringkali meningkat baik itu yang dilakukan oleh aparat negara (militer, dan sipil) serta pihak-pihak investor maupun juga terjadi di ruang-ruang keluarga, oleh suami, tetangga, atau saudara. Pihak-pihak yang saling bertikai sering memanfaatkan perempuan yang posisinya sudah lemah dalam masyarakat sebagai alat tawar-menawar. Perempuan juga seringkali dijadikan objek kekerasan oleh pihak penyerang (investor-negara-militer) untuk melemahkan perlawanan rakyat yang tidak setuju memberikan wilayahnya (Simatauw dkk, 2001).

Manifestasi ketidakadilan gender tersosialisasikan kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantab, yang mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan

kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara umum. Usaha yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender nampaknya bukan hanya sekedar bersifat individual, namun harus secara bersama dan bersifat institusional, utamanya dari pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dan memegang peran dalam proses pembentukan gender. Untuk itu peranan pembuat kebijakan dan perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menentukan arah perubahan menuju kesetaraan gender atau dapat dikatakan bahwa negara/ pemerintah mempunyai peran atau andil dalam mewujudkan keseimbangan gender (Handayani dan Sugiharti, 2008).

2.7 Perempuan Dalam Pandangan Islam

“ Wanita dan pria diciptakan oleh Allah sebagai mitra yang diberi tanggung jawab untuk melestarikan jenis manusia dan memelihara kehidupan. Keduanya juga diberi tanggung jawab untuk mengelola alam semesta beserta seluruh isinya (Al-Baqarah :30). Dari ayat tersebut sudah disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola alam semesta beserta isinya. Disini tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan semua sejajar.

Lelaki dan perempuan keduanya berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam masyarakat. Tentu saja, situasi ini harus sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Ini berarti bahwa kita dituntut untuk mengetahui keistimewaan dan kekurangan masing-masing, serta perbedaan-perbedaan antar keduanya. Tanpa mengetahui hal-hal tersebut, orang bisa mempersalahkan dan menzalimi banyak pihak.

Rasul Muhammad SAW bersabda *“Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, lelaki (suami) adalah pemimpin di rumah tangganya, perempuan (istri) adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Semua kamu adalah pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya”* (HR.Bukhari dan Muslim melalui

Abdullah Ibnu Umar ra). Dari ayat tersebut perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sehingga dapat memengaruhi lelaki dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan ilmiah. Di sisi lain, kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas dalam upaya memengaruhi lelaki agar mengakui hak-haknya yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka, serta membendung setiap upaya dari siapapun lelaki atau perempuan, kelompok kecil atau besar yang bertujuan mengarahkan mereka ke arah yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya (Shihab, 2005).

Dari perspektif Islam, secara teologis tidak ada satupun ayat maupun hadis yang membenarkan menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan dan penindasan. Dalam penciptaannya, Tuhan menjadikan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan kapasitas, potensi dan peluang yang sama dalam menerima mandat untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Tuhannya. Manusia diberi akal budi yang membedakannya dengan makhluk yang lain, menerima mandat yang sama menjadi representasi (*khalifah*) Tuhan di muka bumi. Dalam hal ini, manusia diperintahkan untuk berlaku adil baik sebagai pemimpin maupun sebagai orang yang dipimpin. Dalam relasi sosial, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bersikap egaliter kepada siapapun, tidak membeda-bedakan manusia karena jenis kelaminnya maupun kedudukan sosialnya. Bahkan kita diperintahkan Tuhan untuk saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong di kala suka maupun duka dengan sesama manusia, tanpa membedakan jenis kelamin dan dari manapun asalnya. Namun realitas yang dihadapi perempuan baik sebagai individu maupun sebagai warga negara seringkali tidak berdaya dan jauh dari konsepsi yang dikehendaki Tuhan. Ironisnya konstruksi sosial yang mendasarkan nilai-nilainya pada

pemikiran keagamaanpun tanpa disadari turut melanggengkan konstruksi sosial yang patriarkhis dan opresif terhadap perempuan (Ulfa, 2010).

Dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadist shahih, kita menemukan betapa perempuan dan lelaki harus dapat bekerja sama dalam membangun masyarakat sejahtera. Sehingga tidak ada diskriminasi terhadap kaum perempuan untuk berperan di ranah publik. Perempuan tidak harus selalu berperan di ranah rumah tangga (domestik) saja. Sehingga perempuan bisa mengembangkan dan mengamalkan kemampuannya kepada lingkungan masyarakat sekitarnya, salah satunya ikut berperan serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Muslihati (2004), selain hidup di dunia domestik, kita juga tidak bisa menafikan bahwa wanita adalah anggota masyarakat. Karena posisinya sebagai anggota masyarakat inilah, maka keterlibatannya dalam kehidupan umum (publik) juga diperlukan dalam rangka memajukan masyarakat. Dalam kaitan ini, tugas pokok wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang sering disebut sebagai peran domestik tidak berarti membatasi wanita pada peran pokok itu saja. Karena pada saat yang sama, wanita juga diseru untuk dapat berperan di sektor publik. Serua Allah dalam hal aktivitas perempuan di dunia publik secara umum mempunyai implikasi pada hukum yang berkaitan dengan wanita dalam kedudukannya sebagai individu manusia. Islam menetapkan hukum yang sama antara pria dan wanita dalam masalah kewajiban berdakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*), kewajiban menuntut ilmu, serta kewajiban menunaikan ibadah-ibadah ritual (*mahdhah*).

2.8 Kedudukan Laki-laki dan Perempuan Dalam Pembangunan

Pada dasarnya hakekat pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya, tanpa membedakan suku bangsa, agama, dan jenis kelamin. Namun hasil

pembangunan yang diukur berdasarkan indikator pembangunan manusia sebagai mana terdapat dalam "Human Development Report 2004 menunjukkan, bahwa nilai Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Indeks = GDI*) yang mengatur angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah *Gender Development Program (GDP)* riil per balita antara laki-laki dan perempuan-Indonesia menduduki ke 111 dari 117 negara. Kondisi ini jauh lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kerja pembangunan yang dilaksanakan selama ini dan dampak yang ditimbulkan karena krisis multidimensional sejak 1997 terutama terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi politik dan hukum masih menunjukkan kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki, baik dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan melakukan kontrol maupun penguasaan atas hak dan tanggung jawabnya terhadap penggunaan sumber daya pembangunan maupun dalam menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal yang paling mendasar menjadi penyebab terjadinya berbagai kesenjangan dan ketidakadilan gender tersebut diatas, antara lain masih rendahnya pemahaman gender yang tidak hanya dikalangan masyarakat diberbagai lapisan, tapi justru pada tingkat pengambil keputusan diberbagai lembaga pemerintahan dan pelayanan publik (Lestari, dkk, 2008).

Secara *de jure* pengakuan akan pentingnya perempuan dalam pembangunan telah tersurat secara jelas dalam GBHN 1993, 2000. Namun pada kenyataannya perempuan berkecenderungan dijadikan objek dalam program pembangunan. Perempuan belum dapat berperan secara maksimal baik sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan. Hal ini disebabkan pemahaman tentang perempuan hanya sebatas peran domestik (*privat*) sehingga kurang diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Selain itu terdapat perbedaan dalam mengakses sumber daya hasil

pembangunan antara laki-laki dengan perempuan menyebabkan perempuan semakin terpinggirkan dan tidak menikmati hasil pembangunan (Handayani dan Sugiharti, 2008).

Di dalam GBHN 1993 diantaranya juga diamanatkan, bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam pembangunan. Selain itu, pengambil keputusan juga telah meratifikasi (mengesahkan) konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam UU No. 7 Tahun 1984. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa wanita mengalami ketertinggalan atau ketidakberuntungan lebih banyak dibandingkan dengan pria diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam hal persamaan kedudukan, baik pria maupun wanita sama-sama berkedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Dalam kedudukan sebagai subjek pembangunan, pria dan wanita mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan. Hak yang sama di bidang pendidikan misalnya, anak pria dan wanita mempunyai hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan formal tertentu. Tentu tidaklah adil jika dalam era global ini memondokkan pendidikan bagi wanita, apalagi jika anak wanita mempunyai kecerdasan atau kemampuan. Selanjutnya, kewajiban yang sama umpamanya seorang istri sama-sama berkewajiban untuk mencari nafkah dengan suaminya dalam upaya memenuhi beragam kebutuhan rumah tangga. Mencari nafkah tidak lagi hanya menjadi kewajiban suami (pria), begitu juga kewajiban melakukan pekerjaan urusan rumah tangga tidak

semata-mata menjadi tugas istri (wanita). Akhirnya berkaitan dengan persamaan kesempatan dapat diambil contoh, apabila ada dua orang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi, yakni seorang pria dan seorang wanita yang sama-sama memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan yang sama, keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan sebagai Kepala Biro. Wanita tidak dapat dinomorduakan semata-mata karena dia seorang wanita. Pandangan bahwa pemimpin itu harus seorang pria merupakan pandangan yang keliru dan perlu ditinggalkan (Sudarta,2010).

2.9 Konsep Women In Development (WID), Woman And Development (WAD), Gender And Development (GAD)

Women In Development (WID)

Menurut Bradley 2006, perempuan dalam pembangunan (WID – *women in development*) muncul dari Dekade Perempuan PBB dengan harapan perempuan bisa terikutkan dalam pembangunan. WID adalah produk gerakan feminis liberal Amerika Serikat yang mengadvokasi perubahan pemerintahan dan hukum untuk mencapai integrasi penuh seluruh perempuan ke dalam ekonomi.

Intinya para pendukung pendekatan WID berargumen perempuan diabaikan dan tereksklusi dari program pembangunan. Pendekatan WID yakin pembangunan tidak akan terjadi jika perempuan tidak dimasukkan ke dalam proses pembangunan. Pendekatan ini bertentangan dengan penganut modernis yang percaya manfaat dari pembangunan akan menetes pada perempuan.

Pendekatan WID memperjuangkan penerapan proyek pembangunan terpisah atau terintegrasi bagi perempuan. WID yakin perempuan memiliki waktu untuk melaksanakan proyek ini. Proyek terpisah hanya untuk perempuan menjadi solusi mengatasi marginalisasi perempuan. WID berasumsi jika perempuan mendapatkan

akses pada sumber daya, seperti kredit, pelatihan, kegiatan peningkatan penghasilan, mereka mampu meningkatkan posisi sehingga sejajar dengan laki-laki.

Sepertinya WID mengkategorikan perempuan sebagai entitas terpisah dan homogen. Padahal pada kenyataannya, perempuan adalah kelompok-kelompok yang berbeda-beda dalam kelas, suku, sejarah, dan budaya. Pendekatan WID tidak mempersoalkan struktur yang ada dan dampak pada kesetaraan gender. WID tidak mencoba meneliti akar penyebab subordinasi perempuan dan mengapa perempuan ditekan.

Perempuan dari negara berkembang mempertanyakan ideologi kaum feminis Barat (yaitu semua perempuan mengalami tekanan dan marginalisasi yang sama) tanpa mempertimbangkan aspek budaya dan faktor lainnya. Perempuan Selatan juga mengkritik visi hegemoni dari agenda kaum feminis Barat dan bagaimana perempuan dari negara dunia ketiga dikonstruksi dan direpresentasikan oleh para ilmuwan feminis Utara.

WID gagal membawa perubahan struktural jangka panjang. Kegagalan ini membawa pada kebutuhan sebuah pendekatan yang segar untuk memformulasikan dan mengimplementasikan proyek-proyek perempuan (www.demas.web. 2010).

Pendekatan WID berpijak dari dua sasaran , yaitu:

- a. Pentingnya prinsip egalitarian. Prinsip egalitarian adalah kepercayaan bahwa semua orang sederajat. *Egalitarianisme* adalah doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia ditakdirkan sama sederajat. Diartikan pula bahwa egalitarian merupakan asas pendirian yang menganggap bahwa kelas-kelas sosial yang berbeda mempunyai bermacam-macam anggota dalam proporsi yang relatif sama. Oleh karena itu dalam WID antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar.

- b. WID menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi atau menghapuskan diskriminasi yang dialami oleh para perempuan di sektor produksi. Seperti yang telah disebutkan terdahulu bahwa sektor produktif identik dengan sektor publik dan ini banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Selain itu masih kuatnya anggapan bahwa peran-peran produktif hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan perempuan kurang dilibatkan, bahkan tidak diberi peran samasekali, karena kedudukan perempuan ada pada sektor domestik, bukan produktif.

WID menyediakan program intervensi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan, keterampilan “serta” kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Pendekatan WID lebih mengarahkan pada upaya-upaya terhadap peranan perempuan agar lebih dapat terintegrasikan dalam pembangunan, artinya melibatkan perempuan dalam proses pembangunan. Secara konkret WID menekankan pada cara atau strategi yang perlu ditempuh untuk membela kaum perempuan agar mendapat kesempatan untuk berpartisipasi yang sama dengan laki-laki dalam pemerolehan kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan beberapa aspek kehidupan bermasyarakat yang lain.

Program-program yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan pendekatan WID adalah program-program yang dapat menghasilkan pendapatan bagi perempuan. Untuk itu implikasinya dengan pemberian kesempatan belajar dalam jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi akan lebih memberikan kemampuan intelektual dan keterampilan bagi perempuan. Diharapkan melalui pendidikan keterampilan akan memberikan nilai tambah bagi perempuan dalam mencari penghasilan atau menambah pendapatan keluarga. Program yang lain antara

lain pemberian fasilitas kesejahteraan sosial seperti pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi perempuan (Handayani dan Sugiarti, 2008).

Karakteristik dari pendekatan WID adalah :

- Adanya divisi khusus perempuan dalam struktur lembaga pemerintahan.
- Menyatukan perempuan dan laki-laki dalam program pembangunan termasuk dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
- Meningkatkan sebanyak mungkin jumlah perempuan dalam bidang-bidang yang dikuasai oleh laki-laki.

Kelemahan dari pendekatan ini diantaranya adalah:

- Pendekatan ini tidak berhasil meningkatkan keberdayaan ekonomi dan sosial perempuan.
- Agenda perempuan tetap terpinggir ditengah kebijakan dan prioritas utama pembangunan terutama di tingkat perencanaan (KNPPRI, 2008).

Women And Development (WAD)

Keterbatasan WID memunculkan pendekatan WAD (*women and development*).

Para pendukung pendekatan WAD terutama para aktivis dan teoris dari Selatan dan sedikit sekali dari Utara. Mereka mendapati keterbatasan WID dan berpendapat perempuan tidak akan pernah mendapatkan bagian dari manfaat pembangunan yang adil merata kecuali persoalan patriarkhi dan ketidaksamaan global bisa diatasi. Pendekatan WAD menawarkan pandangan lebih kritis mengenai posisi perempuan daripada WID.

Pendekatan WAD berargumen pendekatan pembangunan yang dominan tidak memiliki perspektif perempuan dan perspektif negara berkembang. Mereka melihat mengatasi kemiskinan dan dampak kolonialisme juga penting untuk mempromosikan persamaan gender dalam proses pembangunan.

Pada prakteknya WAD menghadapi persoalan serupa seperti yang dihadapi WID. Faktor umur, suku dan etnisitas semuanya mempengaruhi akses perempuan pada proses pembangunan dan hal ini berbeda dari satu perempuan dengan perempuan lainnya. WAD menawarkan perspektif global subordinasi perempuan yaitu posisi inferior perempuan yang universal di sistem internasional menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan gender. Keduanya gagal menyadari kompleksitas hubungan gender dan lebih jauh bagaimana gender melekat di dalam hubungan hegemoni kekuasaan (www.demas.web. 2010).

Kata penghubung 'dan' menunjukkan pada pengertian kesejajaran antara kata 'perempuan' dan 'pembangunan'. Kalau pendekatan WID menekankan terintegrasikannya perempuan dalam pembangunan, maka WAD lebih mengarah pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan.

Dalam pendekatan WAD tidak dibahas letak kedudukan laki-laki dan perempuan. Masalahnya sekarang bagaimana posisi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Pendekatan WAD tampaknya lebih kritis daripada WID.

Implementasi pendekatan WAD dititikberatkan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan. Implementasinya lebih pada ukuran produktivitas perempuan baik secara kesempatan maupun yang dimiliki (Handayani dan Sugiarti, 2008).

Gender And Development (GAD)

Selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan ditandai oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses mereka terhadap sumberdaya ekonomi, seperti

teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. Meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penghasilan dan kesejahteraan keluarganya, perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga. Kesemuanya ini berdampak pada masih rendahnya partisipasi, akses, dan kontrol yang dimiliki, serta manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan.

Pada tahun 1980-an muncul pendekatan GAD (*gender and development*) sebagai alternatif dari WID dan WAD. GAD diharapkan bisa menjadi jawaban persoalan teoritis yang dihadapi pendekatan WID dan WAD. GAD mengakui pentingnya konstruksi sosial dari produksi dan reproduksi bagi peran dan tugas di masyarakat yang diserahkan pada perempuan. GAD bertujuan mencari mengapa perempuan mendapat peran kelas dua di banyak masyarakat dan GAD mengadopsi pendekatan holistik untuk proyek kerjanya. Subordinasi pada perempuan terjadi di ruang privat di mana perempuan di bawah kendali ayah atau suami mereka. GAD beranggapan dengan meningkatkan akses perempuan pada layanan publik bisa mengatasi persoalan subordinasi ini. Tujuan GAD adalah menolong perempuan mengorganisasi diri di dalam perilaku efektif secara politik agar mereka bisa mengatasi struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menghambat dan membatasi hidup mereka. Tujuan akhir GAD adalah mencapai pergeseran hubungan kekuasaan yang akan memberikan perempuan otonomi lebih besar.

Pendekatan GAD mengangkat nilai peran reproduksi perempuan (melahirkan dan merawat), kerja berbayar dan kerja tak berbayar (ibu rumah tangga) yang memberikan manfaat pada rumah tangga maupun industri. Dan yang penting GAD mempertimbangan aspek umur, kelas, status perkawinan, suku, etnisitas, dan agama, GAD tidak melihat perempuan adalah semuanya sama (www.demas.web. 2010).

Pendekatan GAD lebih menekankan bagaimana hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan. Pendekatan GAD menitikberatkan analisisnya pada jawaban atas pertanyaan : mengapa perempuan ditempatkan pada peran-peran yang inferior di masyarakat? Untuk menjawabnya perlu pendekatan holistik atau menyeluruh tentang aspek-aspek kehidupan manusia. Untuk dapat mengetahui posisi perempuan dalam masyarakat perlu ditinjau kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pendekatan holistik dipakai untuk memahami posisi perempuan dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya dalam proses pembangunan.

Dalam pendekatan GAD, posisi perempuan diletakkan dalam konstruksi sosial gender serta pemberian peran tertentu pada perempuan maupun laki-laki. Laki-laki berperan atau terlibat dalam penempatan posisi perempuan. Laki-laki turut berperan serta dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Oleh karena itu dalam pendekatan GAD, perempuan berada dalam posisi "*agent of change*" atau berperan aktif sebagai agen perubahan., tidak hanya sekedar sebagai objek pembangunan atau penerima program pembangunan secara pasif. Karena itu program pembangunan memfokuskan pada relasi gender, ketimbang memfokuskan pada kaum perempuan saja. Dengan demikian agenda GAD tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan praktis, untuk mengubah kondisi kaum perempuan, melainkan juga menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yakni memperjuangkan perubahan posisi kaum perempuan, termasuk konter hegemoni dan konter *discourse* terhadap ideologi gender yang mengakar dalam keyakinan baik kaum perempuan maupun kaum lelaki.

Pendekatan GAD secara implementatif cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan struktural. Oleh sebab itulah pelaksanaan GAD memerlukan dukungan sosio budaya masyarakat dalam politik nasional yang mmenempatkan

perempuan sejajar dengan laki-laki. GAD tidak mungkin terlaksana bila dalam politik suatu negara masih menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior dan subordinatif (Handayani dan Sugiarti, 2008).

Karakteristik dari pendekatan GAD ini adalah:

- Analisa gender dilakukan untuk melihat kondisi perempuan dan laki-laki yang memiliki peran dan posisi yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan gender yang berbeda.
- Perempuan diposisikan sebagai subyek dan obyek dalam proses pembangunan yang senantiasa mengedepankan proses *bottom up* ketimbang *top down* (KNPPRI, 2008).



PERBEDAAN ANTARA WID DAN GAD

Tabel 1. Perbedaan antara WID dan GAD

Aspek	Women In Development (WID)	Gender And Development (GAD)
Pendekatan	Pandangan bahwa yang menjadi sumber permasalahan ada pada perempuan	Pandangan yang menganggap bahwa sumber permasalahan ada pada pembangunan
Fokus	Perempuan	Pola relasi laki-laki perempuan
Masalah	Tidak berperan sertanya perempuan (separuh sumber daya produktif) dalam proses pembangunan	Ketidaksejajaran hubungan kekuasaan (kaya-miskin, lelaki-perempuan) menyebabkan berlangsungnya pembangunan yang tidak adil dan tidak berperan sertanya perempuan secara maksimal
Tujuan	Pembangunan yang lebih efektif dan efisien	Pembangunan yang adil dan berkesinambungan dengan lelaki dan perempuan sebagai pengambil keputusan
Pemecahan	Mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan	Memperkuat perempuan yang terpinggir/ marginal Mengubah pola-pola hubungan – hubungan yang tidak sejajar
Strategi	Kegiatan proyek khusus untuk perempuan Proyek-proyek terpadu Meningkatkan produktivitas perempuan Meningkatkan pendapatan perempuan Meningkatkan keterampilan perempuan dengan mengurus rumah tangga	Mengidentifikasi kebutuhan praktis sebagaimana diidentifikasi oleh perempuan dan lelaki untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka Bersamaan dengan itu, ditangani juga kebutuhan strategis perempuan Menangani kebutuhan strategis golongan ekonomi lemah melalui pembangunan untuk rakyat

Sumber: Handayani dan Sugiharti, 2008

PERBEDAAN KEBUTUHAN PRAKTIS GENDER DAN STRATEGIS GENDER

Tabel 2. Perbedaan Kebutuhan Praktis Gender dan Strategis Gender

Kebutuhan praktis gender	Kebutuhan strategis gender
Berkaitan dengan perbaikan kondisi hidup individu	Berkaitan dengan perbaikan posisi perempuan di masyarakat
Bentuk program jangka pendek dan langsung	Bentuk program jangka panjang
Sasaran program spesifik	Sasaran program lelaki dan perempuan
Dampak program terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari : gizi, kesehatan, perumahan, sanitasi, air minum	Dampak kegiatan terkait dengan : Penggubahan status gender (perempuan) Peningkatan akses dan kontrol terhadap sumberdaya Kesamaan hak dalam pendidikan Memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan Penghapusan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin
Penggubahan kehidupan melalui : Pemenuhan kebutuhan dasar (pokok) Hasilnya terlihat langsung	Penggubahan hak Perbaikan ketidakseimbangan Memaksimalkan potensi-potensi Hasilnya tidak selalu terlihat secara langsung
Dapat dengan penyediaan input-input tertentu seperti: Makanan Pompa air tangan Pelayanan kesehatan Alat-alat reproduksi	Dapat dipenuhi melalui : Perbaikan kesadaran potensi-potensi Peningkatan kepercayaan diri Pendidikan Perkuatan organisasi perempuan Mobilisasi politik
Cenderung mengikutsertakan lelaki dan perempuan sebagai penerima manfaat dan kadang-kadang diikutsertakan secara aktif	Mengikutsertakan lelaki dan perempuan sebagai penggerak kegiatan dan memberi peluang perempuan untuk menjadi penggerak
Pada umumnya tidak mengubah peran tradisional atau hubungan antar jenis kelamin (gender)	Memberdayakan lelaki dan perempuan sebagai menumbuhkan keseimbangan hubungan diantara mereka

Sumber: Handayani dan Sugiharti, 2008

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Menurut Narbuko (2008), penelitian adalah usaha-usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, dimana dalam usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah adalah penggunaan proses berpikir deduktif-induktif untuk memecahkan masalah. Jadi dalam penelitian orang mesti menggunakan proses deduktif-induktif untuk membangun ilmu pengetahuan.

Sedangkan menurut Sugito (1995), penelitian adalah usaha manusia secara sadar dan terencana dengan penahapan proses secara sistematis, untuk :

- (1) Memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan -pertanyaan praktis di lapangan (melalui teknologi baru), atau
- (2) Menambah khasanah ilmu pengetahuan, baik berupa penemuan teori baru atau penyempurnaan teori yang sudah ada.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Narbuko (2008), penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif

banyak membantu terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetik dan klinis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

Metodologi kualitatif mengacu pada strategi penelitian, seperti observasi, partisipan, wawancara mendalam, partisipan total ke dalam aktivitas mereka yang diselidiki, kerja lapangan dan sebagainya, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi tangan pertama mengenai masalah sosial empiris yang hendak dipecahkan. Metodologi kualitatif memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri, dan bukannya dari teknik-teknik yang dikonsepsikan sebelumnya, tersusun secara kaku, dan dikuantifikasi secara tinggi yang memasukkan saja dunia sosial empiris ke dalam definisi operasional yang telah disusun peneliti (Filstead, 1970:6 dalam Chadwick, 1991).

Menurut Bogdan dan Taylor 1975:5 dalam Moleong (2007), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau, organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller 1986:9 dalam Moleong (2007), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan Denzin dan Lincoln 1987 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Terakhir, menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut dapatlah disintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007).

Pemilihan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini disebabkan dalam penelitian yang berjudul “ **Kajian Tentang Wanita Dan Pembangunan Pesisir (Studi Kasus : Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Probolinggo)**” akan berusaha menuturkan permasalahan yang ada dalam pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Probolinggo khususnya tentang partisipasi dari kaum perempuan. Yang nantinya hasil penelitian tersebut bisa digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang ada. Pencarian data-data dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi, wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Probolinggo. Dimana hal tersebut sesuai dengan konsep dari teori penelitian kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Probolinggo yang terletak di Desa Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Subyek dari penelitian adalah *stakeholder-stakeholder* yang terkait dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Probolinggo. *Stakeholder* tersebut antara lain Dinas

Perikanan Dan Kelautan (DPK) Propinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Probolinggo, nelayan Mayangan. Jadwal penelitian secara terperinci sebagai berikut:

Tabel 3. Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Maret (minggu ke)				April (minggu ke)				Mei (minggu ke)				Juni (minggu ke)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																
2	Pelaksanaan Penelitian																
	- pengumpulan data primer																
	- pengumpulan data sekunder																
	- pengolahan data																
3	Penyusunan Laporan																

3.3 Populasi

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi (Usman dan Purnomo, 2008).

Tetapi menurut Sugiyono (2008), dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas

(*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa atau wilayah suatu negara. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Tetapi sebenarnya obyek penelitian kualitatif, juga bukan semata-mata pada situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen tersebut, tetapi juga bisa berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan dan sejenisnya.

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, media, dan sebagainya (Iqbal, 2002).

Menurut Narbuko dan Achmadi (2008), dalam hubungan populasi dan sampel Prof. Sutrisno Hadi, MA, menjelaskan bahwa sampel atau contoh (*monster*) adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian. Supaya lebih obyektif istilah individu sebaiknya diganti istilah subyek dan atau obyek.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah masyarakat dan *stakeholder – stakeholder* yang terkait dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo. Masyarakat yang dimaksud disini adalah laki-laki dan perempuan yang berada dan menggunakan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Probolinggo. Seperti penjual ikan di pelabuhan, nelayan, istri nelayan, pengolah ikan. Sedangkan subyek yang diteliti adalah *stakeholder-stakeholder* (laki-laki dan perempuan) yang terkait dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Probolinggo. *Stakeholder* tersebut antara lain Dinas Perikanan Dan Kelautan (DPK) Propinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo dalam hal ini Bapeda Kota Probolinggo, masyarakat nelayan Mayangan laki-laki dan perempuan.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Pada dasarnya teknik sampling dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu **Probability Sampling** dan **Nonprobability Sampling**. *Probability Sampling* meliputi, *simple random*, *proportionate stratified random*, *disproportionate stratified random*, dan *area random*. *Nonprobability sampling* meliputi, *sampling sistematis*, *sampling kuota*, *sampling aksidental*, *purposive sampling*, *sampling jenuh*, dan *snowball sampling*.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini sampel atau masyarakat yang menjadi responden adalah masyarakat laki-laki dan perempuan yang beraktivitas di PPP Mayangan, antara lain penjual ikan, nelayan, pengolah. Responden laki-laki berjumlah 12 orang yang terdiri dari nelayan (juragan darat dan ABK), dan penjual ikan. Sedangkan responden perempuan berjumlah 17 orang yang terdiri dari juragan ikan, penjual ikan, istri nelayan, pemilik pengolahan.

Penetapan jumlah responden tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dihasilkan, karena di dalam penelitian kualitatif jika data hasil wawancara sudah mencapai 'titik jenuh' maksudnya jawaban yang diungkapkan oleh responden sudah seragam, maka peneliti bisa menghentikan jumlah dari responden yang akan diwawancarai.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data yang digunakan antara lain:

1. Metode Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko, 2008). Menurut Sutrisno Hadi 1986 dalam Sugiyono (2008), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.

Dalam penelitian ini menggunakan observasi jenis *non participant observation*. Hal ini karena dalam observasi partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat yang menjadi obyek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati semua aktivitas yang ada di PPP Mayangan. Selain itu peneliti juga mengamati aktivitas dari masyarakat sekitar PPP Mayangan. Sehingga dari pengamatan tersebut bisa diketahui kebiasaan dari masyarakat sekitar PPP Mayangan.

2. Metode Interview (wawancara)

Cannell dan Kahn 1968:527-528 dalam Chadwick (1991), mendefinisikan wawancara riset sebagai “percakapan dua orang, yang dimulai oleh pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian, dan dipusatkan olehnya pada isi yang dititikberatkan pada

tujuan-tujuan deskripsi, prediksi, dan penjelasan sistematis mengenai penelitian tersebut.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden (Narbuko, 2008).

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain kepada instansi-instansi dan dinas-dinas yang terkait dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Probolinggo, seperti Dinas Perikanan Dan Kelautan (DPK) Propinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo, Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPPP) Mayangan, Bapeda Kota Probolinggo, masyarakat nelayan Mayangan laki-laki dan perempuan.

3. Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain (Iyan Afriani H.S, 2009).

Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang dianalisis berasal dari DPK Propinsi Jawa Timur, DKP Kota Probolinggo, Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPPP) Mayangan, dan Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Probolinggo. Selain dokumen juga ada foto-foto dari DKP Kota Probolinggo yang terkait dengan pembangunan PPP Mayangan.

3.6 Jenis Dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland 1984:47 dalam Moleong (2007), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

a. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

Kata – kata yang digunakan adalah hasil wawancara dari berbagai narasumber. Dimana dalam penelitian ini narasumbernya terdiri dari Dinas Perikanan Dan Kelautan (DPK) Propinsi Jawa Timur , Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo, Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPPP) Mayangan , Bapeda Kota Probolinggo, masyarakat nelayan Mayangan laki-laki dan perempuan.

b. Sumber Tertulis

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Buku, disertasi, karya ilmiah, dan majalah ilmiah sangat berharga bagi peneliti guna menajaki keadaan perseorangan atau masyarakat di tempat penelitian dilakukan. Selain itu, buku penerbitan resmi pemerintah pun dapat merupakan sumber yang sangat berharga.

c. Foto

Saat ini foto sudah banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri (Bogdan dan Biklen, 1982:102 dalam Moleong, 2007).

Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas besar sekali manfaatnya. Foto tidak digunakan secara tunggal untuk menganalisis data, sebaiknya foto digunakan sebagai pelengkap pada cara dan teknik lainnya (Moleong,2007).

Foto – foto yang digunakan untuk menambah informasi dalam penelitian ini adalah foto – foto dari DKP Kota Probolinggo dan foto – foto yang diambil langsung oleh peneliti.

d. Data Statistik

Data statistik yang telah tersedia digunakan peneliti sebagai sumber data tambahan. Data statistik dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Tetapi meskipun demikian, hendaknya peneliti memanfaatkan data statistik itu hanya sebagai cara yang mengantar dan mengarahkannya pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan dan dicari sendiri sesuai dengan masalah dan tujuan penelitiannya (Moleong, 2007).

Menurut Iqbal (2002), berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru.

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah data-data hasil wawancara, kuesioner dan observasi terhadap instansi-instansi dan dinas-dinas yang terkait dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Probolinggo, seperti Dinas Perikanan Dan Kelautan (DPK) Propinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo, Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPPP) Mayangan, Bapeda Kota Probolinggo, masyarakat nelayan Mayangan laki-laki dan perempuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang

telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution 1988 menyatakan “ Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiyono, 2008).

Menurut Bogdan & Biklen 1982 dalam Moleong (2007), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Di pihak lain, analisis data kualitatif Seiddel 1998, prosesnya berjalan sebagai berikut:

- ❖ Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
- ❖ Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya,

- ❖ Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data tersebut mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Selanjutnya menurut Janice McDrury (*Collaborative Group Analysis of Data, 1999*) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

- ❖ Membaca/ mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,
- ❖ Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data,
- ❖ Menuliskan 'model' yang ditemukan,
- ❖ Koding yang telah dilakukan.

Selain menggunakan teknis analisis diatas, karena penelitian ini termasuk dalam penelitian gender, maka dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis gender.

Untuk menjawab tujuan yang pertama yaitu mengetahui dan mempelajari profil gender masyarakat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo, maka teknik analisis yang digunakan adalah Teknis Analisis Harvard.

Salah satu teknik yang telah diakui keampuhannya dalam memberikan gambaran yang lebih sempurna tentang adanya perbedaan maupun saling ketergantungan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, serta adanya perbedaan tingkat manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dari hasil pembangunan adalah teknik analisis gender. Melalui teknis analisis gender berbagai kesenjangan maupun isu gender yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan akan dapat teridentifikasi. Ketidaktahuan mengenai isu gender sangat mempengaruhi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang

berdampak merugikan aspirasi dan kepentingan perempuan. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan teknis analisis gender bagi peneliti dan perencana program/ proyek pembangunan yang selanjutnya harus dipakai sebagai dasar dalam meneliti, merencanakan, dan menyusun program maupun berbagai pemantauan dan evaluasinya program-program pembangunan, sehingga dapat mengintegrasikan semua aspirasi dan kepentingan laki-laki dan perempuan sehingga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat dapat terwujud.

Sebagai suatu alat, analisis gender tidak hanya melihat peran, aktivitas, tetapi juga hubungan, sehingga pertanyaan yang diajukan tidak hanya “ siapa mengerjakan apa”, tetapi juga meliputi : siapa yang membuat keputusan, siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang menggunakan sumberdaya pembangunan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi hubungan tersebut, apakah hukum, ekonomi, atau sosial. Beberapa teknik analisis gender antara lain: Teknis Analisis Harvard, Moser, Longwe, Munro, CVA, Matriks Analisis Gender, Analisis Longframe, Konsep Seaga dan Teknik Participatory Rural Appraisal Berdimensi Gender serta kerangka Analisis GAP dan POP.

Dalam penelitian yang dilakukan ini teknis analisis yang digunakan adalah Teknis Analisis Harvard.

a. Pengertian

Teknik ini sering disebut sebagai Gender Framework Analysis (GFA), yaitu suatu analisis yang digunakan untuk melihat suatu profil gender dari suatu kelompok sosial dan peran gender dalam proyek pembangunan, yang mengutarakan perlunya tiga komponen dan interelasi satu sama lain, yaitu : profil aktivitas, profil akses dan profil kontrol (Handayani dan Sugiharti, 2008).

Kerangka analisis gender Harvard lebih *concern* dengan membuat pembagian kerja gender (*division of labour*), peran dalam pengambilan keputusan, tingkat kontrol atas sumberdaya yang kelihatan. Sebagai konsep dan alat, ini dibutuhkan data detail bagi perencanaan gender. Implikasi perencanaan program terhadap gender perempuan adalah diperlukan analisis yang menutupi bolong (*gaps*) pada level beban kerja, pengambilan keputusan dan sebagainya antara perempuan dan laki-laki.

Dalam profil aktivitas perlu dilihat interaksi antara perempuan dan proyek-proyek pembangunan, untuk mengetahui apa yang dikerjakan perempuan. Beberapa kategori kegiatan yang perlu diperhatikan adalah : produksi barang dan jasa, serta reproduksi dan perawatan sumberdaya manusia. Profil akses dan kontrol didekati dengan mengidentifikasi kegiatan spesifik gender dalam produksi, reproduksi dan perawatan. Arus sumberdaya dan keuntungan (*manfaat*) adalah konsep dasar yang perlu dikaji untuk memahami bagaimana proyek dapat mengakses dan diakses oleh perempuan, dan sejauh mana memberikan manfaat.

Analisis terhadap siklus proyek perlu dilakukan untuk melihat bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan dampaknya terhadap perempuan. Bagaimana tahap-tahap proyek, apa tujuannya, siapa mendapat manfaat, bagaimana dampaknya terhadap aktivitas perempuan, akses dan kontrol atas sumberdaya dan manfaat yang ditimbulkan (Handayani dan Sugiharti, 2008).

b. Kegunaan

Kerangka analisis ini bertujuan untuk mengumpulkan data di tingkat mikro (di tingkat komunitas dan rumah tangga). Selain itu kerangka analisis ini juga bertujuan untuk :

- Menunjukkan bahwa secara ekonomi ada persoalan dalam mengalokasikan sumberdaya bagi perempuan dan laki-laki.
- Membantu para perencana untuk merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh.
- Mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal.
- Memetakan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan (KNPPRI, 2008).

Kerangka ini sangat luwes (mudah diadaptasikan) dan tersusun atas tiga elemen pokok yaitu:

1. Profil aktivitas berdasarkan pada pembagian kerja gender (siapa mengerjakan apa, di dalam rumah tangga dan masyarakat), yang memuat daftar tugas perempuan dan laki-laki (laki-laki melakukan apa?, perempuan melakukan apa?, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan menurut umur, etnis, kelas sosial tertentu, dimana dan kapan tugas-tugas tersebut dilakukan. Aktivitas dikelompokkan menjadi tiga yaitu produktif, reproduktif/ rumah tangga, dan sosial - politik - keagamaan.
2. Profil akses (siapa yang mempunyai akses terhadap sumberdaya produktif termasuk sumberdaya alam seperti tanah, hutan, peralatan, pekerja, kapital atau kredit, pendidikan atau pelatihan), yang memuat

daftar pertanyaan perempuan mempunyai / bisa memperoleh sumberdaya apa? Laki-laki memperoleh apa? Perempuan menikmati apa? Lelaki menikmati apa?.

3. Profil kontrol (perempuan mengambil keputusan atau mengontrol penggunaan sumberdaya apa? Lelaki penentu sumberdaya apa? Sumberdaya disini adalah sumberdaya yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Manfaat apa yang diperoleh dari melakukan aktivitas. Sumberdaya dapat berupa : materi (bernilai ekonomis, politis, sosial, dan waktu), akses terhadap sumberdaya dan manfaat, kontrol atas sumberdaya dan manfaat dikelompokkan menurut gender, faktor-faktor yang berpengaruh menyangkut hal-hal yang mengakibatkan pada adanya pembagian kerja, adanya profil akses dan kontrol suatu masyarakat tersebut (Handayani dan Sugiharti, 2008).

Menurut Modul Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2008), menyebutkan bahwa selain tiga elemen diatas (profil aktivitas, akses, dan kontrol) masih ada dua elemen lagi yaitu:

1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan

Pada komponen ini diidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada masa lalu dan saat ini, serta dapat mengidentifikasi kecenderungan di masa mendatang. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan karena mereka menghadirkan peluang-peluang dan hambatan-hambatan dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proyek-proyek dan program-program pembangunan.

Keseluruhan aspek yang harus diperhatikan untuk mengetahui faktor penyebab dari kesenjangan gender diantaranya adalah:

- Norma-norma komunitas dan hirarki sosial, seperti bentuk-bentuk keluarga/ komunitas, praktek-praktek budaya, kepercayaan-kepercayaan/agama.
- Kondisi demografi
- Struktur-struktur kelembagaan, termasuk sifat birokrasi pemerintah, penyusunan peningkatan dan penyebaran pengetahuan, keterampilan dan teknologi.
- Kondisi ekonomi secara umum, seperti tingkat kemiskinan, angka inflasi, distribusi pendapatan, perdagangan internasional, dan infrastruktur.
- Kejadian-kejadian politik internal dan eksternal.
- Parameter-parameter hukum, pendidikan dan pelatihan.
- Sikap para pekerja LSM dan pendamping komunitas.

2. Analisis Siklus Proyek

Analisis ini akan menguraikan mengenai:

- Kondisi proyek berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan, temuan dari aspek akses, aspek kontrol dari kesenjangan gender yang ada.
- Bagian-bagian proyek yang perlu disesuaikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- Mengidentifikasi masalah, akar masalah, alternatif pemecahan masalah (rancangan program/ kegiatan), implementasi.

c. Aplikasi teknik analisis Harvard

Tabel 4. Aplikasi teknik Analisis Harvard profil aktivitas

A. Aktivitas Produksi	Laki-laki	Perempuan
Perikanan Aktivitas 1 Aktivitas 2, dst Pekerjaan sampingan Aktivitas 1 Aktivitas 2, dst Bekerja diluar Aktivitas 1 Aktivitas 2, dst Lainnya;		
B. Aktivitas Reproduksi		
Terkait dengan air Aktivitas 1 Aktivitas2,dst Terkait dengan bahan bakar Menyiapkan makanan Mengasuh anak Terkait dengan kesehatan Bersih-bersih Terkait dengan pasar lainnya		

Sumber : Handayani dan Sugiharti, 2008

Tabel 5. Aplikasi Analisis Harvard profil Akses dan Kontrol/ Manfaat

A. Sumberdaya	Laki-laki		Perempuan	
	Akses	Kontrol	Akses	Kontrol
Tanah Peralatan Tenaga kerja Uang kas Pendidikan/pelatihan lainnya				
B. Manfaat				
Pendapatan dari luar Pemilikan kekayaan Kebutuhan dasar Pendidikan Kekuatan politik Lainnya				

Sumber : Handayani dan Sugiharti, 2008

Tabel 6. Aplikasi analisis Harvard Faktor-faktor yang berpengaruh

Faktor-faktor	Dampak		Kesempatan		Kendala	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Politik Ekonomi Budaya Pendidikan Lingkungan Hukum Dll.						

Sumber : Handayani dan Sugiharti, 2008

Sedangkan untuk menjawab tujuan yang kedua dan ketiga yaitu mengetahui dan mempelajari konsep pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Probolinggo yang dilakukan selama ini (WID, WAD, atau GAD) dan merumuskan model pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Probolinggo yang berparadigma WAD dan GAD, maka teknik analisis yang digunakan adalah Teknis analisis Moser.

a. Pengertian

Teknis analisis Moser adalah suatu teknik analisis yang membantu perencana atau peneliti dalam menilai, mengevaluasi, merumuskan usulan dalam tingkat kebijaksanaan program dan proyek yang lebih peka gender, dengan menggunakan pendekatan terhadap persoalan perempuan (kesetaraan, keadilan, anti kemiskinan, efisiensi, penguatan atau pemberdayaan), identifikasi terhadap peranan majemuk perempuan (reproduksi, produksi, sosial-kemasyarakatan), serta identifikasi kebutuhan gender praktis-strategis (Handayani dan Sugiharti, 2008).

Kerangka analisis Moser pada intinya didasari oleh tiga konsep, yaitu:

1. Tiga peran gender perempuan
2. Kebutuhan praktis dan strategis gender
3. Pendekatan kebijakan WID/GAD.

Ketiga konsep tersebut tercermin dalam enam alat analisis yang digunakan dalam model Moser. Keenam alat analisis tersebut adalah:

Alat 1. Identifikasi Peranan Gender

Alat ini mencakup penyusunan pembagian kerja gender atau pemetaan aktivitas perempuan dan laki-laki serta anak perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga selama 24 jam. Moser membagi peranan perempuan yang berpendapatan rendah ke dalam 3 peranan yaitu:

- Produktif
- Reproduksi
- Kemasyarakatan/ kerja komunitas

Alat 2. Penilaian Kebutuhan Gender

Alat ini berguna untuk melihat perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, kelompok kebutuhan itu dibedakan ke dalam kebutuhan praktis gender dan strategis gender.

Alat 3. Pemisahan Kontrol Atas Sumber Daya Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga dan Kekuasaan Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga

Alat ini digunakan untuk mengetahui siapa yang mengontrol sumberdaya dalam rumah tangga dan siapa yang mengambil keputusan atas penggunaan sumberdaya serta bagaimana keputusan itu diambil. Untuk mendapatkan data mengenai hal ini, maka perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan:

- Siapa yang melakukan kontrol atas sumberdaya?
- Apa saja sumberdaya yang dikontrol?
- Siapa yang mengambil keputusan?
- Bagaimana cara pengambilan keputusannya?

Alat 4. Menyeimbangkan Peranan

Alat ini berguna untuk mengetahui peranan perempuan dalam mengelola keseimbangan tugas-tugas yang produktif, reproduktif dan kegiatan kemasyarakatan atau kerja komunitas sangat penting. Pertanyaan penting yang perlu dilakukan dari penggunaan alat ini diantaranya adalah:

- Apakah suatu intervensi yang direncanakan akan meningkatkan beban kerja perempuan pada suatu peranan dengan konsekuensi terhadap peranan perempuan lainnya?
- Seberapa jauh sebuah perencanaan telah melayani peran gender perempuan?
- Peran gender perempuan manakah yang dilayani oleh intervensi yang ada?

Alat 5. Memahami Perbedaan Tujuan Kebijakan WID/GAD

Alat kelima ini merupakan suatu evaluasi, berguna untuk memeriksa pendekatan yang telah digunakan pada sebuah program atau kebijakan. Selain itu juga dapat digunakan untuk mempertimbangkan pendekatan yang paling sesuai digunakan pada kerja mendatang.

Alat 6. Melibatkan Perempuan. Organisasi yang peduli perspektif gender

Alat ini untuk melihat keterlibatan perempuan dalam organisasi-organisasi yang peduli gender serta keterlibatan perempuan sebagai perencana. Hal ini penting untuk menjamin bahwa kebutuhan praktis dan strategis sudah diidentifikasi dan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan (KNPPRI, 2008).

b. Kegunaan

Teknik analisis Moser dapat digunakan untuk: memahami lima butir kriteria analisis (kesetaraan, keadilan, anti kemiskinan, efisiensi, penguatan atau pemberdayaan), sehingga dapat menginterpretasikan pembangunan perempuan sebagai suatu proses yang penting dan bagian integral dari proses pembangunan (Handayani dan Sugiharti, 2008).

c. Aplikasi teknik analisis Moser

Tabel 7. Aplikasi teknik analisis Moser

Proyek	Peranan yang difokuskan						KJ yang dipenuhi		Pendekatan kebijakan
	repr		prod		Kemasy		KJP	KJS	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr			
1...									
2...									
3...									

Sumber : Handayani dan Sugiharti, 2008

keterangan analisis tabel:

Jika dalam tabel di atas perempuan lebih banyak berperan di reproduksi (kolom reproduksi), sedangkan peranan produksi (kolom produksi) dan peranan masyarakat (kolom masyarakat) lebih banyak didominasi oleh laki-laki, maka pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih berparadigma WID (*Women In Development*). Dimana perempuan hanya diposisikan sebagai obyek di dalam pembangunan, perempuan hanya menerima program-program hasil kebijakan dari pemerintah.

Jika perempuan memiliki peran yang banyak dalam produksi (kolom produksi) dan kemasyarakatan (kolom kemasyarakatan), maka pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berparadigma WAD (*Women And Development*). Dimana perempuan dalam pembangunan diikutsertakan atau berperan aktif dalam pembangunan tersebut. Perempuan ikut dalam mengambil keputusan tentang kebijakan pembangunan. Dalam konsep pembangunan yang berparadigma WAD ini perempuan “dibutuhkan” dalam pembangunan bukan perempuan yang “menbutuhkan” pembangunan seperti dalam konsep WID.

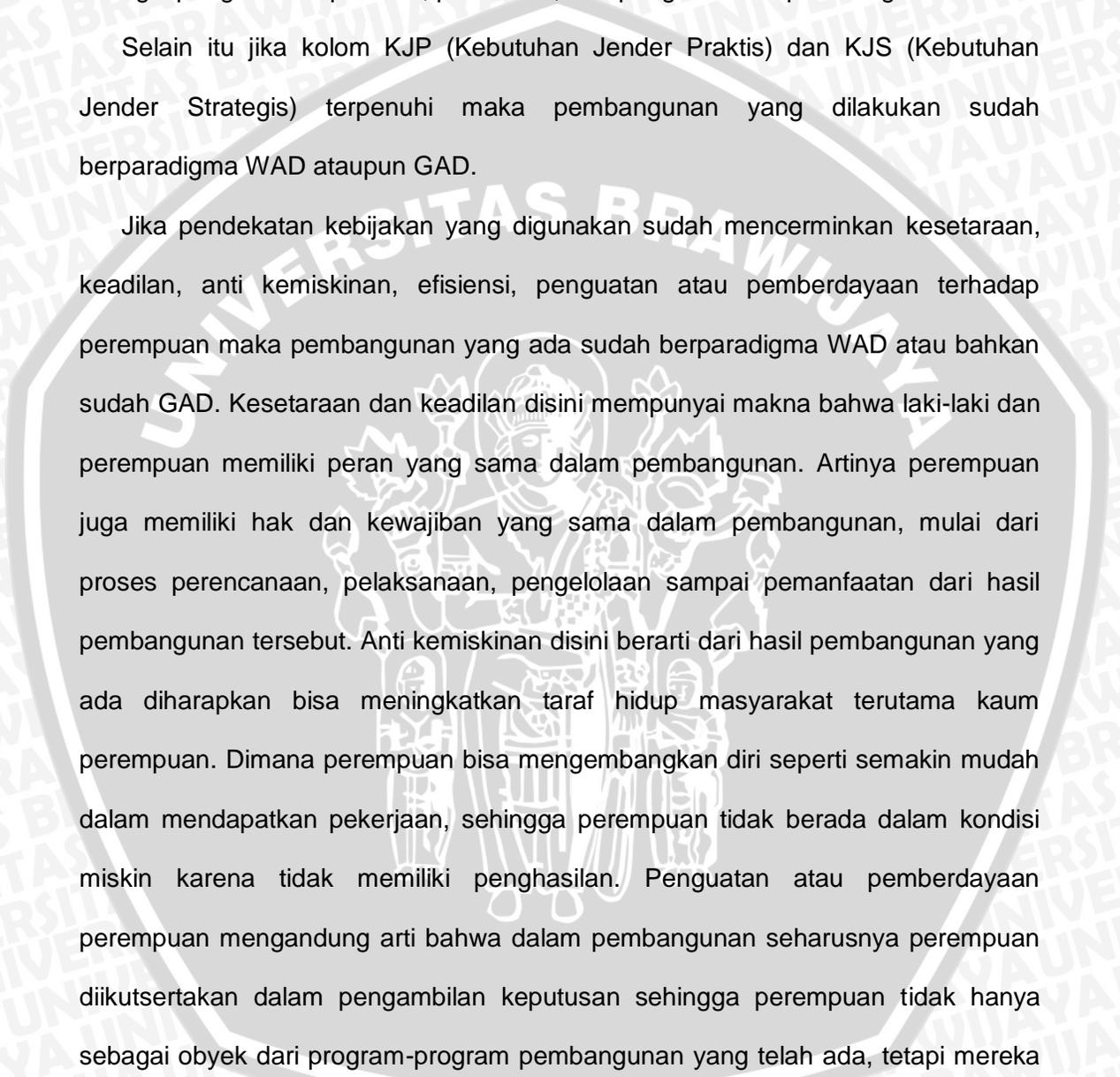
Sedangkan jika dalam semua peranan (reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan), laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama maka

repository.ub.ac

pembangunan yang dilakukan sudah berparadigma GAD (*Gender And Development*). Dimana dalam konsep GAD terjadi keseimbangan/kesetaraan dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan bertindak sebagai pengambil keputusan, pelaksana, dan pengelola dari pembangunan.

Selain itu jika kolom KJP (Kebutuhan Jender Praktis) dan KJS (Kebutuhan Jender Strategis) terpenuhi maka pembangunan yang dilakukan sudah berparadigma WAD ataupun GAD.

Jika pendekatan kebijakan yang digunakan sudah mencerminkan kesetaraan, keadilan, anti kemiskinan, efisiensi, penguatan atau pemberdayaan terhadap perempuan maka pembangunan yang ada sudah berparadigma WAD atau bahkan sudah GAD. Kesetaraan dan keadilan disini mempunyai makna bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam pembangunan. Artinya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai pemanfaatan dari hasil pembangunan tersebut. Anti kemiskinan disini berarti dari hasil pembangunan yang ada diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama kaum perempuan. Dimana perempuan bisa mengembangkan diri seperti semakin mudah dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga perempuan tidak berada dalam kondisi miskin karena tidak memiliki penghasilan. Penguatan atau pemberdayaan perempuan mengandung arti bahwa dalam pembangunan seharusnya perempuan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan sehingga perempuan tidak hanya sebagai obyek dari program-program pembangunan yang telah ada, tetapi mereka ikut berperan aktif dalam pembangunan. Dengan demikian jika elemen-elemen tersebut sudah tercapai, maka pembangunan yang ada sudah berparadigma WAD atau bahkan GAD dan tidak bias gender.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan yang berada di Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi PPP Mayangan ini berjarak sekitar 1 km di sebelah Timur Pelabuhan Tanjung Tembaga dan terletak di area administrasi Kota Probolinggo yang tidak terlalu jauh dari pusat kota dan lokasinya sudah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dari Kota Probolinggo.

Pada saat ini Pemerintah Kota Probolinggo sedang menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk kawasan khusus pantai, dimana tercakup kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, sehingga akan lebih jelas dan pasti peruntukan setiap lahan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan.

4.1.2 Latar Belakang Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan

Selama ini para nelayan di Kota Probolinggo melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapannya di Pelabuhan Tanjung Tembaga milik Pelindo III. Hal ini mengakibatkan tidak efisiennya dalam hal pemasaran, pemrosesan hasil tangkapan dan aktivitas lainnya dari nelayan karena sarana di Pelabuhan Tanjung Tembaga memang tidak disediakan untuk pelabuhan perikanan. Selain itu kondisi sandar kapal-kapal nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga sudah tidak memenuhi syarat keamanan karena rawan terhadap bahaya kebakaran, dan hal ini sering terjadi. Oleh Pelindo III, Pelabuhan Tanjung Tembaga direncanakan akan dikembangkan sebagai pelabuhan umum yang besar, dan dalam rencana Pelindo III tidak diakomodir area

untuk kapal nelayan, karena pelabuhan perikanan seharusnya tidak menjadi satu dengan pelabuhan umum disebabkan aktivitasnya sangat berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk membangun Pelabuhan Perikanan baru yang memenuhi standar sebagai Pelabuhan Perikanan yang dapat menampung kapal-kapal nelayan dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap dan tertata baik.

Sebelum menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai status dari PPP Mayangan adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), tetapi pada tahun 2004 berdasarkan keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : 12/ MEN/2004 tentang peningkatan status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung maka PPI Mayangan menjadi PPP Mayangan. Tanggal 29 Desember 2007 PPP Mayangan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, dan baru beroperasi tanggal 17 Februari 2010.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Mayangan juga bertujuan untuk:

- Mendukung usaha penangkapan ikan di Pantai Utara Jawa Timur.
- Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha penangkapan ikan dan industri pengolahan ikan.
- Meningkatkan usaha distribusi dan pemasaran hasil tangkap untuk lokal maupun ekspor.
- Meningkatkan pendapatan nelayan, PAD Kota Probolinggo dan Propinsi Jawa Timur.
- Meningkatkan fungsi pembinaan terhadap masyarakat nelayan dan pangkalan – pangkalan pendaratan di sekitar kawasan pelabuhan.

Selain itu Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan juga memiliki fungsi pelayanan, yaitu:

- Pengembangan masyarakat nelayan.
- Berlabuhnya kapal perikanan.
- Pendaratan ikan hasil tangkapan.
- Memperlancar kegiatan kapal perikanan.
- Pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan.
- Pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan.
- Pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan.

4.1.3 Fasilitas – fasilitas di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan

4.1.3.1 Sarana Laut

A. Kolam Pelabuhan

Sarana laut yang berbentuk kolam pelabuhan dengan fasilitas beberapa dermaga untuk sandar kapal dilindungi oleh konstruksi breakwater. Fungsi breakwater selain sebagai pelindung terhadap gelombang, juga sebagai konstruksi penahan sedimentasi.

Sesuai dengan jumlah dan ukuran kapal yang ada sekarang, maka kolam Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan direncanakan dibagi menjadi 3 jenis kedalaman, yaitu:

- Kolam 1, dengan kedalaman 1,0 m LWS, untuk kapal-kapal kecil dengan bobot < 10 ton, dengan luas kolam = 2, 90 Ha.
- Kolam 2, dengan kedalaman 3,0 m LWS, untuk kapal-kapal sedang dengan bobot < 100 ton, dengan luas kolam = 6,50 Ha.

- Kolam 3, dengan kedalaman 4,0 m LWS, untuk kapal-kapal besar dengan bobot < 300 ton, dengan luas kolam = 10,65 Ha.

B. Dermaga

Dermaga yang merupakan sarana tambat kapal dimana aktivitas bongkar muat dilaksanakan untuk Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan disesuaikan dengan jenis maupun tipenya sesuai dengan ukuran kapal yang akan bersandar.

Dermaga – dermaga tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dermaga utama

Dermaga utama adalah dermaga yang mempunyai fungsi utama untuk bongkar – muat kapal – kapal nelayan.

2. Dermaga pembagi zoning sandar kapal

Dermaga dengan sistem pier yang menjorok ke laut yang berfungsi selain sebagai dermaga bongkar – muat juga sebagai batas zoning kolam.

3. Dermaga parkir

Di sebagian panjang breakwater sisi Timur dimanfaatkan sebagai dermaga parkir dan juga dapat berfungsi sebagai dermaga bongkar dengan pembagian zoning sesuai kedalaman kolam.

4. Dermaga kapal-kapal pemerintah

Untuk keperluan sandar kapal – kapal pemerintah yang akan singgah di Pelabuhan Perikanan Mayangan, seperti kapal pengawas, kapal penelitian dan kapal – kapal Pemda.

C. Fasilitas – fasilitas Penunjang lainnya

Di sisi depan Barat disediakan lahan untuk fasilitas perbaikan kapal dengan kedalaman kolam 3,0 m. untuk pembersihan kolam pelabuhan dari kotoran – kotoran serta olie di pangkal breakwater sisi Timur terdapat instalasi pembilas kolam. Di kedua ujung breakwater yaitu di pintu masuk kolam dipasang rambu suar sebagai penuntun

kapal masuk ke kolam. Selain itu pada ujung breakwater Barat terdapat bangunan pos pengamatan yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap kapal – kapal yang keluar masuk pelabuhan.

4.1.3.2 Sarana Darat

A. Lahan Darat

Lahan sarana darat dihasilkan dari reklamasi area pantai Mayangan. Karena kondisi pantai yang sangat landai, maka untuk mengoptimalkan biaya, area reklamasi tersebut dilakukan pada daerah yang agak jauh dari garis pantai sehingga diperlukan konstruksi jalan penghubung yang berupa causeway dari timbunan sirtu dengan panjang 300 m.

B. Pembagian Zoning Areal Darat

Secara garis besar area darat dibagi menjadi 5 zona, yaitu:

- Zona 1, merupakan area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan area kotor. Area pelelangan ikan yang merupakan area kegiatan bongkar untuk kapal – kapal kecil dimana hasil ikan tersebut langsung dibawa ke TPI. Sebagai kelengkapan area ini dilengkapi kios/kantin, toilet umum, lapangan parkir yang cukup luas.
- Zona 2, merupakan area fasilitas umum dan taman.

Area fasilitas umum dimana terdapat bangunan show room hasil produksi perikanan, pos keamanan laut terpadu, masjid dan taman.

- Zona 3, merupakan area industri perikanan.

Zona industri ini dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu:

1. Kawasan penunjang bongkar – muat, yang dilokasikan pada area sepanjang belakang dermaga sisi Barat. Area ini sangat potensial sekali dan bernilai komersial tinggi karena merupakan area yang paling dekat dengan

dermaga, oleh karena itu perlu dikuasai oleh pihak pemerintah agar penggunaannya dapat seoptimal mungkin.

2. Kawasan industri pengolahan ikan ditempatkan di daerah tengah berdekatan dengan area perkantoran dan tidak terlalu jauh dari dermaga bongkar untuk kapal – kapal sedang dan besar, dengan tujuan agar lebih memudahkan hubungan antara pabrik dengan kantor serta antara pabrik dengan dermaga bongkar.

- Zona 4, merupakan area perkantoran.

Area perkantoran dimana terdapat Kantor Pelabuhan ditempatkan pada lokasi yang dapat menjangkau pemantauan semua kawasan pelabuhan terutama untuk memantau lalu – lintas kapal di pelabuhan. Pada zona perkantoran juga akan terdapat bangunan laboratorium, rental office, balai pertemuan nelayan, water reservoir serta bangunan ruang genset.

- Zona 5, merupakan area bengkel dan perbaikan kapal.

Area perbengkelan dan dan dock, area ini merupakan area untuk perbaikan peralatan yang ada di pelabuhan seperti (crane, forklit, mobil) serta perbaikan kapal-kapal. Usaha perbaikan kapal – kapal diserahkan kepada pihak swasta untuk membangun fasilitas seperti pengangkatan kapal yang akan diperbaiki serta fasilitas perbaikan kapal di darat.

C. Jalan dan Lapangan Parkir

Jalan dan lapangan parkir di kompleks Pelabuhan Perikanan Mayangan merupakan jalan klas 1, yang akan dapat dilalui kendaraan dengan tekanan gandar 20 ton, karena diperkirakan truck – truck kontainer akan masuk area pelabuhan.

D. Kolam Penampungan Ikan Hidup

Mengingat nilai ekonomis ikan yang masih dalam keadaan hidup sangat tinggi, maka perairan di belakang Pelabuhan Perikanan dimanfaatkan sebagai kolam penampungan ikan hidup.

E. Bangunan Laboratorium

Laboratorium diperlukan selain sebagai tempat untuk penelitian juga sebagai sarana untuk pemeriksaan hasil – hasil pengolahan ikan. Lokasi bangunan laboratorium berada di zona perkantoran.

F. Gedung Pertemuan Nelayan

Merupakan fasilitas yang disediakan bagi nelayan – nelayan untuk melakukan kegiatan sosial maupun kemasyarakatan di luar aktivitas rutinnnya. Gedung pertemuan ini juga dilengkapi dengan ruangan untuk koperasi nelayan dan lokasi gedung ini berada di zona perkantoran.

G. Gudang BAP

Gudang bahan alat dan perlengkapan (BAP) merupakan gudang pelayanan kebutuhan dasar dari kapal – kapal nelayan. Lokasi gudang BAP berada di belakang kawasan industri perikanan rakyat, atau di kawasan penunjang bongkar – muat, dan di zona perbengkelan di sisi dermaga kapal besar.

H. Transit Shed

Merupakan fasilitas yang disediakan sebagai penampungan sementara hasil tangkapan sebelum dibawa ke TPI atau pabrik pengolahan ikan. Bangunan transit shed direncanakan sebagai bangunan terbuka tanpa dinding, dengan tujuan agar kendaraan – kendaraan pengangkut ikan dapat langsung masuk ke dalam gedung, oleh sebab itu lantai bangunan direncanakan dari beton bertulang.

I. Suplai Air Tawar

Air tawar untuk keperluan di Pelabuhan Perikanan Mayangan ini dari sumber PDAM, mengingat volume yang dapat disuplai oleh PDAM Kota Probolinggo cukup besar. Air tawar dari PDAM disalurkan ke pelabuhan dan ditampung di ground reservoir dengan kapasitas 200 m³. Untuk pendistribusian ke masing – masing kegiatan (industri, kapal – kapal nelayan, gedung – gedung) digunakan sistem gravitasi, yaitu dengan membangun elevated water reservoir kapasitas minimal 30 m³.

J. Suplai Bahan Bakar (BBM)

Bahan bakar untuk kapal – kapal nelayan direncanakan disuplai oleh 3 jenis stasiun, yaitu:

- SPDN, yang diperuntukkan untuk kapal – kapal kecil (<10 GT), lokasi SPDN di dekat dermaga muat kapal – kapal kecil.
- SPBN, yang diperuntukkan untuk kapal – kapal sedang dan besar, lokasi SPBN di dekat dermaga kapal – kapal besar.
- Sebagai cadangan, untuk investor swasta disediakan di sebelah dalam dari breakwater barat lokasi untuk penempatan floating bunker BBM, yang dapat melayani kapal – kapal besar.

Masing – masing SPDN dan SPBN dilengkapi dengan tangki – tangki penyimpan BBM dengan kapasitas minimal 50 m³.

K. Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Pelabuhan perikanan Mayangan direncanakan dengan harapan menjadi pelabuhan perikanan yang bersih, teratur dan nyaman. Oleh sebab itu segala macam sampah – sampah harus dikumpulkan pada satu lokasi tertentu, yaitu di Tempat Pembuangan Sampah (TPS), yang lokasinya di sebelah belakang tempat penjemuran jala.

L. Bangunan Toilet – toilet Umum

Sesuai dengan harapan bahwa Pelabuhan Perikanan Mayangan menjadi pelabuhan yang bersih dan nyaman, maka perlu dibangun toilet – toilet umum di beberapa zona, seperti zona fasilitas umum, zona TPI, kawasan penunjang bongkar – muat.

M. Kios – kios dan Kantin

Agar para pedagang dapat berjualan secara teratur dan tertib, perlu disediakan kios – kios dan kantin pada lokasi yang sudah ditentukan. Kegiatan yang perlu kios dan kantin adalah kegiatan pelelangan ikan, oleh sebab itu lokasi kios dan kantin dibangun di depan TPI.

N. Ruang Genset

Sumber listrik selain dari PLN, juga direncanakan berasal dari cadangan lain berupa genset. Kapasitas genset harus diperhitungkan untuk semua kegiatan di pelabuhan termasuk untuk keperluan industri – industri perikanan, dengan demikian industri – industri tersebut tidak perlu lagi mengadakan genset sendiri.

O. Masjid

Penduduk Kota Probolinggo dan masyarakat nelayan yang mayoritas adalah muslim, kehadiran suatu tempat ibadah berupa masjid merupakan suatu kebutuhan pokok. Oleh sebab itu di zona fasilitas umum disediakan ruang untuk bangunan Masjid.

P. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)

Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) khusus untuk industri pengolahan ikan direncanakan disebelah luar revetment sisi Barat, dan instalasi ini menjadi kewajiban pihak investor swasta untuk membangunnya. Pihak swasta dalam merencanakan sistem IPAL harus mengacu standar yang berlaku bagi pengolahan air limbah industri perikanan.

Q. Taman

Agar kompleks Pelabuhan Perikanan terlihat asri maka di zona fasilitas umum dapat ditata sebagai taman. Penanaman pepohonan maupun rumput seyogyanya juga dilakukan pada area – area lainnya seperti TPI, industri, dan perkantoran.

Sampai tahun 2010, pembangunan yang sudah jadi dan dalam kondisi baik antara lain reklamasi, causeway, TPI, bangunan toilet, dermaga Pier 1, jalan dan lapangan parkir, sistem drainase, break water timur, landing beach, jetty, revetment, break water barat, dermaga sheet pile, SPDN, sheet pile, masjid, gedung kantor untuk kamladu, balai pertemuan nelayan, tendon air, rumah dinas, jalan kompleks pelabuhan.

4.2 Profil gender dari masyarakat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Probolinggo

4.2.1 Profil Kegiatan

Kegiatan reproduktif (domestik) adalah segala kegiatan yang tidak menghasilkan uang. Biasanya kegiatan ini identik dengan kegiatan di dalam rumah tangga sehari – hari. Sebagian besar kegiatan reproduktif (domestik) dilakukan oleh perempuan (istri dan anak perempuan). Begitu juga di kehidupan masyarakat sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Kegiatan reproduktif kebanyakan (didominasi) oleh kaum perempuan. Kaum laki-laki hanya melakukan sedikit sekali kegiatan reproduktif.

Para istri selalu menyiapkan sarapan pagi untuk seluruh anggota keluarganya. Mereka biasanya memasak dibantu oleh anak perempuannya. Karena kehidupan masyarakat pesisir yang masih tergolong di bawah garis kemiskinan, mereka memasak menggunakan tungku dan hal tersebut membutuhkan bahan bakar berupa kayu. Dalam hal ini laki – laki (suami) sedikit berperan dalam pencarian kayu bakar. Tetapi tidak jarang pula para istri yang mencari kayu bakar juga, karena suaminya pergi melaut atau

bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mencari bahan bakar. Untuk pembelian bahan masakan seperti sayur, lauk – pauk dan lain sebagainya semua dilakukan oleh perempuan. Semua responden perempuan yang diwawancarai, mereka melakukan kegiatan belanja ke pasar atau tukang sayur untuk membeli bahan masakan. Bisa dikatakan pekerjaan – pekerjaan eksklusif perempuan yang tidak dapat dimasuki oleh laki-laki adalah memasak, mencari atau membeli bahan untuk memasak seperti sayur dan lauk. Biasanya dalam kegiatan reproduksi tersebut seorang perempuan (istri) dibantu oleh anak perempuan atau kerabat perempuannya.

Ketika suatu keluarga memiliki anak, maka pengasuhan anak menjadi tanggung jawab perempuan (ibu). Mulai dari memandikan, memberi makan, menjaga, sampai menidurkan anak adalah pekerjaan perempuan. Laki – laki (suami) hanya membantu sedikit. Biasanya sang bapak hanya menjaga anaknya, itupun hanya ketika sang istri dalam situasi sibuk sekali.

Kegiatan seperti membersihkan rumah, membuang sampah, mencuci baju dan setrika dilakukan oleh laki – laki dan perempuan. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara, dimana dari 12 responden laki-laki yang diwawancarai sebagian kecil responden yaitu 16%-25% responden mengatakan bahwa mereka juga membantu istri mereka dalam pekerjaan- pekerjaan tertentu seperti membersihkan rumah, membuang sampah, mencuci dan menyetrika baju. Tetapi memang sebagian besar kegiatan rumah tangga (reproduktif) didominasi oleh perempuan. Menurut Ripah seorang penjual ikan di PPP Mayangan, meskipun suaminya menganggur tetapi tidak pernah membantu istrinya dalam kegiatan rumah tangga (reproduktif). Hal ini karena kebiasaan atau budaya dari orang Madura yang memiliki pandangan bahwa laki-laki tidak bisa membantu atau pantang untuk bekerja di dapur. Laki – laki hanya berperan di sektor publik dalam hal ini mencari nafkah. Meskipun banyak perempuan yang juga membantu suaminya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Salah satu istri dari

nelayan andon dari Lamongan yang menyusul suaminya ke tempat suaminya andon, mengatakan bahwa semua kegiatan reproduktif dikerjakan oleh istri, karena suami sudah lelah dengan bebannya bekerja di laut.

Tabel 8. Kegiatan reproduktif (dalam sehari) masyarakat sekitar PPP Mayangan

No	Kegiatan	Lk		Pr	
		respnden	%	respnden	%
1.	memasak				
	a. menyiapkan bahan bakar	3 respnden	25%	6 respnden	35,29%
	b. mencari&membeli sayur	1 respnden	8,30%	17 respnden	100%
	c. menyiapkan air	1 respnden	8,30%	17 respnden	100%
2.	mengasuh anak				
	a. memandikan	1 respnden	8,30%	9 respnden	52,94%
	b. menyuapi	1 respnden	8,30%	9 respnden	52,94%
	c. menjaga anak	3 respnden	25%	9 respnden	52,94%
3.	membersihkan rumah	2 respnden	16,70%	14 respnden	88,23%
4.	membuang sampah	3 respnden	25%	14 respnden	88,23%
5.	mencuci baju dan setrika	2 respnden	16,70%	13 respnden	82,35%

Ket:

n (total responden) laki-laki :12 orang

n (total responden) perempuan : 17 orang

Dari data di atas bisa diketahui bahwa untuk kegiatan reproduktif lebih banyak didominasi oleh perempuan. Seandainya ada peran laki – lakipun sifatnya hanya membantu saja, dan intensitasnya sedikit sekali. Hal tersebut terjadi karena selama ini “dapur” atau ranah domestik hanya menjadi tanggung jawab dari kaum perempuan.

Apalagi di dalam masyarakat yang kental sekali dengan budaya Madura seperti yang ada di masyarakat Mayangan ini, Laki – laki pantang untuk memasuki ranah tersebut.

Kegiatan memasak hampir 100% dikuasai oleh perempuan. 17 responden perempuan menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan membeli sayuran dan menyediakan air. Sedangkan dari 17 responden perempuan hanya 35, 29% yang melakukan kegiatan penyediaan bahan bakar. Karena biasanya penyediaan bahan bakar tersebut biasanya dilakukan oleh suami mereka. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari responden laki-laki. Dari 12 responden laki-laki hanya 8,3% atau 1 responden saja yang melakukan kegiatan mencari dan membeli sayur serta menyiapkan air. Dan 25 % melakukan kegiatan penyediaan bahan bakar. Sebagian dari mereka tidak melakukan kegiatan reproduksi dalam hal ini kegiatan memasak, karena menurut mereka memasak adalah pekerjaan dari perempuan.

Begitu juga dengan kegiatan mengasuh anak, sebagian besar masih didominasi oleh perempuan. Dari 17 responden perempuan hampir setengahnya yaitu 52,94% melakukan semua kegiatan yang bersangkutan dengan pengasuhan terhadap anak mereka. Mulai dari memandikan, menyuapi, dan menjaga anak mereka. Sedangkan laki-laki hanya sedikit yang mau melakukan kegiatan tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari prosentase laki-laki yang melakukan kegiatan memandikan dan menyuapi anak hanya 8,3%.

Untuk kegiatan reproduksi yang banyak melibatkan laki- laki adalah membersihkan rumah, membuang sampah, mencuci dan menyetrika baju. 16,7% - 25% responden laki-laki melakukan hal tersebut. Meskipun sebenarnya perempuan masih mendominasi kegiatan tersebut. Tetapi dalam hal ini laki-laki sudah sedikit membantu kegiatan reproduksi.

Masyarakat Madura di Pesisir menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis kerabat laki-laki dan perempuan (*bilateral*). Menurut masyarakat setempat, yang

dimaksud saudara oleh Ego adalah seluruh kerabat yang dapat ditarik dari garis keturunan orang tua (ibu dan bapak). Hubungan kekerabatan dalam masyarakat Madura ditentukan oleh faktor keturunan (nasab) dan perkawinan. Di dalam keluarga inti Madura, suami (laki-laki) dianggap sebagai kepala keluarga. Ia adalah penanggung jawab utama kebutuhan rumah tangga sehari – hari. Dalam segala aktivitas kemasyarakatan, keterlibatan laki – laki (suami) dianggap mewakili keluarganya. Sementara itu, tugas pokok perempuan (istri) adalah mengelola urusan rumah tangga (domestik). Namun demikian, banyak pula istri yang harus membantu mencari nafkah keluarga karena tingkat penghasilan suami sebagai nelayan kurang mencukupi. Selain itu, anak – anakpun berkewajiban membantu mengatasi pekerjaan – pekerjaan orang tua (Kusnadi, 2001).

Padahal jika diperhatikan pekerjaan rumah yang dilakukan oleh perempuan tersebut laki – laki juga bisa mengerjakannya. Misalnya saja memasak. Banyak koki laki - laki di restoran dan mereka melakukan kegiatan memasak juga. Jika laki – laki bisa membantu sebagian pekerjaan perempuan tersebut, maka perempuan memiliki waktu untuk melakukan hal lainnya selain hanya disibukkan dengan pekerjaan rumah tersebut. Misalnya merawat diri, mengembangkan potensi diri mereka, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga bisa mengetahui perkembangan zaman. Karena selama ini perempuan kurang memiliki pengetahuan dikarenakan mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan potensi mereka. Waktu mereka hanya habis untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak dan suami mereka saja.

Kegiatan produktif bisa dikatakan sebagai kegiatan yang menghasilkan uang. Kegiatan produksi dari masyarakat sekitar PPP Mayangan bisa dikelompokkan menjadi kegiatan perikanan, pekerjaan utama, dan pekerjaan sampingan. Karena masyarakat Mayangan tinggal di pesisir maka di tempat tersebut terdapat kegiatan perikanan. Kegiatan perikanan yang ada antara lain penangkapan, pasca penangkapan, dan

pemasaran. Kegiatan penangkapan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan/ pengambilan ikan ke laut. Kegiatan penangkapan ini dilakukan oleh nelayan yang semuanya adalah laki – laki. karena selama ini tidak ada nelayan perempuan. Mulai dari membersihkan kapal, mempersiapkan alat tangkap, penangkapan ikan di laut, sampai pada pendaratan kapal dan ikan semua dilakukan oleh laki – laki. Jika ada keterlibatan perempuan (istri nelayan), itu hanya dalam persiapan bekal suami mereka selama melaut.

Hal tersebut bisa dilihat di dalam tabel 4. Dari 12 responden laki-laki dimana 6 responden yang beprofesi sebagai nelayan menyatakan bahwa mereka melakukan semua kegiatan penangkapan, mulai dari membersihkan kapal, persiapan alat tangkap, penangkapan di laut sampai pada pendaratan kapal dan ikan. Hal tersebut juga bisa dilihat di dalam gambar 1, dimana dalam rangkaian kegiatan penangkapan salah satunya adalah memperbaiki alat tangkap (jaring) semuanya dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan dari 17 responden perempuan tidak ada seorangpun yang berprofesi sebagai nelayan. Jika ada diantara mereka yang berprofesi sebagai istri nelayan mereka hanya mempersiapkan bekal untuk suaminya ketika pergi melaut.



Gambar 1. Nelayan (laki –laki) memperbaiki alat tangkap yang rusak

Selama ini profesi sebagai nelayan khususnya di Mayangan adalah laki –laki semua. Sampai saat ini belum ada data yang menunjukkan adanya perempuan yang berprofesi sebagai nelayan. Sebagian besar nelayan Mayangan berprofesi sebagai nelayan karena selain mereka tinggal di daerah pesisir, mereka juga menjadi nelayan karena mengikuti jejak orang tua mereka yang juga menjadi nelayan. Nelayan Mayangan biasanya menggunakan alat tangkap cantrang. Mereka biasanya melaut selama 3 – 4 hari. Biasanya satu kapal diisi oleh 8 – 9 Anak Buah Kapal (ABK) dimana semuanya adalah laki –laki. Menurut Anam salah satu nelayan andon dari Lamongan mengatakan bahwa selama ini tidak ada nelayan perempuan, karena jika perempuan ikut melaut pasti kebingungan/ repot jika akan buang air kecil ataupun besar, karena sebagian besar di dalam kapal yang digunakan untuk melaut tidak terdapat fasilitas kamar mandi. Selama ini kapal yang digunakan oleh nelayan – nelayan, terutama nelayan kecil yang menggunakan kapal berkekuatan 28 – 50 GT, di dalamnya tidak ada fasilitas kamar mandi. Hal tersebut karena sejak dahulu kala pembuat kapal tidak mendesain kapal dengan fasilitas kamar mandi, karena sebagian besar nelayan adalah laki – laki yang tidak begitu memerlukan fasilitas kamar mandi ketika pergi melaut. Dari gambar 2 bisa dilihat bahwa nelayan yang pergi melaut semuanya adalah laki-laki tidak ada perempuannya.



Gambar 2. Pendaratan kapal dan ikan oleh nelayan (laki –laki)

Selain penangkapan, di sekitar PPP Mayangan juga terdapat kegiatan pasca penangkapan. Kegiatan pasca penangkapan ini meliputi pendinginan, pengeringan ikan, dan pengasapan. Kegiatan pendinginan biasanya dilakukan di dalam pelabuhan, karena di dalam pelabuhan terdapat tempat/ gudang untuk melakukan pendinginan ikan. Dalam kegiatan pendinginan ikan, didominasi oleh kaum laki – laki (bisa dilihat di gambar 3). Meskipun ada keterlibatan dari kaum perempuan itu hanya sedikit, biasanya istri dari pemilik usaha pendinginan yang membantu suaminya. Hal tersebut terjadi karena, pekerjaan di usaha pendinginan tersebut memerlukan energi yang cukup besar, dan lebih cepat jika dikerjakan oleh laki – laki. Seperti mengangkat balok es yang berukuran besar, menghancurkan balok es tersebut hingga menjadi es curah. Hal tersebut lebih banyak dilakukan oleh laki –laki.



Gambar 3. Pendinginan ikan di pelabuhan

Berbeda dengan pendinginan ikan, dalam kegiatan pengeringan ikan, lebih banyak didominasi oleh perempuan. Mulai dari penyediaan bahan baku (ikan), penyiangan dan pencucian, penggaraman dan penirisan, penjemuran, sampai pengemasan semua itu dilakukan oleh perempuan. Dari 2 responden yang memiliki usaha pengeringan, kedua-duanya adalah perempuan. Mereka melakukan semua aktivitas yang berkaitan dengan proses pengeringan tersebut. Meskipun ada campur tangan dari laki – laki tetapi intensitasnya sangat jarang. Karyawan dalam usaha pengeringan sebagian besar juga perempuan (istri nelayan) yang mencari tambahan nafkah untuk keluarganya.

Tetapi untuk status kepemilikan dari usaha tersebut selalu di atas namakan laki – laki (suami). Seperti usaha pengeringan ikan yang dimiliki oleh Juriah. Meskipun semua kegiatan teknis ditangani oleh Juriah sendiri, tetapi untuk masalah keuangan dan status kepemilikan dari usaha tersebut diserahkan kepada suaminya. Usaha pengeringan ikan yang dilakukan oleh masyarakat Mayangan masih bersifat tradisional. Hal tersebut dapat dilihat dari alat – alat dan prosesnya yang masih tradisional dan sederhana.

Untuk mengeringkan ikan mereka mengandalkan panas dari alam yaitu sinar matahari. Mereka sulit untuk mengembangkan usahanya karena usaha mereka masih skala kecil. Dan untuk menjadikan usaha mereka lebih modern mereka juga tidak tahu bagaimana caranya, mengingat yang berperan besar dalam usaha pengeringan kebanyakan adalah perempuan yang *notabene*-nya memiliki pendidikan rendah dan kurang pengetahuan. Jika ada kegiatan penyuluhan dari pemerintah, kebanyakan yang datang adalah laki – laki (suami), padahal yang lebih banyak tahu di lapang adalah perempuan. Tetapi karena di masyarakat Mayangan masih menganggap bahwa yang harus mengikuti kegiatan – kegiatan penyuluhan, rapat – rapat (kegiatan di ranah publik) adalah kaum laki – laki, perempuan cukup di rumah saja.

Begitu juga dalam kegiatan pengasapan. Dalam kegiatan ini lebih banyak peran perempuan. Laki – laki juga memiliki andil dalam kegiatan pengasapan ini tetapi hanya sebagian kecil, dan itu hanya sebatas pada penyediaan bahan bakar dan dalam proses mengasapkan ikan. Selebihnya dilakukan oleh perempuan. Mulai dari pembelian ikan ke pelabuhan, pembersihan ikan, proses pengasapan sampai pada penjualan dari ikan hasil pengasapan semua dilakukan oleh perempuan.

Rangkaian terakhir dari kegiatan perikanan adalah pemasaran, baik itu pemasaran ikan segar hasil tangkapan nelayan ataupun pemasaran hasil olahan. Dalam kegiatan pemasaran, sebagian besar didominasi oleh perempuan. Dari tabel 2 bisa dilihat bahwa 70,50% dari responden perempuan mereka berprofesi sebagai pedagang ikan. Sedangkan laki-laki yang berprofesi sebagai pedagang ikan hanya 41,70% dari total 12 responden yang diwawancarai. Kebanyakan mereka adalah istri – istri dari nelayan. Mereka melakukan kegiatan pemasaran di lingkungan PPP Mayangan (bisa dilihat di gambar 4). Mereka menjual ikan hasil dari tangkapan suaminya. Banyak juga dari pedagang – pedagang perempuan tersebut yang sukses dalam dunia perdagangan ikan dan menjadi juragan ikan. Alasan mereka berprofesi

sebagai pedagang atau penjual ikan antara lain karena mengikuti jejak orang tua dan ingin membantu suami dalam mencari tambahan pendapatan.



**Gambar 4. Kegiatan pemasaran ikan di TPI yang ada di PPP Mayangan
(kebanyakan adalah perempuan)**

Hasil tangkapan tidak dijual langsung oleh nelayan, tetapi dibawa pulang terlebih dahulu dan istri merekalah yang akan menjualnya. Ini dilakukan karena dua alasan :

1. Istri nelayan tidak percaya kepada suaminya karena khawatir tidak jujur dalam hal penjualan hasil ikannya. Misalnya, nelayan yang memperoleh penghasilan ikan sebanyak 10 kg diberitahukan kepada istrinya hanya 7 kg sehingga hasil penjualan yang 3 kg sisanya diambil oleh nelayan yang bersangkutan. Sekalipun dalam penjualan ikan benar – benar dilakukan secara jujur, tetapi seorang nelayan tetap dicurigai oleh istrinya. Jika perasaan ketidakpercayaan itu tinggi dan dibiarkan dapat menyebabkan pertengkaran suami – istri yang berkepanjangan. Dalam kenyataannya, nelayan sering melakukan penipuan

hasil tangkapan terhadap istrinya, khususnya pada saat ia mendapat hasil yang banyak. Biasanya, uang hasil penyelewengan itu dimanfaatkan atau disimpannya sendiri. Tidak sedikit pula nelayan yang memanfaatkan uang hasil penyelewengannya itu untuk kepentingan yang tidak baik, misalnya berjudi, minum – minuman keras, atau berkencan dengan pelacur di lokasi terdekat.

2. Membawa pulang hasil tangkapan, dan istri nelayan mengambil beberapa ekor ikan untuk dijadikan lauk – pauk. Sepanjang nelayan masih memperoleh hasil tangkapan sekalipun sedikit pasti akan disisihkannya untuk kebutuhan lauk – pauk, dan istrinya tidak akan membeli jenis lauk – pauk yang lain. Pembelian lauk – pauk lainnya, seperti sayuran, tahu – tempe, telur hanya dilakukan jika suami tidak memperoleh hasil tangkapan. Pembelian lauk – pauk selain ikan dianggap terlalu mahal. Perhitungan demikian terbukti dapat menekan anggaran belanja keluarga sehari – hari.

Kegiatan produktif dari masyarakat sekitar PPP Mayangan yang lain adalah pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Masyarakat sekitar PPP Mayangan sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Hal ini karena mereka tinggal di daerah pesisir dan sejak dulu orang tua mereka juga menjadi nelayan, sehingga anak cucunya sekarang juga menjadi nelayan. Yang berprofesi sebagai nelayan adalah laki – laki saja.

Selain sebagai ibu rumah tangga, perempuan sekitar PPP Mayangan ada juga yang bekerja sampingan sebagai pembantu rumah tangga, penjual klontongan/ toko, dan penjual nasi/ warung nasi, Mereka bekerja sampingan untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, biasanya bekerja di rumah saudara mereka yang lebih mampu (juragan kapal) untuk membantu pekerjaan rumah tangganya. Mereka mendapatkan upah tiap hari. Pekerjaan yang dilakukan seperti membersihkan rumah, mencuci, dan setrika.

Selain itu, sebagian perempuan di sekitar PPP Mayangan juga mengelola toko dan warung makan. Mereka membuka toko di rumah mereka atau di kawasan sekitar pelabuhan. Menurut Kusnadi (2001), keterlibatan perempuan dalam mengelola warung dan toko sangat besar. Untuk warung – warung makanan atau minuman sepenuhnya ditangani oleh kaum perempuan. Biasanya, suami ikut terlibat aktif membantu jika dipandang perlu dan ada kesempatan untuk mengembangkan toko dan warung yang menjual bahan kebutuhan sehari – hari. Anak – anak mereka juga terkadang ikut membantu kegiatan jual – beli di warung. Pengelolaan keuangan dan pengadaan barang – barang dagangan ditangani sepenuhnya oleh perempuan.



Tabel 9. Kegiatan produktif masyarakat sekitar PPP Mayangan

No	Kegiatan	Lk		Pr	
		respnden	%	respnden	%
1.	penangkapan				
	a. membersihkan kapal	5 respnden	41,70%	0 respnden	0%
	b. persiapan alat tangkap	6 respnden	50%	0 respnden	0%
	c. persiapan bekal	0 respnden	0%	3 respnden	17,60%
	d. penangkapan di laut	5 respnden	41,70%	0 respnden	0%
	e. pendaratan kapal&ikan	5 respnden	41,70%	0 respnden	0%
2.	pendinginan				
	a. penghancuran es				
	b. pemberian es				
3.	pengeringan				
	a. penyediaan bahan baku	0 respnden	0%	2 respnden	11,70%
	b. penyiangan ikan&pencucian	0 respnden	0%	2 respnden	11,70%
	c. penggaraman	0 respnden	0%	2 respnden	11,70%
	d. penjemuran	0 respnden	0%	2 respnden	11,70%
	e. pengemasan	0 respnden	0%	2 respnden	11,70%
4.	pengasapan				
	a. persiapan bahan baku	0 respnden	0%	1 respnden	5,80%
	b. persiapan bahan bakar	0 respnden	0%	0 respnden	0%
	c. pengasapan	0 respnden	0%	1 respnden	5,80%
	d. pengemasan	0 respnden	0%	1 respnden	5,80%
5.	pemasaran				
	a. pengadaan barang dagangan	7 respnden	58,30%	11 respnden	64,70%
	b. pemasaran&promosi	6 respnden	50%	15 respnden	88,20%
6.	pekerjaan utama				
	a. nelayan	6 respnden	50%	0 respnden	0%
	b. pedagang ikan	5 respnden	41,70%	12 respnden	70,50%
	c. pengolah	0 respnden	0%	3 respnden	17,60%
7.	pekerjaan sampingan				
	a. penjual klontongan/toko	0 respnden	0%	2 respnden	11,70%
	b. penjual nasi/warung	0 respnden	0%	1 respnden	5,80%

Ket:

n (total responden) laki-laki :12 orang

n (total responden) perempuan : 17 orang

Untuk kegiatan sosial atau kemasyarakatan, masyarakat sekitar PPP Mayangan terutama nelayan mengikuti kegiatan seperti arisan, pengajian, rapat di desa, dan kerja bakti di lingkungan sekitar. Untuk kegiatan arisan diadakan dan diikuti oleh para perempuan dalam hal ini istri nelayan. Kegiatan arisan tersebut biasanya hanya diisi dengan percakapan – percakapan ringan dan saling silaturahmi antar tetangga saja. Dari tabel 5 bisa diketahui bahwa 52,90% responden perempuan mengikuti kegiatan arisan. Sedangkan responden laki-laki tidak ada seorangpun yang mengikuti kegiatan arisan tersebut. Untuk kegiatan pengajian diikuti oleh laki – laki dan perempuan. Tetapi keikutsertaan perempuan sangat sedikit dan biasanya hanya berperan dalam menyiapkan konsumsi. Kegiatan rapat di desa selalu diikuti oleh laki –laki, kecuali kegiatan PKK dan itupun jarang sekali perempuan yang mengikutinya. Mereka beralasan tidak memiliki waktu untuk datang atau mengikuti kegiatan itu, karena sudah disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga dan juga harus membantu suami mereka mencari nafkah. Kerja bakti di lingkungan sekitar selalu diikuti oleh laki – laki. Karena dalam kegiatan kerja bakti biasanya pekerjaan yang dilakukan cukup membutuhkan energi yang ekstra dan itu hanya bisa dilakukan oleh laki – laki. Perempuan hanya menyiapkan konsumsi saja.

Tabel 10. Kegiatan sosial masyarakat sekitar PPP Mayangan

no	kegiatan	Lk		Pr	
		respnden	%	respnden	%
1.	arisan				
	a. persiapan tempat	0 respnden	0%	9 respnden	52,90%
	b. diskusi/rapat	0 respnden	0%	9 respnden	52,90%
	c. persiapan konsumsi	0 respnden	0%	9 respnden	52,90%
2.	rapat desa				
	a. persiapan tempat	12 respnden	100%	0 respnden	0%
	b. diskusi/rapat	12 respnden	100%	3 respnden	17,60%
	c. persiapan konsumsi	0 respnden	0%	4 respnden	23,50%
3.	pengajian				
	a. persiapan tempat	7 respnden	58.3%	0 respnden	0%
	b. diskusi/rapat	7 respnden	58.3%	0 respnden	0%
	c. persiapan konsumsi	0 respnden	0%	7 respnden	41,20%
4.	kerja bakti				
	a. pelaksanaan kerja bakti	11 respnden	91%	0 respnden	0%
	b. penyediaan konsumsi	0 respnden	0%	7 respnden	41,20%

Ket:

n (total responden) laki-laki :12 orang

n (total responden) perempuan : 17 orang

Dari analisis di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa perempuan juga berperan dalam kegiatan produksi. Peran serta dari perempuan tersebut tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Karena peran serta mereka memiliki kontribusi atau manfaat kepada keluarga mereka. Misalnya dengan ikutnya perempuan (istri) membantu

suaminya mencari nafkah maka akan mengurangi beban suaminya dan juga bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.

Meskipun demikian, di dalam masyarakat sekitar PPP Mayangan sistem pembagian kerja secara seksual masih menempatkan secara tegas peran laki – laki dan perempuan. Hal ini bisa dilihat dari profesi nelayan masih didominasi oleh laki – laki dan perempuan lebih banyak berprofesi sebagai pedagang dalam hal ini penjual ikan. Hal ini mempertegas bahwa laut masih menjadi ranah kerja laki – laki dan darat adalah ranah kerja perempuan. Kegiatan utama laki – laki adalah mencari ikan, sedangkan perempuan mengolah dan menjual hasil tangkapan tersebut.

Menurut Kusnadi (2001), secara umum, dalam masyarakat nelayan Pesisir perempuan memegang peranan yang amat penting untuk ikut serta menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya. Selain harus bertanggung jawab terhadap urusan domestik atau rumah tangga, mereka juga harus membantu tugas atau pekerjaan suami dan terlibat aktif mencari nafkah untuk menopang pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Keterlibatan para istri ini dapat mengurangi beban pekerjaan suami atau paling tidak memudahkan rumah tangga dalam mengatasi kesulitan – kesulitan hidup yang dihadapi setiap saat. Peranan perempuan istri nelayan yang paling umum di Pesisir dalam membantu pekerjaan suami setelah datang dari melaut adalah menjualkan hasil tangkapan ikan yang diperoleh suami.

Selain berperan di ranah publik, peran domestik tak pernah ditinggalkan oleh perempuan. Peran domestik perempuan dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai istri dan ibu dari anak – anaknya. Pekerjaan – pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya adalah pekerjaan – pekerjaan di seputar rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, dan menyiapkan bekal suami untuk melaut. Meskipun terkadang suami ikut membantu tetapi posisi suami dalam tanggung jawab

domestik ini bersifat membantu. Peranan domestik adalah kewajiban pertama dari perempuan.

Sedangkan menurut Kusnadi (2001), kewajiban kedua yang harus dijalani perempuan adalah peran produktif. Peran produktif adalah peran perempuan untuk memperoleh penghasilan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari – hari. Usaha yang dilakukan perempuan pesisir untuk mendapatkan pendapatan ekonomi adalah dengan jalan menjualkan hasil tangkapan suami, bekerja pada orang lain, memiliki usaha sendiri (memiliki warung/toko), pedagang perantara. Kegiatan perdagangan ikan merupakan pekerjaan yang banyak ditekuni oleh istri – istri nelayan. Perempuan pesisir merupakan “penguasa ekonomi darat”.

Melihat fenomena tersebut, bisa diketahui bahwa perempuan memiliki beban ganda, dimana mereka harus berperan di ranah reproduktif dan produktif. Beban ganda ini muncul pada kondisi dimana peran publik dan produktif telah dibebankan kepada laki – laki dan perempuan, sedangkan peran reproduktif (domestik) hanya dibebankan kepada perempuan saja. Bagi golongan kelas kaya, beban kerja ini dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga yang notabene-nya adalah perempuan juga. Mereka inilah yang sesungguhnya yang menjadi korban dari bias gender di masyarakat. Mereka bekerja berat, tetapi tidak pernah perlindungan dan kebijakan negara. Selain itu, hubungan mereka bersifat feodalistik dan perbudakan, serta masalahnya belum bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat luas. Beban ganda ini bisa diminimalisir jika laki – laki juga ikut berperan di ranah reproduktif (domestik), sehingga beban perempuan menjadi lebih ringan.

Selain kedua peran tersebut perempuan di sekitar PPP Mayangan juga memiliki peran sosial di masyarakat. Hal ini bisa dilihat perempuan disana sering mengikuti kegiatan arisan, pengajian walaupun hanya sebatas untuk menyambung tali silaturahmi antar warga sekitar. Padahal jika dilihat lagi, dengan masuknya perempuan

dalam pranata – pranata tersebut, perempuan berpartisipasi mengelola sumberdaya sosial ekonomi masyarakat yang suatu saat dapat dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan rumah tangga, seperti ketika penghasilan dari melaut menurun, didera sakit, biaya untuk hajatan keluarga, memenuhi kebutuhan anak sekolah, dan kebutuhan mendadak lainnya.

Ketiga jenis tanggung jawab atau peran tersebut (domestik/ reproduktif, produktif, dan sosial) telah menempatkan posisi sosial dan peranan ekonomi perempuan pesisir yang cukup kuat dan mendominasi, baik pada tataran rumah tangga maupun tataran masyarakat. Pada tataran rumah tangga, perempuan menjadi “salah satu tiang ekonomi” rumah tangga, sejajar dengan suami mereka. Hubungan fungsional suami – istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga bersifat saling melengkapi. Istri mengontrol dan mengatur keuangan dari rumah tangga mereka.

4.2.2 Profil Akses dan Kontrol

Sumberdaya yang biasanya dikontrol dan diakses oleh masyarakat sekitar PPP Mayangan antara lain tanah, peralatan (kapal, alat tangkap, kendaraan pribadi), uang (pribadi dan pinjaman). Dari 17 responden perempuan, hanya 23,50% yang memiliki kontrol atas tanah dan rumah. Hal itu terjadi karena mereka adalah janda yang sudah ditinggal suaminya meninggal dunia. Setelah mereka menikah, biasanya mereka memiliki rumah dan tanah. Surat – surat kepemilikan atas tanah dan rumah tersebut selalu di atas namakan suami (laki-laki). Dengan demikian laki – laki (suami) memiliki kontrol atau kuasa atas tanah dan rumah tersebut. Sehingga laki-laki bisa melakukan apa saja terhadap tanah dan rumah tersebut. Suami memiliki hak dan wewenang untuk menggunakan lahan tersebut, apakah akan digunakan sebagai lahan pertanian, dijual, disewakan atau diberikan kepada orang lain. Sedangkan perempuan (istri) hanya

memiliki akses terhadap rumah dan tanah tersebut. Sedangkan dari 12 responden laki-laki 100% memiliki kontrol atas tanah dan rumah yang mereka miliki.

Akses adalah berapa besar peluang atau kesempatan yang diberikan kepada laki – laki dan perempuan untuk memanfaatkan sumberdaya alam atau faktor produksi. Sedangkan kontrol atau kuasa adalah kemampuan untuk menguasai dan menentukan berbagai hal, dalam hal ini sumberdaya ataupun faktor produksi. Apabila seseorang mengontrol sesuatu artinya orang tersebut berhak melakukan apa saja terhadap sesuatu yang dikontrol/ dikuasainya. Orang tersebut dapat menjualnya, menghancurkannya, meminjamkannya, memberikan peluang (akses), menutup peluang, memerintahkan, atau apapun yang dapat ia lakukan atas segala yang dikuasainya. Untuk akses terhadap tanah dan rumah, perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama, sehingga dalam hal ini tidak ada masalah yang berarti.

Karena Masyarakat sekitar PPP Mayangan sebagian besar adalah nelayan, maka sumberdaya lain yang biasanya dikontrol dan diakses oleh masyarakat adalah peralatan seperti kapal, alat tangkap, dan kendaraan pribadi. Laki – laki mendominasi kontrol dan akses atas kapal dan alat tangkap. Karena kapal dan alat tangkap tersebut adalah peralatan mereka ketika mencari ikan/ melaut. Dari 6 responden laki-laki yang berprofesi sebagai nelayan, setengah dari responden tersebut memiliki kontrol atas kapal mereka. Sedangkan sisanya hanya memiliki akses saja. Hal ini terjadi karena 3 nelayan yang menjadi responden berprofesi sebagai nelayan ABK sehingga mereka (nelayan ABK) tidak memiliki kontrol atas kapal tersebut. Tetapi kontrol atas kapal berada di tangan juragan darat. Surat – surat kepemilikan atas kapal dan alat tangkap tersebut atas nama juragan darat (laki-laki). Perempuan juga tidak memiliki akses terhadap kapal dan alat tangkap tersebut. karena selama ini kapal dan alat tangkap tersebut hanya digunakan oleh nelayan yang *notabene*-nya adalah laki – laki semua. Untuk kendaraan pribadi seperti sepeda motor ataupun kendaraan roda

empat, perempuan hanya memiliki akses saja. Untuk kontrol tetap berada di tangan suami mereka. Perempuan bisa menggunakan kendaraan pribadi tersebut, tetapi untuk mengontrol atau menguasai mereka tidak mempunyai hak. Sehingga jika mereka (perempuan) membutuhkan uang dan ingin meminjam uang di bank atau menjual kendaraan tersebut, mereka tidak bisa langsung menjadikan kendaraan tersebut sebagai barang agunan atau langsung menjualnya. Karena surat – surat dari kendaraan tersebut di atasnamakan suami mereka. Sehingga mereka harus meminta persetujuan dari suami mereka dulu untuk menjual atau menjadikan barang tersebut sebagai agunan di bank.

Dalam kehidupan masyarakat sekitar PPP Mayangan, uang yang mereka miliki berasal dari uang hasil bekerja (uang pribadi) dan uang hasil dari pinjaman, entah itu pinjam di lembaga peminjaman yang formal ataupun nonformal, atau pinjaman dari individu/perorangan. Laki – laki selalu memiliki kontrol dan akses terhadap uang hasil kerja mereka. Untuk perempuan yang bekerja, mereka memiliki kontrol dan akses terhadap uang hasil kerja mereka. Jadi mereka bisa menggunakan uang hasil kerja mereka untuk apa saja. Misalnya untuk membeli peralatan *make up*, baju, keperluan anak, dan lain sebagainya. Tetapi dari responden yang diwawancarai, rata – rata mereka bekerja untuk membantu suami mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengingat hasil dari nelayan sangat tidak pasti. Sehingga uang hasil kerja mereka sebagian besar digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari mereka. Sedangkan jika perempuan tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga saja, mereka hanya memiliki akses saja terhadap uang hasil kerja suaminya. Ini juga berlaku untuk uang pinjaman. Jika perempuan yang meminjam uang maka ia memiliki akses dan kontrol terhadap uang tersebut, biasanya yang meminjam ini adalah perempuan yang memiliki pekerjaan sendiri, seperti pedagang ikan atau yang lainnya. Jika suami

yang melakukan peminjaman maka yang memiliki kontrol hanya suami saja, dan perempuan hanya memiliki akses terhadap uang tersebut.

Tabel 11. akses dan kontrol masyarakat sekitar PPP Mayangan terhadap sumberdaya

no	sumberdaya	Lk				Pr			
		Akses		Kontrol		Akses		Kontrol	
1.	tanah	12 responden	100%	12 responden	100%	17 responden	100%	4 responden	23,50%
2.	peralatan								
	a. kapal	7 responden	58,30%	3 responden	25%	0 responden	0%	0 responden	0%
	b. alat tangkap	7 responden	58,30%	3 responden	25%	0 responden	0%	0 responden	0%
	c. kendaraan pribadi	10 responden	83,30%	10 responden	83,30%	5 responden	29,40%	0 responden	0%
3.	uang								
	a. pribadi	12 responden	100%	12 responden	100%	17 responden	100%	14 responden	82,30%
	b. pinjaman	12 responden	100%	12 responden	100%	17 responden	100%	14 responden	82,30%

Ket:

n (total responden) laki-laki :12 orang

n (total responden) perempuan : 17 orang

Untuk meningkatkan akses dan kontrol dari perempuan terhadap sumberdaya tersebut, maka kualitas SDM dari perempuan harus ditingkatkan. Misalnya dengan mengadakan pelatihan – pelatihan mengenai keterampilan – keterampilan yang nantinya bisa digunakan sebagai modal bagi perempuan untuk mengembangkan diri.

Selain itu kesadaran akan pentingnya pendidikan juga harus diterapkan kepada para perempuan. Sehingga mereka akan lebih memperhatikan tingkat pendidikan mereka dan anak – anak mereka. Dengan modal keterampilan dan pendidikan yang bagus maka perempuan bisa mengembangkan diri, dalam hal ini bisa bekerja di ranah produktif, dan menghasilkan pendapatan sendiri. Dengan mempunyai pendapatan sendiri mereka bisa memiliki kontrol terhadap sumberdaya tersebut, karena sumberdaya tersebut adalah hasil dari pembelian perempuan sendiri.

4.3 Profil gender aktivitas dalam pembangunan PPP Mayangan

Proses pembangunan PPP Mayangan sebagian besar didominasi oleh laki- laki. Perempuan hanya memiliki peran dalam perencanaan pembangunan, pengupahan, pembukuan, dan pengelolaan dari PPP Mayangan. Perencanaan pembangunan PPP Mayangan tersebut dilakukan sekitar tahun 1999 – 2000. Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun Pelabuhan Perikanan sendiri yang sebelumnya kegiatan perikanan ikut di pelabuhan niaga Tanjung Tembaga. Selama ini para nelayan di Kota Probolinggo melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapannya di Pelabuhan Tanjung Tembaga milik Pelindo III. Hal ini mengakibatkan tidak efisiennya dalam hal pemasaran, pemrosesan hasil tangkapan dan aktivitas lainnya dari nelayan karena sarana di Pelabuhan Tanjung Tembaga memang tidak disediakan untuk pelabuhan perikanan. Selain itu kondisi sandar kapal-kapal nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga sudah tidak memenuhi syarat keamanan karena rawan terhadap bahaya kebakaran, dan hal ini sering terjadi. Karena alasan tersebut Bapeda Kota Probolinggo membawa isu tersebut dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota dan usulan tentang pembangunan Pelabuhan Perikanan tersebut disambut baik oleh pemerintah Kota Probolinggo. Peserta dari Musrenbang yang diadakan

tersebut antara lain semua *stakeholder* pemerintah kota, LSM, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi – organisasi perempuan (Dharma wanita, PKK dll), pihak legislatif dan masih banyak lagi. Dari *stakeholder* – *stakeholder* tersebut pasti ada keterlibatan dari perempuan. Meskipun tidak begitu terlihat secara pasti jumlah dan peran dari perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut, tetapi kehadiran perempuan dalam Musrenbang tersebut sudah menunjukkan bahwa di Kota Probolinggo dalam melakukan kegiatan pembangunan tidak membeda – bedakan gender atau tidak bias gender. Pada saat itu (tahun 1999-2000), jumlah perempuan yang aktif di pemerintahan, legislatif dan organisasi – organisasi masih sedikit sehingga dalam perencanaan Musrenbang tersebut yang lebih banyak terlibat dan berperan adalah laki – laki. Dari gambar 5 bisa diketahui bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan PPP Mayangan yaitu pada acara koordinasi pengelolaan PPP Mayangan yang terlibat hampir semuanya laki-laki.

Setelah dilakukan pembahasan dalam Musrenbang tingkat kota, maka usulan tersebut diajukan kepada pemerintah Kota Probolinggo dan oleh pemerintah Kota Probolinggo diajukan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Oleh pemerintah Propinsi langsung dilimpahkan kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Perikanan Dan Kelautan (DPK) Propinsi Jawa Timur. Pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan antara lain : Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Propinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT) Jakarta, konsultan perencana dan pengawas, rekanan pelaksana pembangunan (pihak swasta).



Gambar 5. Acara koordinasi pengelolaan PPP Mayangan (sumber : DKP Kota Probolinggo, 2009)

Pembangunan fisik Pelabuhan Perikanan Mayangan dimulai tahun 2000. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik tersebut pihak pemerintah menggunakan jasa kontraktor, dan dalam kontraktor tersebut semua yang berperan adalah laki – laki. Sehingga untuk pengaturan pekerjaan, pembelian bahan – bahan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan semua dilakukan oleh laki – laki (hal tersebut bisa dilihat dari gambar 6 dan 7). Pimpinan dari setiap CV ataupun PT yang menjadi kontraktor dalam pembangunan Pelabuhan tersebut adalah laki – laki semua, dan hal tersebut berpengaruh terhadap siapa yang melakukan pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan pembangunan pun (dalam hal ini pekerja proyek) tidak ada keterlibatan kaum perempuan samasekali. Hal ini terjadi karena dalam kegiatan pembangunan fisik memerlukan keterampilan khusus yaitu pertukangan dan itu selama ini dikuasai oleh laki – laki. Selain itu kegiatan pertukangan (tukang bangunan) memerlukan tenaga yang besar dan itu dimiliki oleh laki – laki, sehingga sampai saat ini tukang bangunan masih didominasi oleh kaum laki – laki saja.



**Gambar 6. Proses pembangunan PPP Mayangan
(Sumber : DKP Kota Probolinggo, 2006)**



**Gambar 7. Proses pembangunan PPP Mayangan
(Sumber : DKP Kota Probolinggo, 2006)**

Dalam proses pembangunan PPP Mayangan peran perempuan yang paling banyak adalah dalam pembukuan. Pembukuan disini memiliki arti semua proses yang berkaitan dengan kesekretariatan dan keuangan (bendahara), seperti surat – menyurat,

pembuatan proposal, tugas – tugas kesekretariatan yang lain, dan pengaturan keuangan. Dalam proyek pembangunan pelabuhan tersebut biasanya di setiap kontraktor memiliki sekretaris yang selalu perempuan. Karena perempuan memiliki sifat telaten, teliti, tekun, rapi sehingga pekerjaan tersebut selalu dilimpahkan kepada perempuan. Menurut Sudiman Kepala Bidang PSDK DKP Kota Probolinggo, bahwa dalam pembangunan pelabuhan juga memerlukan perempuan, karena ada pekerjaan – pekerjaan tertentu yang membutuhkan peran serta dari perempuan. Karena perempuan memiliki ketelitian, keuletan, dan juga pelabuhan membutuhkan sentuhan perempuan terhadap tatanan dan kebersihan.

Perempuan juga memiliki peran dalam pengelolaan PPP Mayangan. Hal ini bisa dilihat dari pegawai Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPPP) Mayangan dan pegawai TPI yang ada di PPP Mayangan. Di BPPPP Mayangan dari 15 pegawai yang ada, terdapat 2 orang pegawai perempuan, yaitu sebagai Koordinator Tata Usaha dan staf administrasi. Sedangkan koordinator Pelayanan Teknis dan Koordinator Kesyahbandaran dipegang oleh laki – laki. Demikian juga dengan petugas penjaga portal atau pintu masuk pelabuhan, semuanya adalah laki – laki. Menurut Nonot Wijayanto, S.Pi Koordinator BPPPP Mayangan Probolinggo, untuk pegawai BPPPP Mayangan sendiri tidak ada perbedaan gender, tetapi untuk mengantisipasi adanya hal – hal yang tidak diinginkan terutama jika melihat tipikal dari nelayan, sehingga pembagian kerja disesuaikan dengan kondisi yang ada. Selain itu penempatan – penempatan dari setiap pegawai juga disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya. Dan idealnya saat ini BPPPP Mayangan masih membutuhkan banyak tenaga baik laki – laki maupun perempuan. Jika ada rapat koordinasi yang berkaitan dengan kebijakan terhadap pengelolaan BPPPP Mayangan semua pegawai diikutsertakan, tidak ada pembedaan gender. Sehingga tidak ada pengurangan dalam transfer informasi terhadap pegawai. Di TPI yang ada di PPP Mayangan juga masih

ada keterlibatan dari perempuan. Dari 31 pegawai 5 orang diantaranya adalah perempuan. Mereka semua berperan dalam administrasi kantor. Untuk pekerjaan penimbangan ikan, kebersihan, dan pencatatan terhadap ikan yang dijual di TPI dilakukan oleh pegawai laki – laki. Pekerjaan penimbangan ikan dilakukan oleh laki – laki karena pekerjaan tersebut dirasa berat dan membutuhkan fisik yang kuat sehingga hanya bisa dilakukan oleh laki –laki.

4.4 Akses dan Kontrol pada Sumberdaya hasil dari Kegiatan Pembangunan PPP Mayangan

Manfaat dari hasil pembangunan PPP Mayangan seharusnya bisa bermanfaat bagi semua masyarakat baik laki – laki maupun perempuan. Laki – laki dan perempuan bisa mengakses PPP Mayangan dengan bebas tanpa dibeda – bedakan. Pas masuk / tiket untuk orang sebesar Rp 200,00; sepeda motor Rp 500,00; mobil Rp 1.000,00; truk Rp 1.500,00. Disini masyarakat umum baik itu laki – laki maupun perempuan tidak memiliki kontrol atas PPP Mayangan, karena PPP Mayangan adalah fasilitas umum dimana kontrol atau penguasaan ada di tangan pemerintah. Peralatan – peralatan yang ada dan disediakan di PPP Mayangan antara lain kapal / armada, alat tangkap, box ikan/ drum, keranjang ikan. Laki – laki bisa mengakses semua peralatan tersebut, Selain itu laki –laki memiliki kontrol atas kapal / armada dan alat tangkap. Karena kapal / armada dan alat tangkap adalah peralatan wajib bagi nelayan. Sehingga nelayan yang *notabene*-nya adalah laki –laki memiliki kontrol dan akses yang sangat besar terhadap peralatan tersebut. Sedangkan perempuan hanya memiliki akses terhadap keranjang ikan. Biasanya perempuan yang menjual ikan di PPP Mayangan memanfaatkan keranjang yang disewakan oleh TPI sebagai tempat ikan hasil tangkapan sebelum dijual di pasar. Karena peralatan – peralatan seperti box ikan / drum dan keranjang ikan adalah peralatan yang disewakan oleh pihak TPI maka

masyarakat tidak memiliki kontrol atas peralatan tersebut. Kontrol dari alat – alat tersebut berada di tangan TPI.

Fasilitas – fasilitas yang terdapat di PPP Mayangan seharusnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Fasilitas yang ada di PPP Mayangan yang bisa digunakan oleh masyarakat antara lain TPI, gudang es dan garam, kantor pelabuhan, kantor kamladu, toilet, SPDN, warung nelayan, koperasi/ kredit usaha, dan pasar ikan. Laki –laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas TPI, hal ini berarti laki-laki dan perempuan bisa memanfaatkan TPI sebagai tempat pelelangan ikan tanpa dibatasi oleh jenis kelamin. Justru yang lebih banyak melakukan kegiatan di TPI adalah perempuan yang berprofesi sebagai penjual ikan, *pengamba'*, *mlijo*. Karena mereka melakukan kegiatan jual beli ikan di TPI tersebut. Gudang es dan garam bisa diakses oleh laki – laki dan perempuan. Tetapi yang memiliki kuasa atau kontrol adalah laki – laki, karena gudang es dan garam ini adalah fasilitas yang disewakan oleh pihak PPP Mayangan. Kebanyakan penyewa adalah kepala rumah tangga yaitu laki – laki, sehingga dengan begitu laki – laki lebih memiliki kuasa atau kontrol atas gudang tersebut daripada istrinya. Untuk kantor pelabuhan dan kantor kamladu laki –laki dan perempuan memiliki akses yang sama, karena kedua kantor tersebut merupakan fasilitas yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga semua masyarakat baik laki –laki maupun perempuan memiliki hak untuk mengakses kantor tersebut. Pelayanan yang dilakukan oleh kantor pelabuhan antara lain pelayanan sewa lahan / bangunan, pelayanan pas masuk wilayah PPP Mayangan, pelayanan tambat labuh, pelayanan Surat Ijin Berlayar (SIB). Sedangkan kantor kamladu melayani segala sesuatu yang bersangkutan dengan keamanan di PPP Mayangan. Begitu juga dengan toilet umum, karena disetiap tempat umum keberadaan dari toilet sangatlah penting. Di PPP Mayangan ada 4 unit toilet umum, 2 unit untuk laki- laki dan 2 unit untuk perempuan. Keadaan dari toilet sudah

sangat memadai dan bersih. Sehingga tidak akan berakibat buruk terhadap kesehatan terutama bagi kesehatan reproduksi perempuan. Air yang digunakan juga berasal dari PDAM, sehingga bisa dijamin kebersihannya.

Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) merupakan stasiun penyuplai bahan bakar untuk kapal – kapal nelayan dalam hal ini kapal – kapal kecil (<10 GT). Dengan demikian yang biasanya mengakses SPDN tersebut adalah nelayan (laki – laki), karena yang membutuhkan SPDN tersebut hanyalah nelayan, perempuan tidak membutuhkan SPDN tersebut. Warung nelayan merupakan fasilitas yang memiliki manfaat terhadap masyarakat terutama nelayan di sekitar PPP Mayangan. Bukan hanya bermanfaat dalam menyediakan makanan dan minuman buat nelayan yang pulang dari melaut, tetapi juga sebagai mata pencaharian dan sumber pendapatan bagi nelayan yang memiliki warung tersebut. Laki – laki dan perempuan bisa mengakses keberadaan dari warung nelayan tersebut, dan juga memiliki kuasa atau kontrol yang sama terhadap warung nelayan tersebut. Perempuan bisa memiliki kuasa terhadap warung nelayan karena ada sebagian perempuan yang memang memiliki warung tersebut atas nama perempuan itu sendiri, bukan atas nama suaminya, sehingga bisa memiliki kontrol terhadap warung tersebut.

Di dalam PPP Mayangan juga terdapat lembaga koperasi, yaitu Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Koperasi ini merupakan koperasi milik yayasan pondok pesantren Sidogiri yang membuka cabang di PPP Mayangan. Koperasi tersebut merupakan koperasi yang melayani simpan pinjam kepada nelayan, terutama para pedagang ikan. Sampai saat ini sudah tercatat 100 orang anggota dari koperasi UGT Sidogiri tersebut. Dalam proses peminjaman tidak ada perbedaan antara laki – laki dan perempuan. Justru sebagian besar anggotanya adalah kaum perempuan yang berjualan ikan / pedagang ikan di pasar yang ada di pelabuhan. Rata – rata mereka pinjam uang untuk modal berdagang/ berjualan ikan. Syarat untuk menjadi

anggota tidaklah sulit, cukup menyetorkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, dan simpanan pokoknya hanya Rp 10.000,00. Alasan dari pengelola koperasi menetapkan simpanan pokok hanya Rp 10.000,00 adalah karena anggota dari koperasi tersebut adalah nelayan yang tingkat ekonominya masih rendah, jika menggunakan simpanan pokok lebih besar pasti nelayan dan pedagang kecil akan terbebani dan tidak mau menjadi anggota koperasi. Mengingat tujuan dari koperasi UGT Sidogiri adalah bisa mengangkat pedagang – pedagang kecil terutama yang ada di sekitar PPP Mayangan.

Pasar ikan yang ada di PPP Mayangan merupakan pasar yang didirikan atas permintaan dari para nelayan dan pedagang ikan. Karena di dalam master plan pelabuhan tidak ada lokasi untuk pasar ikan di dalam PPP Mayangan. Tetapi masyarakat nelayan memiliki alasan yang kuat untuk meminta pihak pelabuhan untuk menyediakan lahan yang akan digunakan sebagai pasar kepada para pedagang ikan. Alasan para nelayan adalah ikan hasil tangkapan mereka harus langsung dijual karena jika tidak maka akan menyebabkan ikan rusak dan tidak segar lagi sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap pendapatan dari nelayan tersebut. Selain itu, jika tidak ada pasar di pelabuhan maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap pekerjaan dari sang istri, karena pedagang ikan, dan bakul – bakul tersebut sebagian besar adalah istri dari nelayan. Ketika masih di Pelabuhan Tanjung Tembaga istri mereka bisa menjual ikan hasil tangkapan suaminya di pelabuhan itu juga. Pelabuhan dan pasar adalah satu paket, sehingga supaya nelayan mau berpindah tempat dari pelabuhan Tanjung Tembaga maka pasar ikan di pelabuhan yang lama juga harus dipindahkan. Tetapi pemerintah (DKP) hanya memberikan lahan saja, untuk fasilitas dan sebagainya dikelola sendiri oleh pedagang, yaitu oleh Aliansi Pedagang Ikan (ALPIN). Pada tahun 2011 rencananya Pemerintah Kota Probolinggo akan membangun pasar ikan di dekat PPP Mayangan tetapi bukan di dalam PPP Mayangan melainkan di luar lokasi PPP Mayangan, jadi pasar yang ada

sekarang hanya bersifat sementara. Tetapi meskipun demikian pasar yang ada sekarang sangat bermanfaat bagi para nelayan terutama bagi istri nelayan, karena mereka bisa menjual hasil tangkapan dari suaminya di pasar tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perempuan memiliki akses yang besar terhadap pasar tersebut. Untuk kontrol atas pasar tersebut berada di tangan pengurus ALPIN. Sehingga perempuan yang berdagang disitu tidak memiliki kontrol atas stan yang disewa di pasar tersebut.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



4.5 Konsep pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan yang dilakukan selama ini

Tabel 12. Peran laki –laki dan perempuan dalam pembangunan PPP Mayangan

No	Proyek (pembangunan PPP Mayangan)	Lk	Pr	Peran (Reproduksi, produksi, kemasyarakatan)
1.	Perencanaan	✓	✓	Lk: pengusulan pembangunan, pembuatan master plan, penyusunan anggaran, pencarian kontraktor (Produksi & kemasyarakatan) Pr: konsumsi, penataan ruang buat rapat dll, (reproduksi), rapat perencanaan, tapi hanya sedikit, mengatur administrasi (produktif)
2.	Pengaturan pekerjaan	✓		Lk : pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan fisik (produksi)
3.	Pembelian bahan	✓		Lk : pembelian bahan – bahan pembangunan (produksi)
4.	Pengupahan pekerja	✓	✓	Lk: penentu besarnya upah (produksi) Pr: pencatatan tentang keuangan, keluar masuknya uang (produksi)
5.	Pelaksanaan pembangunan fisik	✓		Lk: semua kegiatan pembangunan fisik (produksi)
6.	Pengambilan keputusan	✓		Lk : mengambil keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, anggaran, dan pelaksana dari pembangunan (produksi)
7.	Pembukuan	✓	✓	Lk: sedikit banyak mengatur masalah administrasi dari pembangunan pelabuhan (produksi) Pr: mengatur sebagian besar masalah administrasi dan keuangan (produksi)
8.	Pengawasan pekerjaan	✓		Lk: mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan proyek yang dilakukan (produksi)
9.	Pengelolaan pelabuhan	✓	✓	Lk: perencana, pengelola, pembuat keputusan, pelaksanaan, & pengawasan terhadap segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan (produksi) Pr: bagian administrasi (produksi)

Beberapa pendekatan pembangunan yang dipakai untuk menjawab ketimpangan gender antara lain pendekatan WID (*Women in Development*), WAD (*Women and Development*), dan GAD (*Gender and Development*). Berdasarkan tabel di atas, bisa diketahui dimana peran, posisi perempuan dan laki – laki dalam pembangunan khususnya pembangunan PPP Mayangan.

Di dalam tahap perencanaan, laki – laki lebih banyak berperan terutama dalam ranah produktif dan kemasyarakatan. Misalnya dalam penyusunan master plan dari pelabuhan, penyusunan anggaran, dan pencarian kontraktor untuk proses pembangunan fisik. Sedangkan perempuan hanya terlibat sedikit di dalam peran produktif, seperti pada bagian administrasi dan keuangan. Selebihnya mereka lebih banyak berperan di reproduktif, yaitu seperti sebagai seksi konsumsi dan penerima tamu dalam rapat – rapat yang diadakan untuk membahas perencanaan pembangunan PPP Mayangan tersebut (seperti yang ditunjukkan pada gambar 8).



**Gambar 8. Acara koordinasi pengelolaan PPP Mayangan
(sumber : DKP Kota Probolinggo, 2009)**

Di dalam tahap pengaturan pekerjaan, pembelian bahan, pelaksanaan pembangunan fisik, pengambilan keputusan, dan pengawasan pekerjaan, yang paling dominan berperan adalah laki laki. Karena mereka memiliki peran yang sangat dominan, maka semua kegiatan produksi di dalam tahap tersebut dilakukan oleh laki – laki semua (seperti pada gambar 9).



**Gambar 9. Proses pembangunan PPP Mayangan
(Sumber : DKP Kota Probolinggo, 2006)**

Sedangkan perempuan hanya berperan di dalam tahap pembukuan dan pengelolaan, yang di dalamnya tercakup kegiatan – kegiatan seperti administrasi, dan keuangan. Berdasarkan analisa tabel di atas bisa disimpulkan bahwa yang lebih banyak berperan dalam kegiatan produktif adalah laki – laki dan perempuan hanya sedikit sekali berperan di ranah produktif. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa konsep pembangunan PPP Mayangan masih berparadigma WID (*Women In Development*). Dimana dalam pendekatan WID, perempuan hanya diposisikan sebagai obyek di dalam pembangunan, dan hanya menerima program – program hasil kebijakan dari pemerintah. Perempuan tidak begitu dilibatkan dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan tentang hal –hal yang berkaitan dengan pembangunan PPP Mayangan. Padahal jika dianalisis lebih mendalam, maka konsep pembangunan yang berparadigma WID sangat merugikan perempuan. Hal ini bisa dilihat dari contoh kecil dari fasilitas yang ada di PPP Mayangan, yang tidak memperhatikan kebutuhan perempuan.

Salah satu contoh bahwa di PPP Mayangan Probolinggo masih menerapkan konsep pembangunan yang berparadigma WID adalah pemberian fasilitas keranjang ikan (gambar 10). Yang sering menggunakan keranjang ikan tersebut adalah para wanita istri nelayan yang menjual ikan di pasar pelabuhan tersebut. Keranjang tersebut digunakan untuk mengangkat ikan dari kapal atau dari TPI menuju pasar ikan. Keranjang tersebut berkapasitas kurang lebih 55 kg.



Gambar 10. Keranjang ikan (fasilitas di pelabuhan)

Jika perempuan mengangkat keranjang tersebut pasti akan sangat kesulitan. Dari **segi fisik**, perempuan sangat sulit untuk membawa keranjang tersebut, apalagi harus ditambah dengan berat ikan 55 kg tersebut. Dari **segi kesehatan**, sangat tidak baik jika perempuan mengangkat beban seberat itu tanpa alat bantuan, Hal tersebut bisa mengganggu kesehatan reproduksi dari perempuan tersebut. Dari **segi ekonomi**, jika mengangkut ikan dengan menggunakan keranjang tersebut tanpa menggunakan

alat bantuan, maka akan mengeluarkan biaya yang berlebih, yang nantinya jika dihitung bisa menyebabkan perempuan tersebut rugi. Meskipun biaya tersebut termasuk biaya tidak langsung, misalnya biaya untuk membayar tukang pijat atau dokter karena kesehatan dari perempuan tersebut sudah terganggu akibat membawa beban berat tersebut.

Dari **segi waktu**, jika perempuan menggunakan keranjang tersebut untuk mengangkut ikan dari TPI ke pasar ikan, maka akan membuang waktu perempuan tersebut meskipun hanya beberapa menit. Hal ini terjadi karena untuk mengangkut ikan di dalam keranjang tanpa alat bantuan memerlukan waktu yang lama karena perempuan tersebut harus hati-hati ketika membawa keranjang tersebut. Dari **sisi tenaga**, pastinya perempuan sudah sangat dirugikan. Mereka akan mengeluarkan banyak tenaga hanya untuk mengangkut ikan tersebut.

Fasilitas keranjang yang biasanya banyak digunakan oleh perempuan penjual ikan di pelabuhan tersebut bisa didesain sedemikian rupa sehingga perempuan tidak akan kesulitan membawa keranjang tersebut dan tidak akan merugikan pihak perempuan baik dari kesehatan, waktu, biaya dan tenaga dari perempuan. Atau bisa juga memberikan fasilitas kereta dorong agar bisa digunakan untuk membantu memperingan dan mempermudah perempuan membawa keranjang tersebut. seperti yang terlihat pada gambar 11. Selama ini perempuan para penjual ikan tersebut yang berinisiatif untuk membawa alat bantu agar mempermudah dan memperingan mereka ketika membawa keranjang tersebut. Jika dalam proses pembangunan pelabuhan tersebut melibatkan perempuan dalam perencanaan, maka hal ini tidak akan terjadi. Sehingga perempuan akan merasakan manfaat dari hasil pembangunan tersebut.



Gambar 11. Alat bantu untuk mengangkut keranjang

Selain itu untuk menguatkan bahwa konsep pembangunan yang digunakan masih berparadigma WID bisa dilihat dari kebutuhan gender yang sudah dipenuhi dari pembangunan tersebut. Di dalam pembangunan PPP Mayangan tersebut, tujuan yang akan dicapai sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan gender praktis, dan kebutuhan gender strategis masih belum terpenuhi sepenuhnya. Tujuan dari pembangunan PPP Mayangan yang masih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gender praktis antara lain: mendukung usaha penangkapan ikan di Pantai Utara Jawa Timur, meningkatkan produksi dan produktivitas usaha penangkapan ikan dan industri pengolahan ikan, meningkatkan usaha distribusi dan pemasaran hasil tangkap untuk lokal maupun ekspor, meningkatkan pendapatan nelayan, PAD Kota Probolinggo dan Propinsi Jawa Timur, pengembangan masyarakat nelayan, memperlancar kegiatan kapal perikanan, pendaratan ikan hasil tangkapan. Dari tujuan - tujuan pembangunan PPP tersebut, semuanya masih bentuk program jangka pendek dan langsung, berkaitan dengan kondisi hidup individu, dampak program/ tujuan masih terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan hasilnya bisa dilihat langsung, pada umumnya tidak mengubah peran tradisional atau hubungan antar jenis kelamin. Sedangkan tujuan dari pembangunan PPP Mayangan yang memenuhi kebutuhan

gender strategis adalah meningkatkan fungsi pembinaan terhadap masyarakat nelayan dan pangkalan – pangkalan pendaratan di sekitar kawasan pelabuhan, pelaksanaan penyuluhan, pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan. Dari ketiga tujuan tersebut bentuk programnya adalah program jangka panjang, sasaran program adalah laki-laki dan perempuan, dampak dari tujuan tersebut adalah kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan ataupun pelatihan, dan hasilnya tidak selalu terlihat secara langsung.

Jika dalam suatu pembangunan kebutuhan gender praktis dan kebutuhan gender strategis sudah terpenuhi maka pembangunan yang dilakukan sudah berparadigma WAD atau bahkan sudah GAD.



Tabel 13. kebutuhan gender praktis dan kebutuhan gender strategis yang terpenuhi dalam pembangunan PPP Mayangan

No	Tujuan pembangunan PPP Mayangan	KGP	KGS	Keterangan
1.	Mendukung usaha penangkapan ikan di Pantai Utara Jawa Timur		✓	Dari ketujuh tujuan pembangunan PPP tersebut, semuanya masih bentuk program jangka pendek dan langsung, berkaitan dengan kondisi hidup individu, dampak program/ tujuan masih terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan hasilnya bisa dilihat langsung, pada umumnya tidak mengubah peran tradisional atau hubungan antar jenis kelamin.
2.	Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha penangkapan ikan dan industri pengolahan ikan		✓	
3.	Meningkatkan usaha distribusi dan pemasaran hasil tangkap untuk lokal maupun ekspor		✓	
4.	Meningkatkan pendapatan nelayan, PAD Kota Probolinggo dan Propinsi Jawa Timur		✓	
5.	Pengembangan masyarakat nelayan		✓	
6.	Memperlancar kegiatan kapal perikanan		✓	
7.	Pendaratan ikan hasil tangkapan		✓	
8.	Meningkatkan fungsi pembinaan terhadap masyarakat nelayan dan pangkalan – pangkalan pendaratan di sekitar kawasan pelabuhan			Dari ketiga tujuan tersebut bentuk programnya adalah program jangka panjang, sasaran program adalah laki-laki dan perempuan, dampak dari tujuan tersebut adalah kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan ataupun pelatihan, dan hasilnya tidak selalu terlihat secara langsung.
9.	Pelaksanaan penyuluhan		✓	
10.	Pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan		✓	

4.6 Model Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo yang berparadigma GAD

Dalam suatu pembangunan, perempuan belum dapat berperan secara maksimal baik sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan. Hal ini terjadi karena selama ini perempuan hanya sebatas berperan di ranah domestik (reproduktif) saja, sehingga kurang diperhatikan dalam pengambilan kebijakan termasuk dalam kebijakan pembangunan. Begitu juga yang terjadi di dalam pembangunan PPP Mayangan, perempuan hanya sedikit sekali berperan dalam proses pembangunan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep pembangunan

PPP Mayangan masih berparadigma *Woman In Development* (WID). Dimana perempuan tidak begitu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan PPP Mayangan tersebut. Perempuan hanya sebagai objek (penerima), penikmat hasil dari pembangunan. Secara kasat mata dan dalam jangka pendek, hal tersebut tidak memiliki dampak yang sangat signifikan, bahkan bisa dikatakan pembangunan tersebut berdampak positif terhadap perempuan. Karena dengan adanya pembangunan PPP Mayangan tersebut, perempuan juga bisa menikmati hasilnya. PPP Mayangan dijadikan ladang atau tempat untuk mencari penghasilan bagi para perempuan dalam hal ini istri – istri nelayan dan perempuan sekitar PPP Mayangan. Istri – istri nelayan tersebut bisa menjual ikan hasil tangkapan suaminya di dalam pasar yang ada di PPP Mayangan. Selain itu sebagian perempuan yang tinggal di sekitar PPP Mayangan bisa berjualan makanan, minuman, jamu, ataupun membuka warung / toko di dalam maupun di sekitar PPP Mayangan, dengan demikian mereka bisa mencari dan membantu suaminya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Jika dilihat sekilas nampaknya perempuan menerima manfaat dari pembangunan PPP Mayangan tersebut. Tetapi jika ditelaah lebih mendalam dan dihubungkan dengan kebutuhan gender, maka pembangunan PPP Mayangan tersebut masih memenuhi kebutuhan gender praktis saja, belum memenuhi kebutuhan gender strategis. Konsep pembangunan dengan pendekatan WID memiliki kelemahan yaitu pada pendekatan ini tidak berhasil meningkatkan keberdayaan ekonomi dan sosial perempuan, dan agenda perempuan tetap terpinggirkan di tengah kebijakan dan prioritas utama pembangunan terutama di tingkat perencanaan.

Untuk itu agar pembangunan PPP Mayangan bisa lebih bermanfaat bagi semua pihak baik laki – laki dan perempuan dan terjadi kesetaraan gender dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka peneliti mencoba membuat suatu

model pembangunan khususnya pembangunan pelabuhan yang berparadigma *Gender And Development* (GAD).

Untuk mewujudkan pembangunan yang berparadigma GAD maka dalam proses pembangunan tersebut harus benar – benar dikaji terutama dari aspek kesetaraan gender. Karena tujuan GAD adalah menolong perempuan mengorganisasi diri di dalam perilaku efektif secara politik agar mereka bisa mengatasi struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menghambat dan membatasi hidup mereka. Tujuan akhir GAD adalah mencapai pergeseran hubungan kekuasaan yang akan memberikan perempuan otonomi lebih besar. Dalam pendekatan GAD mengangkat nilai peran reproduksi perempuan (melahirkan dan merawat), kerja berbayar dan kerja tak berbayar (ibu rumah tangga) yang memberikan manfaat pada rumah tangga maupun industri. Dan yang penting GAD mempertimbangan aspek umur, kelas, status perkawinan, suku, etnisitas, dan agama, GAD tidak melihat perempuan adalah semuanya sama. Pendekatan GAD lebih menekankan bagaimana hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan.

Model pembangunan PPP Mayangan yang ditawarkan oleh peneliti bisa dijelaskan sebagai berikut: dalam tahap awal sebelum diadakan pembangunan, selalu diawali oleh musyawarah terlebih dahulu dalam suatu forum yang biasa disebut Musrenbang (Musyawarah rencana pembangunan) yang biasanya diawali dari desa (musrenbangdes), kecamatan (musrenbangkec), kota/ kabupaten (musrenbangkota/kab), dan terakhir musrenbang tingkat nasional. Dalam proses musrenbang tersebut semua lapisan masyarakat harus diikutsertakan. Mulai dari perwakilan dari desa, kecamatan, organisasi – organisasi yang ada baik organisasi kewanitaan (Dharma wanita, PKK dll), LSM, pihak Perguruan Tinggi, birokrat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak legislatif, dan stakeholder –stakeholder yang lain. Tak

lupa kaum perempuan juga harus diikutsertakan, karena disinilah peran perempuan sangat dibutuhkan jika pembangunan tersebut akan menggunakan pendekatan GAD.

Dalam suatu perencanaan, perempuan dan laki – laki harus bekerjasama, sehingga dengan diikutsertakannya perempuan maka tujuan dari pembangunan yang berparadigma GAD akan terwujud. Dimana perempuan diposisikan sebagai subyek dan obyek dalam proses pembangunan yang senantiasa mengedepankan proses *bottom up* ketimbang *top down*.

Dalam suatu pembangunan, perencanaan dan penyusunan anggaran merupakan tahapan yang sangat strategis. Sebagai tahapan awal dalam pembangunan, perencanaan dan penyusunan anggaran menjadi dasar untuk menerjemahkan visi, misi dan komitmen pemerintah menjadi suatu rencana kerja yang nyata dan terukur. Rencana kerja dan anggaran merupakan acuan kerja sekaligus menjadi alat pengendalian dan evaluasi tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, maka proses perencanaan dan penganggaran harus mempertimbangkan kondisi kesetaraan gender dalam tahap penetapan skala prioritas. Perencanaan yang responsif gender merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara laki – laki dan perempuan. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan pihak perempuan maupun laki – laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalisasinya di lapangan.

Selama ini yang telah dilakukan dalam pembangunan PPP Mayangan anggaran yang ada digunakan untuk melakukan pembangunan fisik dari pelabuhan. Seharusnya

ada dana yang digunakan untuk pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar PPP Mayangan, baik laki – laki maupun perempuan. Misalnya dengan mengadakan program penyuluhan dan pelatihan terhadap nelayan dan istri – istri nelayan yang ada di PPP Mayangan tentang pengolahan hasil perikanan, sehingga mereka bisa mengolah ikan hasil tangkapan dari suaminya menjadi produk baru dan bisa memiliki nilai lebih. Karena selama ini mereka masih menjual hasil tangkapan suaminya dalam bentuk ikan segar. Dan jika waktu musim ikan melimpah, maka banyak ikan yang tidak laku dan mereka menderita kerugian. Padahal jika dilihat lagi di dalam PPP Mayangan tersebut sudah ada suatu kawasan atau zona untuk industri pengolahan. Dimana di dalam zona tersebut nantinya akan ditempati oleh mereka – mereka (nelayan atau siapapun) yang melakukan kegiatan pengolahan. Jika istri – istri nelayan tersebut memiliki keterampilan dalam pengolahan hasil tangkapan, mereka bisa memanfaatkan zona tersebut sebagai tempat usaha. Dan hal tersebut sangat memberikan manfaat kepada istri nelayan dan keluarganya karena pendapatan mereka bertambah. Dengan pendapatan nelayan bertambah maka tingkat kesejahteraan dari nelayan sekitar PPP Mayangan akan meningkat juga. Selain itu, dengan munculnya usaha – usaha baru meskipun masih dalam taraf usaha kecil menengah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo juga akan meningkat.

Pengadaan program pembinaan terhadap nelayan dan istrinya tentang pengembangan usaha, terutama usaha pemasaran hasil tangkap (ikan) juga akan sangat bermanfaat bagi istri – istri nelayan dan keluarga nelayan. Mereka diberi pengetahuan bagaimana mencari pasar ikan selain di PPP Mayangan, sehingga selain menjual hasil tangkapannya di PPP Mayangan, mereka bisa memperluas pasarnya hingga luar kota. Selama ini mereka hanya menjual ikan di dalam pasar yang ada di PPP Mayangan dan hanya sedikit yang menjual ke pabrik – pabrik pengolah ikan. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki wawasan atau pengetahuan tentang kondisi

dan keadaan pasar dan daerah – daerah mana saja yang sebenarnya berpotensi untuk menjadi pasar mereka.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan mungkin memang selama ini hanya dilakukan oleh laki – laki saja, karena melihat pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan fisik memang membutuhkan fisik yang kuat dan hal tersebut biasa dilakukan oleh laki – laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan perempuan masuk ke dalam ranah tersebut, tetapi bukan sebagai pelaksana di lapang, tetapi bisa sebagai pembuat desain dari pelabuhan tersebut. Dengan demikian fasilitas – fasilitas dan sarana yang dibangun juga memperhatikan kebutuhan perempuan. Contoh sederhanya fasilitas toilet. Dimana toilet ini sangat penting bagi perempuan dan kebersihan dari toilet harus benar – benar dijaga, karena kebersihan dari toilet akan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Dengan masuknya perempuan di dalam tim pembuat desain dari pelabuhan maka hal – hal tersebut bisa diantisipasi.

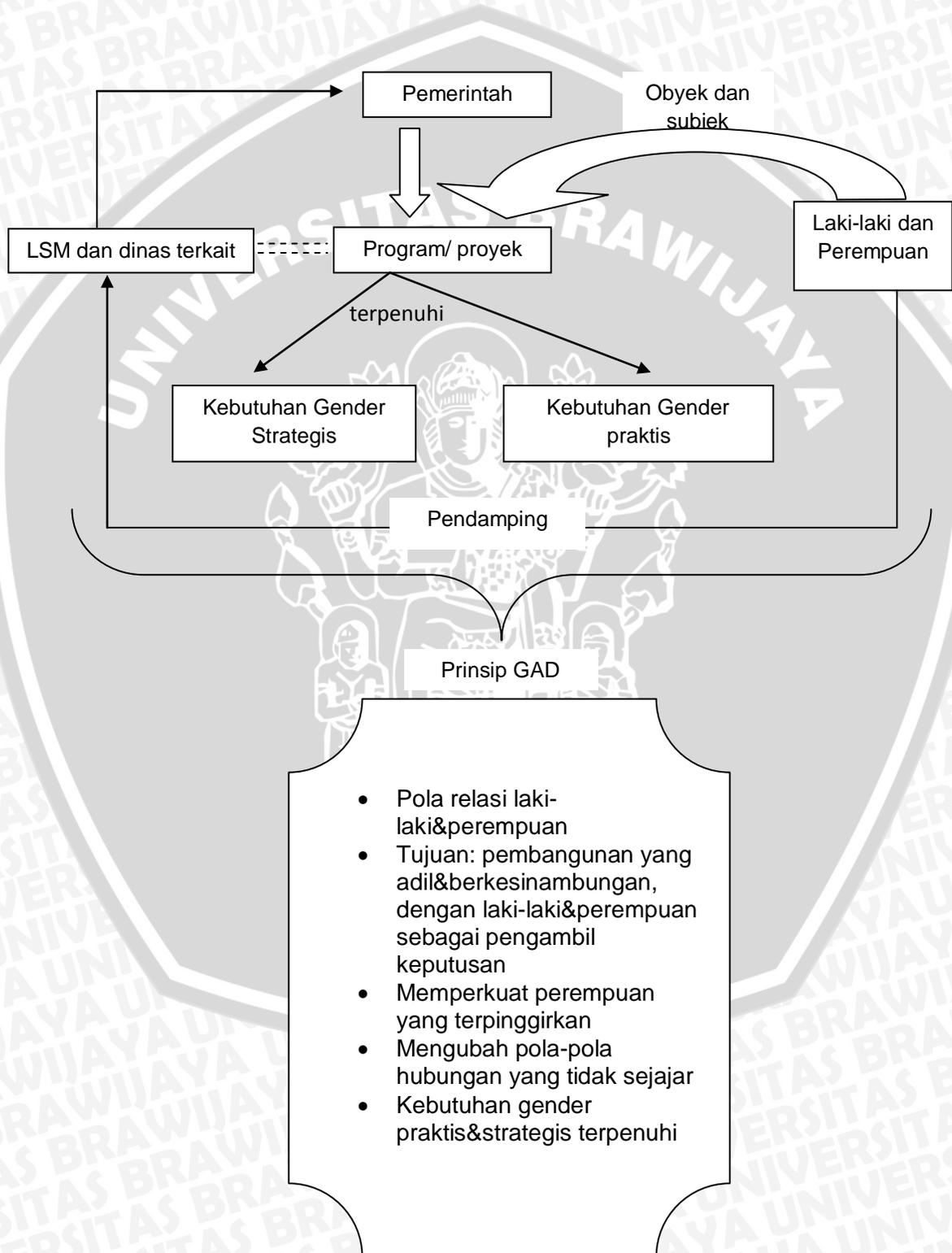
Di dalam pengelolaan PPP Mayangan yang selama ini sudah dilakukan sudah ada keterlibatan dari perempuan. Meskipun hanya sedikit dan hanya berperan di bidang administrasi dan pembukuan, tetapi sudah lebih bagus daripada tidak ada peran perempuan samasekali. Tetapi agar pembangunan PPP Mayangan ini lebih berparadigma GAD maka dalam pengelolaan perlu adanya keterlibatan perempuan bukan hanya dalam bidang administrasi, dalam bidang – bidang yang lain juga membutuhkan perempuan. Karena saat ini sudah banyak perempuan lulusan perikanan yang juga mengerti tentang hal – hal yang berkaitan dengan administrasi di pelabuhan, seperti bidang kesyahbandaran, surat ijin berlayar, pelayanan tambat labuh dan lain sebagainya. Sampai saat ini yang menduduki posisi yang berkaitan dengan kesyahbandaran di BPPPP Mayangan adalah laki – laki.

Untuk pengawasan atau monitoring terhadap pembangunan PPP Mayangan semua pihak harus dilibatkan. Semua *stakeholder* yang terkait mulai dari KKP Jakarta, DPK Propinsi Jawa Timur, DKP Kota Probolinggo, dan pihak legislatif baik pusat maupun daerah harus ikut serta dalam pengawasan pembangunan. Tak lupa masyarakat nelayan sebagai pengguna dan pemanfaat fasilitas PPP Mayangan juga harus ikut dalam proses pengawasan tersebut, karena merekalah yang lebih tahu tentang kekurangan dan kelebihan tentang pelabuhan. Dan semua itu harus menyertakan laki – laki dan perempuan.

Untuk mewujudkan pembangunan PPP Mayangan yang berparadigma GAD maka dalam prosesnya perlu juga peran serta pemerintah dalam mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan program – program mengenai kesetaraan gender. Selain itu kebijakan- kebijakan pemerintah harus memperhatikan kesetaraan gender. Pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan yang berparadigma gender juga harus dilakukan, baik dari pemerintah seperti badan pemberdayaan perempuan ataupun dari LSM –LSM yang berkecimpung di dunia pemberdayaan perempuan. Dengan demikian program – program pembangunan dalam hal ini pembangunan PPP Mayangan yang berparadigma GAD akan terwujud. Dan hal itu berarti tujuan pembangunan nasional akan tercapai. Untuk lebih memahami model tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.

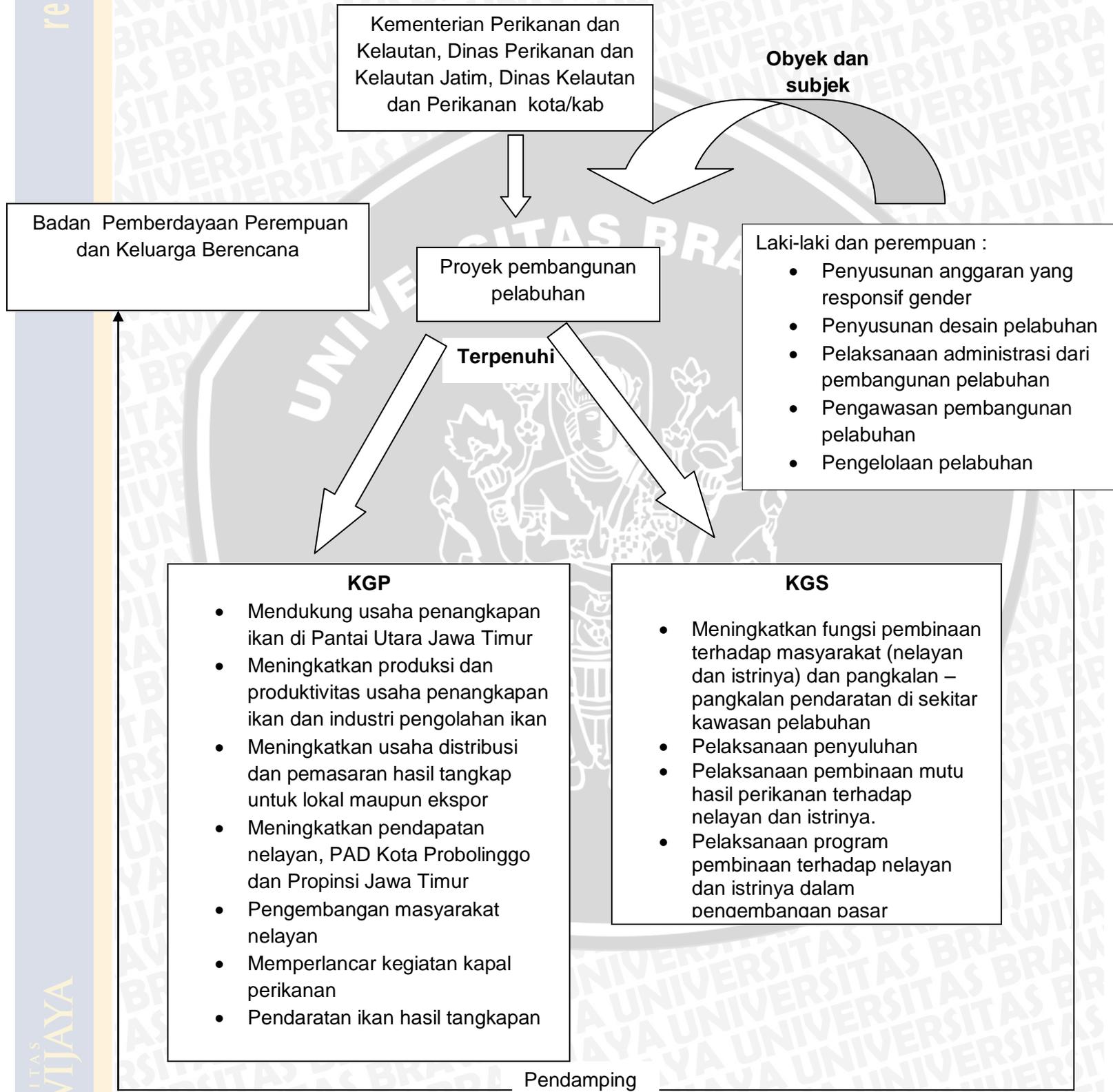
Gambar 13. Model pembangunan berparadigma GAD

MODEL PEMBANGUNAN BERPARADIGMA GAD



Gambar 14. Model pembangunan pelabuhan berparadigma GAD

MODEL PEMBANGUNAN PELABUHAN BERPARADIGMA GAD



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Profil gender dari masyarakat sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo meliputi profil kegiatan, akses dan kontrol dari masyarakat terhadap sumberdaya.
 - a. Profil kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar PPP Mayangan yang sebagian besar adalah nelayan dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan reproduktif dan kegiatan produktif. Kegiatan reproduktif yang lebih banyak berperan adalah kaum perempuan (istri dan anak perempuan). Sedangkan kegiatan produktif terdiri dari kegiatan perikanan (penangkapan, pengolahan, pemasaran), pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan dari masyarakat, serta kegiatan sosial. Pada aktivitas penangkapan semua yang melakukan adalah laki – laki, karena selama ini umumnya nelayan adalah laki – laki. Sedangkan pada aktivitas pengolahan dan pemasaran hasil tangkap lebih banyak didominasi oleh perempuan, terutama istri – istri dari nelayan Mayangan. Meskipun ada peran laki – laki tetapi mereka hanya sekedar membantu dan intensitasnya jarang. Pekerjaan utama dari masyarakat sekitar PPP Mayangan adalah nelayan yang didominasi oleh laki – laki. Selain sebagai ibu rumah tangga banyak juga perempuan yang memiliki pekerjaan sampingan untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pekerjaan yang dipilih oleh kaum perempuan tersebut adalah pedagang, penjual makanan dan minuman (warung nasi/

toko), *pengamba'*, dan pembantu rumah tangga. Kegiatan sosial yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar PPP Mayangan adalah arisan, pengajian, kerja bakti, dan rapat – rapat yang diadakan desa. Dalam kegiatan sosial tersebut laki – laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menghadirinya. Hanya saja dalam aktivitas tersebut perempuan sering hanya sebagai 'penyedia makanan' atau bagian konsumsi saja dan jarang diikutsertakan dalam rapat – rapat atau diskusi – diskusi yang dilakukan dalam forum tersebut.

- b. Profil kontrol dan akses dari masyarakat sekitar PPP Mayangan terhadap sumberdaya yang dimiliki adalah sebagai berikut : sumberdaya tersebut antara lain tanah, peralatan tangkap (kapal, alat tangkap, kendaraan pribadi), uang (pribadi dan pinjaman), pelatihan dan pendidikan. Laki –laki memiliki kontrol dan akses yang besar untuk semua sumberdaya, sedangkan perempuan hanya memiliki kontrol terhadap sumberdaya uang. Itupun terjadi jika perempuan memiliki pekerjaan sendiri (perempuan pekerja) bukan ibu rumah tangga. Perempuan memiliki akses untuk sumberdaya tanah, kendaraan pribadi, dan uang.
- c. Profil gender aktivitas dalam pembangunan PPP Mayangan meliputi keseluruhan proses dari pembangunan, mulai dari perencanaan pembangunan, pengaturan pekerjaan, pengawasan pekerjaan, pengupahan pekerja, pengambilan keputusan, pembukuan, pembelian bahan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan pelabuhan. Dari semua aktivitas tersebut, sebagian besar didominasi oleh laki – laki. Sedangkan perempuan hanya terlibat di dalam aktivitas pembukuan, pengupahan pekerja, dan pengelolaan pelabuhan.

d. Profil kontrol dan akses terhadap sumberdaya hasil dari pembangunan PPP Mayangan merupakan akses dan kontrol masyarakat (laki – laki dan perempuan) dalam menggunakan fasilitas dan sarana yang sudah ada di PPP Mayangan. Fasilitas yang ada di PPP Mayangan yang bisa digunakan oleh masyarakat antara lain : tempat pelabuhan itu sendiri, kapal/ armada, alat tangkap, box ikan/ drum, keranjang ikan, TPI, toilet, gudang es dan garam, kantor pelabuhan, kantor kamladu, SPDN, warung nelayan, pasar ikan, koperasi / kredit usaha. Dari semua fasilitas tersebut, laki –laki memiliki akses terhadap semua fasilitas tersebut. Perempuan juga memiliki akses yang sama terhadap semua fasilitas tersebut, kecuali pada kapal/ armada dan alat tangkap, karena umumnya yang menggunakan kapal/ armada dan alat tangkap adalah nelayan, dan nelayan adalah kaum laki –laki. Untuk kontrol terhadap fasilitas – fasilitas tersebut sebagian dimiliki oleh pihak pengelola pelabuhan, karena fasilitas tersebut adalah fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan masyarakat tidak memiliki kontrol / kuasa terhadap fasilitas tersebut. masyarakat hanya sebagai pengguna saja.

2. Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa konsep pembangunan PPP Mayangan masih berparadigma (*Woman In Development*) WID. Dimana dalam konsep WID perempuan hanya sebagai objek atau penerima dari kebijakan yang telah dibuat. Perempuan tidak diikutsertakan di dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dari pembuatan kebijakan tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari masih minimnya peran perempuan dalam proses perencanaan pembangunan PPP Mayangan. Jika ada, perempuan hanya berperan di ranah reproduksi, pembukuan atau administrasi dan itupun sangat kecil. Selain itu tujuan dari pembangunan PPP Mayangan masih berorientasi

untuk memenuhi kebutuhan gender praktis, sedangkan kebutuhan gender strategisnya belum terpenuhi.

3. Agar pembangunan PPP Mayangan sesuai dengan keadaan sekarang dimana harus memperhatikan kesetaraan gender, maka peneliti merekomendasikan untuk menggunakan konsep pembangunan yang berparadigma *Gender And Development* (GAD). Dimana dalam konsep ini laki – laki dan perempuan bekerjasama dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai pada pengawasan atau monitoring. Dengan diikutsertakannya perempuan dalam perencanaan maka akan dapat menyusun anggaran yang responsif gender. Selain itu pada akhirnya kebutuhan gender praktis dan kebutuhan gender strategis bisa terpenuhi. Semua lapisan masyarakat baik laki – laki maupun perempuan bisa menikmati hasil dari pembangunan tersebut dan tujuan dari pembangunan nasional bisa tercapai.

5.2 Saran

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti antara lain :

1. Untuk menghindari pembangunan yang bias gender, seharusnya dalam proses perencanaan pembangunan melibatkan perempuan, sehingga hasil dari pembangunan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, baik laki – laki maupun perempuan.
2. Aspirasi dari masyarakat mengenai pembangunan juga harus diperhatikan dan diakomodasikan, sehingga pembangunan tersebut akan tepat sasaran.
3. Masih perlunya pengetahuan tentang gender dan pembangunan kepada masyarakat dan pemerintah, sehingga kesetaraan gender bisa terwujud dalam pembangunan. Dan setiap kebijakan yang dibuat tidak bias gender. Selama ini

meskipun kesetaraan gender sudah menjadi wacana yang umum di masyarakat, tetapi dalam prakteknya kesetaraan gender masih sering terabaikan.

4. Konsep pembangunan yang seharusnya digunakan oleh pemerintah saat ini adalah dengan pendekatan GAD, sehingga tujuan dari pembangunan nasional bisa tercapai dan sesuai dengan target dari *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015 yang mana salah satu targetnya adalah mewujudkan kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan.
5. Untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan pesisir, maka perlu adanya peningkatan kualitas dari Sumberdaya Manusia (SDM) terutama dari perempuan pesisir tersebut. Peningkatan SDM bisa dilakukan dengan memberikan atau mempermudah akses perempuan kepada pendidikan dan pelatihan – pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya pendidikan dan pelatihan – pelatihan tersebut, kualitas dari perempuan pesisir bisa lebih meningkat. Karena secara langsung maupun tidak, pendidikan dan pelatihan – pelatihan yang diadakan bisa membuka atau memberi pengetahuan baru kepada mereka. Sehingga yang awalnya mereka hanya berkutat dengan dunia “dapur”, mereka bisa mengetahui tentang dunia “luar”.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2003. **Penelitian Berwawasan Gender Dalam Ilmu Sosial**. Humaniora volume XV no 3/2003.
- Anonymous.2010. **Perempuan minim terlibat dalam perencanaan pembangunan** .Warta Aceh. Waspada online
- Anonymous. 2010. **Bab III Pembangunan Nasional**
- Anshor, Maria Ulfah. **Advokasi Hukum Islam Yang Berspektif Gender**.
- Ch, Mufidah. 2004. **Paradigma Gender**. Bayumedia Publishing. Malang
- Chadwick, Bruce A dkk. 1991. **Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial**. IKIP Semarang Press. Semarang
- Dartoyo, A Ari. 2004. **Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Berbasis Digital (Studi Kasus: Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)**. Disampaikan dalam Temu Alumni MPKD 9-11 September 2004
- Diananto, Andreas Untung. 2006. **Kajian Dampak Pengembangan Wilayah Pesisir Kota Tegal Terhadap Adanya Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Kecamatan Tegal Barat)**. (Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro)
- Firmansyah, Saca. 2009. **Partisipasi Masyarakat**. Sacafirmansyah.wordpress.com
- Hadiz, Liza. 2004. **Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru**. Pusta LP3ES Indonesia. Jakarta
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. **Konsep dan Teknik Penelitian Gender**. UMM Press. Malang
- Hartomo, Wahyu. 2004. **Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu Dalam Menunjang Pembangunan Daerah**. Makalah pribadi Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702) Sekolah Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor
- Hasan, Iqbal. 2002. **Penelitian dan Aplikasinya**. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. **Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat**. Disampaikan pada sarasehan DPD Golkar TK.I Jawa Timur
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2002. **Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional**. Jakarta

- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2008. **Modul Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional di Indonesia**. Jakarta
- Kusnadi. 2001. **Pangamba' Kaum Perempuan Fenomenal**. Humaniora Utama Press (HUP). Bandung
- Lestari, Yuni dkk. 2008. **Persepsi Dan Partisipasi Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Kesetaraan Gender**. "DIALOGUE" JIAKP, Vol. 5, No. 2, Mei 2008 : 307-318. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik
- Moleong, Lexi J. 2007. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Muslikhati, Siti. 2004. **Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam**. Gema Insani. Jakarta
- Narbuko, cholid dan Abu Achmadi. 2008. **Metodologi Penelitian**. Bumi Aksara. Jakarta
- Parawansa, Khofifah Indar. 2006. **Mengukir Paradigma Menembus Tradisi Pemikiran Tentang Keserasian Jender**. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta
- Rahayu, Ninik Sri. 2008. **Analisis Gender Manajemen Usaha Pada Industri Mikro (Studi kasus : Industri Pembuatan Gula Kelapa Di Kabupaten Sleman)**. Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
- Shihab, M Quraish. 2007. **Perempuan**. Lentera Hati. Jakarta
- Simatauw, Meentje dkk. 2001. **Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**. Yayasan PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal. Jakarta
- Solihin, Iin. 2008. **Jasa Pelabuhan Perikanan**. linsolihin's Weblog.linsolihins.wordpress.com
- Sudarta, Wayan. **Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender**. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Udayana
- Sugiyono. 2008. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Alfabeta. Bandung
- . 2008. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Alfabeta. Bandung
- Suhaeti, Rita Nur dan Edi Basuno. 2003. **Integrasi Gender Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir**. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor.
- Suryono, Agus. 2004. **Pengantar Teori Pembangunan**. Universitas Negeri Malang (UM Press). Malang

Wibawa, Samodra. 1991. **Pembangunan Berkelanjutan Konsep dan Kasus.**
PT Tiara Wacana. Yogyakarta

Wikipedia. 2010. **Pelabuhan**

Zoebir, Zuryawan Isvandiar. 2008. **Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.** Zuryawan Isvandiar Zoebir's blog.

